Pemikiran Gus Dur
tentang
Perekonomian Kelautan
(1999 - 2009)

Muhammad Syamsul Huda

UNUSIA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

STUDI PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG PEREKONOMIAN KELAUTAN 1999-2009

M. SYAMSUL HUDA

Simaharaja
Publishing

Studi Pemikiran Gus Dur
Tentang Perekonomian Kelautan 1999-2009
©Simaharaja2018

ISBN : 978-602-51514-2-2

Penulis
M.Syamsul Huda

Desain Cover
M. Najibbudin

viii + 220 halaman, 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, Februari 2018

Percetakan
CV. Lintang Jaya Perdana

Penerbit
SIMAHARAJA
Jl. Kh. Wahid Hayim No. 175 Bapangan Jepara 59413
Jawa Tengah email: simaharaja@gmail.com

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Hak penulis dilindungi oleh undang-undang. *All right reserved.*

KATA PENGANTAR

Alhamd li allah rabb al-alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Atas berkat rahmat Allah Swt. akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Shalamat dan salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. keluarga, dan para sahabat semua.

Tesis ini berisi "Studi Pemikiran Gus Dur Tentang Perekonomian Kelautan 1999-2009", suatu terobosan pemikiran *Out of The Box* Gus Dur yang didukung oleh karakter masyarakat dan letak geografis wilayah Nusantara berawal dari anomali krisis menuju masyarakat yang sejahtera, bangsa yang kuat dan jaya. Dengan selesainya tesis ini, saya menyadari masih dangkalnya penelitian dan masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, teman, sahabat, keluarga, kolega, mitra kerja, terutama Mas Sulthonul Huda Wakil Sekretaris PBNU dan sahabat-sahabat diskusi di serambi LKKNU, sahabat Tenaga Ahli Komisi IV dan FPKB DPR RI yang membidangi kelautan maupun sahabat diskusi di Pojok Gus Dur PBNU dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Secara khusus ingin saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pascasarjana Program Magister Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta Dr.H.Mastuki, HS.M.Ag. yang telah memberi kesempatan saya untuk kuliah S2; Asisten Direktur I Bagian Akademik Pascasarjana Program Magister STAINU Jakarta

Hamdani, Ph.D yang telah memberi kesempatan kepada saya, sehingga tesis ini dapat diujikan pada sidang munaqasyah.

Bapak Dr. Mahrus el Mawa M.Ag sebagai pembimbing proposal tesis. Atas saran Bapak terhadap buku-buku babon untuk referensi penelitian, sehingga gagasan-gagasan yang saya utarakan menjadi penelitian tesis saya. Ketelitiannya mengoreksi proposal tesis begitu telitinya sampai mengajarkan sedikit ilmu filologi untuk melacak keaslian sumber fakta sejarah, selama bimbingan tidak mungkin dapat saya balas secara setimpal atas jasa Bapak, *jazakum allah ahsan al jaza*.

Bapak Dr. Zastrouw al-Ngatawi, M.Si sebagai pembimbing tesis. Atas kesabaran Bapak sehingga serpihan-serpihan gagasan tesis saya berbentuk, ketelitiannya mengoreksi tesis begitu detailnya sampai pada pemahaman antar paragraf serta penjelasan yang gampang dicerna untuk selalu memberi masukan pada tesis ini. Masih begitu tampak segar bugar ingatan Bapak bersama Gus Dur, sehingga memudahkan saya menyeselesaikan tesis ini. Selama bimbingan tidak mungkin dapat saya balas secara setimpal atas jasa-jasa Bapak, *jazakum allah ahsan al jaza*.

Bapak Dr. Rumadi, MA. sebagai pembimbing tesis. Atas kesabaran Bapak, ketelitian penjelasan buku-buku sumber pendukung penelitian dan pembimbing yang murah senyum untuk selalu memberi masukan pada tesis ini khususnya bagimana menulis yang benar dan baik, selama bimbingan tidak mungkin dapat saya balas secara setimpal atas jasa Bapak, *jazakum allah ahsan al jaza*.

Senior saya Dr. Amsar A. Dulmanan teman diskusi tentang Gus Dur, orang yang selalu ada waktu dan gampang ditemuin, atas jasanya selama ini tidak mungkin dapat saya balas secara setimpal atas jasa Bapak, *jazakum allah ahsan al jaza*.

Pihak-pihak di lingkungan Pascasarjana STAINU Jakarta yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan tesis ini, terutama Bapak Hamdani, Ph.D, Pak Ali, Sahabat Idris, Mas Abrohul, Pak Ayat dan yang lainnya.

Sahabat-sahabat seangkatan Pascasarjana STAINU Jakarta Kang Farid, Mas Farouk, Sahabat Mufid, Gus Ramdani, Ustadz Ghazali, Khoiron, Kyai Syamsuddin, Shobriyah, Daeng Usman Rauf, Ajengan Saep Haidar, Kam Taufik, Yazid, Zamroni, Anam, Umairoh, Gus Djazuli, Kang Jamal dan Hasan Basori.

Almarhum Nenek Kartijah dan Ibu Tiri saya Atik Supartiani yang telah membesarkan saya, kedua orang tua saya Hj Sani dan Bapak Ponidi yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Drs.H.Ibnu Multazam bos saya, sahabat diskusi saya dan guru saya yang telah membawa saya ke tempat-tempat pembudidayaan perikanan.

Terakhir teruntuk istri tercinta dan anak-anakku Siti Afifah, Siti Aminah, M Herbert Hidayat, Noerma Ratu Sholichah, Annisa Mahira, M Sulthonul Akbar dan Malika Auni Aufiyah kalian semua adalah matahari penyemangatku sehingga tesis ini dapat selesai. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya sehingga tesis ini selesai seraya saya berdoa memohon kepada Allah Swt. semoga tesis ini bermanfaat. Aamiin.

Jakarta, 19 November 2017

M. Syamsul Huda

Kamal

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 19
C. Tujuan Penelitian 20
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 21
E. Tinjauan Pustaka 21
F. Kerangka Teori 24
G. Metodologi Penelitian 40
H. Teknik dan Sistematika Pembahasan 44

BAB II MODEL-MODEL EKONOMI NUSANTARA: AKAR TEORITIK EKONOMI NUSANTARA 47
A. Model-Model Ekonomi Nusantara 47
1. Ekonomi Perniagaan Dunia..... 50
2. Ekonomi Monopoli, Eksploitasi dan Liberalisme 54
3. Ekonomi Berdikari 59
4. Ekonomi Eksklusif 63
5. Ekonimi Kerakyatan 66
B. Teoritik Ekonomi Moral Nusantara 71

BAB III PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID 85
A. Biografi dan Genealogi Keilmuan Gus Dur.... 85
1. Fase Internalisasi (Keluarga dan Pesantren) 87
2. Fase Eksplorasi (Kairo, Baghdad dan Eropa)..... 104
3. Fase Rekonstruksi (LSM, PBNU dan Pro Demokrasi) 110
B. Pokok-pokok Pemikiran Gus Dur tentang Ekonomi Kelautan 133

1. Paradigma Ilmu Ekonomi Kelautan Gus Dur 133
2. Laut adalah Komoditas Publik 146
3. Nilai Tambah Ekonomi Kelautan 151
4. Integrasi Ekonomi Kelautan di Lautan India 155
5. Kerjasama Ekonomi Kelautan di Lautan Pasifik 157
6. Pemikiran Pertahanan Negara Republik Indonesia 160
7. Pembaruan dan Kepresidenan 162
8. Membentuk Departemen Ekplorasi Laut.... 164
9. Membentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI) 166

BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN..... 169

A. Pembangunan Ekonomi Kelautan Inklusif dan Sustainable 170
B. Pengembangan Transportasi Laut 174
C. Prioritasi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 181
D. Pengembangan Ekonomi Lokal, Pesisir dan Pulau Kecil..... 187
E. Konektivitas Ekonomi Dunia..... 190
F. Wisata Bahari 193
G. Bioteknologi Kelautan 195
H. Revitalisasi Armada TNI dan Kepolisian 198
I. Kesaksian dan Respon Tokoh Terhadap Pemikiran 202

BAB V PENUTUP 207

A. Kesimpulan 207
B. Saran 211

Daftar Pustaka 215
Biografi Penulis 220

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak orang NU dan Indonesia yang cerdas dan memiliki kepemimpinan yang bagus. Ada yang lebih dari itu, Gus Dur memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan orang-orang semacam itu. Bahkan, dalam hal tertentu, Gus Dur berbeda dengan almarhum kakeknya Kiai Hasyim Asy'ari dan almarhum ayahnya Kiai Wahid Hasyim.

Gus Dur lahir di lingkungan tradisi pesantren yang kuat di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Namun, Gus Dur juga tumbuh dan berkembang di alam modern yang kuat pula, di kawasan Menteng. Dua lingkungan ini telah menyatu di dalam diri Gus Dur, yang kemudian terefleksi pada pemikiran-pemikirannya.

Dunia pesantren telah memungkinkan Gus Dur memahami dan mendalami pemikiran-pemikiran klasik Islam, khususnya yang berakar pada tradisi *Ahsunnah wal jamaah* (aswaja). Sementara itu, penguasaan bahasa asing (non-Arab), kemampuan belajar otodidak yang luar biasa dan bergaul dengan komunitas nonpesantren telah memungkinkan Gus Dur berkenalan dengan pemikiran-pemikiran mondial.

Ladang dan benih-benih pemikiran Gus Dur berkembang dan teraktualisasi bersering dengan kemampuannya di bidang

tulis-menulis, suatu bidang yang jarang digeluti oleh anggota komunitas pesantren. Maka sejak 1970-an, nuansa pemikiran yang dihadirkan Gus Dur memiliki kekhasan, yaitu ulasan mengenai isu-isu kontenporer yang berakar pada tradisi pemikiran Islam klasik. [1]

Perkembangan intelektual Gus Dur dibentuk oleh pendidikan Islam klasik dan pendidikan Barat modern. Faktor-faktor ini merupakan prasyarat baginya untuk mengenmabngkan ide-ide liberalnya. Dalam kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan perjalanan, membaca dan memperdebatkan ide, Gus Dur menyintesiskan kedua dunia pendidikan ini. Barangkali ia mengerjakan hal ini secara lengkap daripada mayoritas intelektual Islam Indonesia lainnya.[2]

Ketika modernisasi menjadi arus utama pemikiran dalam pembangunan masyarakat dunia ketiga, termasuk Indonesia, kebanyakan sarjana melakukan penelitian dan mempromosikan unsur-unsur modernitas dalam masyarakat Indonesia sebatas di lingkungan kalangan muslim modernis dan atau mereka yang berfikiran modern (*modern minded*), rasional dan terlatih secara teknis maupun profesional. Sementara kalangan muslim tradisionalis, cenderung dilihat dengan skeptisisme dan sebelah mata. Secara politik mereka diangggap naif dan oportunis, secara administrasi tidak mumpuni dan lemah.[3] Di saat NU dan tradisionalisme dianggap sebagai kemunduran, Gus Dur tampil sebagai juru bicara tradisionalisme.

---

[1] Kacung Marijan, Gus Dur NU Dan Indonesia, dalam Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir *ed*., *Nasionalisme Dan Islam Nusantara*, (Jakarta: Kompas, 2015), h.106.

[2] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*. Penerjemah Lie Hua, (Yogyakarta: LKiS, 2003; reprint, Yogyakarta:Mahabbah, 2017), h.138.

[3] M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 155.

Selain menunjukkan kelengkapan pengetahuan dan pemikiran kosmopolitan yang dimiliki kalangan tradisional sebagai koreksi pandangan-pandangan distortif dari pengamat Barat. Pada saat yang sama pemikiran Gus Dur juga menunjukkan bahwa dalam kultur tradisionalisme terdapat watak dinamis, rasionalis dan transformatif yang luar biasa, sehingga mereka bisa tetap eksis di tengah perubahan tanpa kehilangan identitas dan jati dirinya.

Tokoh-tokoh besar dunia selalu hadir membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan dengan sendirinya menjadi seorang inspirator bagi zamannya yang lebih baik. Gus Dur hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, juga membawa perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya pokok pikirannya dalam memandang ekonomi kelautan. Gus Dur juga telah menjadi jendela rumah NU, sekaligus rumah Indonesia. Pemikiran dan sikap politiknya telah menjadi sumber inspirasi, jembatan, dan sekaligus solusi bagi NU dan republik ini.[4]

Suatu keharusan bagi umat Islam dididik untuk mengenal dinamika sosial, kultural, politik, perekonomian dan dinamika edukasinya sendiri. Mereka dididik harus dapat mendialogkan kemaslahatan umat dan hak demokrasinya serta diberi kesempatan dengan menghilangkan kesan didekte. Abdurrahman Wahid mengatakan; kebesaran Islam bukan karena idiologi atau politik tapi justru melalui tasawuf, perdagangan dan pengajaran.[5]

Di antara pemikiran Gus Dur yang mengemuka adalah berkaitan dengan ekonomi kelautan. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Hendi Kariawan mengungkapkan bahwa untuk

---

[4] A.Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. ix.

[5] Ahmad Hisyam, *Gagasan Ekonomi Gus Dur 1984-2001,*(Skripsi S1 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 2.

mengatasi krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak 1997 diperlukan reorientasi basis/dasar pembangunan ekonomi, yaitu dari ekonomi berbasis daratan menjadi ekonomi berbasis kelautan. Harus diakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia 75% terdiri dari laut. Sayang potensi ekonomi laut belum dimanfaatkan secara optimal. Mestinya ekonomi berbasis kelautan menjadi primadona pembangunan perekonomian nasional.[6] Sebuah ungkapan Abdurrahman Wahid; Sudah saatnya Indonesia untuk melakukan reorientasi pembangunan perekonomian nasionalnya dari perekonomian berbasis daratan menjadi berbasis kelautan.[7] Guna menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Solusinya menghidupkan kembali ekonomi kelautan untuk pertumbuhan dan pemerataan sebagai upaya untuk menciptakan "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" sebagaimana yang diidam-idamkan oleh Pancasila.

Dalam Al-Quran sendiri ayat yang mengandung kata laut lebih banyak kalau dibandingkan dengan ayat yang mengandung kata darat. Al-Quran menggunakan terma *al-bahr* dengan berbagai bentuk derivasinya (kata jadian), yang terulang sebanyak 41 kali (Al-baqi, t.th). Kata بحر (*bahr*) yang dalam bahasa Indonesia berarti laut (Al-Munawwir,1984). Kata *bahr* ditinjau dari segi etimilogi berasal dari kata dasar *bahara* (*fi'l tsulasi mujarrad* / verba lampau simpel aktif) berwazan *fa'ala*, terdiri dari akar huruf-huruf *ba'-ha'-ra'*. Kata *bahr* merupakan bentuk *masdar* (nomina) dari *bahara - yabharu - bahran*. Menurut

[6] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* (Jakarta: Teplok Press, 2004), h. vi.

[7] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,*h. 73.

Ibn Faris (1998), laut dinamakan dengan *"bahr"* oleh karena luas dan terhamparnya lautan tersebut.[8]

Dalam Al-Qur'an ayat-ayat laut tersebut mengandung pola hubungan manusia dengan alam sekitarnya, di dalamnya terdapat dimensi ekonomi pemanfaatan alam sekitar melalui apa yang diistilahkan dengan hubungan pendayagunaan (*alaqah al-taskhir)*. Allah Swt. berfirman dengan redaksi kata *sakhkhara*:

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." (QS. An-Nahl [16]: 14).

Berbekal dan berpegang teguh pada Al-Qur'an, kita seharusnya membuka mata akan kenyataan alam Nusantara yang menakjubkan berupa laut. Bahwa laut adalah tempat mengais rezeki yang dianjurkan oleh Allah Swt. laut adalah tempat yang penuh dengan sumber daya alam yang dapat didayagunakan untuk mendorong terciptanya kesejahteraan umat manusia dan secara bersama-sama masyarakat dapat

[8] Rikmat Ismatullah, "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume I, No. 2 (Desember 2011), h. 100.

memanfaatkannya. Allah Swt. berfirman pada ayat yang lain dengan redaksi kata sakhkhara lagi:

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ

مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِبِاَمْرِهٖ

وَسَخَّرَلَكُمُ الْاَنْهٰرَ

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu." (QS. Ibrahim [14]: 32).

Untuk mengatur ini selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat aturan hukum pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang dituangkan dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33:[9]

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

[9] MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), Cet. XI, h. 164.

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Munculnya aturan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 merupakan wujud dari sebuah Hadis Rasulullah Muhammad Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُفِى ثَلَاثٍ فِى الْمَاءِوَالْكَلَاءِوَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ اَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput hutan dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah).

Kemudian dalam Al-Quran pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman dengan redaksi sakhkhara lagi:

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar diatasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur." (QS. Al-Jasiyah [45] : 12).

Kata "sakhkhara" digunakan dalam arti menundukan sesuatu agar mudah digunakan oleh pihak lain. Sesuatu yang ditundukan Allah Swt. tidak lagi memiliki pilihan, dan dengan demikian manusia yang mempelajari dan mengetahui sifat-sifat sesuatu itu akan merasa tenang menghadapinya karena yang ditundukan tidak akan membangkang. Dari sini diperoleh kepastian hukum-hukum alam (Shihab, 2002).

Penundukan bahtera adalah kemampuan manusia membuatnya sehingga dapat digunakan untuk berlayar dan mengangkut barang-barang menuju arah yang mereka kehendaki. Dan sebelum itu Allah Swt. menciptakan bahan-bahan mentah pembuatannya seperti kayu dan besi, sungai dan laut untuk dilayarinya serta angin yang mempengaruhi pelayarannya.[10]

Kawasan Nusantara bukan pelayaran tertutup. Posisi strategis tentang lalu lintas perniagaan kepulauan Nusantara, terutama posisi perdagangan pribumi di Nusantara sebelum dan sesudah kedatangan orang-orang bangsa Eropa. Terletak antara Samudera Hindia dan laut Cina serta menjadi pemisah antara dua wilayah yang berbeda secara geografis, antropologis

[10] Rikmat Ismatullah, "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, h. 101.

dan ekonomi, Semanjung Malaya dan kepulauan Indonesia sejak masa lalu telah memainkan peran penting sebagai daerah transisi. Tidak hanya menjadi negara transit untuk produk-produk Timur dan Barat, negara-negara ini juga menjadi pertemuan para pedagang yang datang dari kedua arah. Bahkan dua sistem angin yang berlawanan bertemu di sini, yaitu angin muson dari Samudera Hindia dan angin pasat dari laut Cina.

Rempah-rempah mulai masuk ke Eropa melalui saudagar-saudagar Arab di Timur Tengah. Saudagar-saudagar Portugis, Spanyol dan Belanda menjadi pedagang perantara dalam perniagaan rempah-rempah itu. Mereka mengangkut rempah-rempah dari beberapa pelabuhan di perairan Laut Tengah untuk dijual ke pasar-pasar Eropa Barat. Akan tetapi pada tahun 1453 M. M. Sultan Muhammad Al Fatih telah menaklukkan Konstantinopel (Bizantium) yang merupakan ibukota Romawi Timur. Kemenangan ummat Islam atas kaum Katolik Ortodoks di Turki, Bizantium menyebabkan sepinya perniagaan di Laut Tengah.

Selama empat puluh tahun terakhir, telah dilakukan riset terhadap sejarah Crivijaya (Sriwijaya). Hasil yang dicapai kadang kala spektakuler, terutama yang dicapai oleh ilmuwan Perancis, Coedes yang karyanya berjudul "A Romance of Scholarship". Baru setelah kebangkitan kerajaan ini yaitu sekitar awal abad ke-11, sumber-sumber Cina dan Arab mulai mengungkapkan peran spesifik wilayah Indonesia. Selama ratusan tahun, pusat pemerintahan Kerajaan Buddha Sriwijaya yang terkenal ini berada di kota Palembang modern. Dalam beberapa hal, kerajaan ini dianggap sebagai pendahulu Malaka. Karena Sriwijaya menguasai sebagian besar wilayah pesisir Timur Sumatera dan juga sebagian Semenanjung Malaya, kerajaan ini mengendalikan Selat Malaka sama seperti yang dilakukan Malaka di masa selanjutnya. Bahkan kekuasaan Sriwijaya

dianggap jauh lebih luas karena Jawa bagian Barat menjadi negara vassal (lindungan) sehingga Selat Sunda juga berada di bawah kendalinya. Di Semanjung Malaya, pengaruhnya meluas hingga Ligor yang terletak dekat Tanah Genting. Pengaruh juga meluas ke pusat perniagaan lama di Kedah.[11]

Sebuah sumber Cina dari awal abad ke-13 memberikan rangkuman terperinci tentang barang-barang yang ditangani Sriwijaya. Produk-produk yang dibawa oleh Ta-ceh (orang Asia bagian barat) atau diekspor oleh Sriwijaya tidak hanya terdiri dari penyu, kamper, berbagai jenis kayu berharga, rempah-rempah seperti cengkeh, dan kapulaga, mutiara, parfum, gading dan karang, tetapi juga kain wol dan katun. Barang-barang ini ditukar dengan emas dan perak, porselin, sutra, rhubarb, gula, besi, beras dan lain –lain, yaitu produk-produk yang terutama berasal dari Timur jauh. Namun, sebagain produk juga berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Barang-barang mewah memang mendominasi, tetapi pada masa awal-awal ini sudah ada juga barang-barang dalam jumlah besar. Ketika lalu lintas semakin padat, kargo berupa barang semacam ini juga semakin banyak jumlahnya.

Orang Persia dan Arab mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Orang India kemungkinan juga melakukan hal yang sama. Orang Cina juga terkenal telah melakukan pelayaran panjang kearah Barat, melewati Semenanjung Malaya dan ke Samudera Hindia. Namun, mereka tidak menggunakan rute ini sebelum abad ke-19. Bahkan setelah masa itu, lalu lintas Cina tidak terlalu banyak. Dikatakan juga mereka telah berlayar hingga teluk Persia. Namun, ketika perdagangan Persia-Arab-Cina ini hanya berkembang dalam waktu singkat, orang Cina

[11] Melink Roelofsz, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500-1630,* penerjemah Tim Komunitas Bambu, (Depok: Komunitas Bambu, 2016), h. 11.

mulai menghentikan pelayaran mereka di pelabuhan-pelabuhan pesisir Barat India. Di sana, mereka menemukan permintaan yang memadai untuk barang-barang yang mereka bawa. Mereka kemudian membawa kembali barang-barang dagangan yang mereka butuhkan sendiri, terutama lada dari pesisir Malabar. Apakah mereka juga membawa sejumlah rempah-rempah dari wilayah Indonesia atau produk ini hanya dibawa oleh kapal India? Apakah orang Melayu dari Sriwijaya juga memiliki peran dalam perdagangan ini? Hal yang juga tidak kalah penting adalah pertanyaan bagimana rempah-rempah ini dikirim dari wilayah produksi di Maluku dan Banda ke Sriwijaya? Nantinya, orang Jawa memainkan peran besar dalam cabang perdagangan ini. Tetapi apakah mereka sudah melakukan pada masa awal ini? Apakah ada hubungannya dengan kebangkitan kerajaan Singosari? Semuanya adalah masalah yang sulit dicari jawabannya.

Selain bertindak sebagai perantara, Sriwijaya melakukan perdagangan dan pelayaran sendiri. Jika sumber-sumber dapat dipercaya, aktifitas ini meliputi bidang yang lebih luas daripada negara-negara perdagangan lainnya di Indonesia atau Malaya di masa selanjutnya. Bagaimanapun juga para pedagang Sriwijaya biasa mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan mereka juga dapat ditemukan di distrik-distrik pesisir Afrika Timur.[12]

Pola hidup niaga laut itu, walaupun tetap mengkonsumsi makanan pokok berupa beras/nasi, namun administrasi pemerintahannya tidak sama dengan sistem pemerintahan pola hidup agraris yang kita temui di Jawa. Karena itu, kita tidak pernah mendengar adanya pegawai-pegawai setempat yang mempunyai 'lungguh' yaitu pembesar feodal yang kekuasaannya

[12]Melink Roelofsz, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500-1630*, penerjemah Tim Komunitas Bambu, h. 13.

didasarkan atas sedikit atau banyaknya orang yang mengerjakan tanah / sawah yang dikuasainya.[13]

Di Sumatera bagian Utara, negara-negara kota pelabuhan yang sudah disebutkan sebelumnya mengalami pertumbuhan cepat akibat ekspor lada yang berkembang. Jika sumber Cina abad ke-12 yang dikutip sebelumnya tidak memasukkan lada dalam produk-produk Sriwijaya (kecuali kita menganggap kapulaga yang disebut dalam sumber Cina tersebut memasukkan lada), tidak lama kemudian produk ini dibudidayakan secara intensif di lereng-lereng ladang pegunungan Sumatera bagian Utara. Lada ini menjadi salah satu produk unggulan dan ekspor utama pelabuhan laut Samudra Pasai dan Pidie.

Sementara itu di bumi Jawa, dengan mulai melemahnya kerajaan Singasari, berdirilah kerajaan Majapahit dengan pendirinya Raden Wijaya. Dengan bantuan Lurah Desa Kudadu, Raden Wijaya menyeberang ke Madura dengan tujuan meminta perlindungan dan juga bantuan Wiraraja yang pada saat itu menjabat sebagai Adipati Sumenep. Akhirnya Arya Wiraraja memberi nasehat kepada Raden Wijaya untuk pergi kembali ke Kediri dan menghambakan diri kepada Jayakatwang.

Melalui jaminan Wiraraja, pengabdian Raden Wijaya diterima oleh Jayakatwang. Ia dianugerahi tanah di desa Tarik atau lebih dikenal dengan hutan Tarik. Atas bantuan orang-orang Madura, hutan Tarik dibuka dan dijadikan perkampungan baru oleh Raden Wijaya. Desa yang baru dibentuk tersebut kemudian diberi nama Majapahit.[14]

---

[13]Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* (Jakarta: Teplok Press, 2004), h. 15.

[14] Muhammad Muhlisin, *Runtuhnya Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam di Bumi Jawa,* (Yogyakarta: Araska, 2015), h. 25.

Benih-benih kejayaan kerajaan Majapahit mulai tampak ketika pemerintahan dipegang oleh Tribhuwana Tunggadewi. Komandan pasukan Bhayangkari sekaligus patih kerajaan Daha, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubhumi. Gajah Mada menggantikan Arya Tedah (empu Krewes) yang mengundurkan diri karena usianya yang sudah tidak memungkinkan untuk memangku jabatan sebagai Patih Amangkubhumi. Pada masa Pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi wilayah Majapahit yang awalnya hanya meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian meluas hingga ke daerah Sumatera. Para sejarawan juga banyak yang mengatakan bahwa, era Tribhuwana Tunggadewi adalah masa perluasan wilayah Majapahit ke pelbagai penjuru. Perluasan wilayah ini adalah wujud kongkrit dari "Sumpah Palapa" yang diikrarkan Patih Gajah Mada.

Dari pernikahan Tribhuwana Tunggadewi dengan Kertawardhana lahir seorang anak laki-laki bernama Rajasanagara (Hayam Wuruk) yang kelak menjadi raja paling bersinar di Majapahit. Sebelum memegang tumpuk kekuasaan Majapahit secara penuh, Hayam Wuruk pada masa Pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi telah dinobatkan menjadi Rajakumara (raja muda) baru setelah Tribhuwana Tunggadewi turun tahta Hayam Wuruk menjadi raja penuh di Majapahit dengan gelar "Rajasanagara" dengan didampingi Patih Amangkubhumi Gajah Mada.

Memang tidak ada "bukti-bukti sejarah" berupa prasasti ataupun barang-barang lain tetapi ini adalah spekulasi sejarah yang dapat penulis pertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam melihat sejarah masa lampau bangsa kita, dapatlah dicapai kesimpulan seperti itu. Terlebih jauh lagi dengan melihat letak geografis kerajaan itu dekat sungai besar seperti Brantas, tidak

salah juga menyimpulkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang berpola hidup niaga laut. Penulis tidak tahu, sampai seberapa jauh munculnya orientasi niaga laut ini dipengaruhi oleh sisi Buddha dari kaum Hindu Buddha, yang bercampur dengan orientasi kaum Sufi dari tarekat Qadiriah. Yang jelas pengaruh angkatan laut Majapahit, dengan Bendera Merah Putihnya segera memiliki kawasan sangat luas. Dari pulau Madagaskar di pantai Timur benua Afrika: hingga ke pulau Tahiti di kawasan Pasifik serta kepulauan Nusantara diantara keduanya, seluruhnya menjadi "daerah kekuasaan" berada di bawah kekuasaan angkatan laut Majapahit. Penulis juga berani berspekulasi lebih lanjut, bahwa angkatan laut Majapahit itu juga berada di bawah kekuasaan angkatan laut Tiongkok semacam angkatan laut dan angkatan udara Australia /Canada yang tunduk kepada Ratu Inggris.[15]

Pada tahun 1389 Raja Hayam Wuruk wafat dan dimakamkan di Candi Ngetos dekat Berbek Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, sepeninggal periode pemerintahan inilah terjadi kekacauan politik. Bumi Majapahit diliputi pertentangan keluarga berebut tahta kekuasaan yang lebih terkenal dengan Perang Paregrek. Pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, ada pergeseran secara besar-besaran dengan mulai berkembangnya komunitas kaum beragama Islam dengan berdirinya kerajaan Islam Demak.

Seiring dengan semakin sirnanya pamor Majapahit, kota-kota besar di daerah pesisir dikuasai oleh para pedagang Muslim. Di mana para saudagar Muslim tersebut selanjutnya membuka bandar-bandar dagang baru yang dapat menyaingi bandar dagang Majapahit. Bintoro atau Demak (Glagah Wangi) merupakan suatu daerah pesisir yang menjadi pesaing berat

[15] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan ,* h. 21.

bandar dagang Majapahit. Banyak para pedagang dari berbagai negara yang berkumpul di Demak untuk berdagang kemudian menetap di sana dan memperdalam agama Islam di daerah tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, Raden Patah dalam waktu singkat dapat mengumpulkan orang-orang beragama Islam terutama yang bermukim di Demak. Orang-orang tersebut kemudian dididik untuk menjadi angkatan perang Kadipaten Demak untuk mempertahankan bandar dagang dan keyakinan agama Islamnya.

Dalam perkembangannya, orang-orang Islam yang berhasil dipersatukan oleh Raden Patah tersebut menjadi satu kekuatan besar bagi Kadipaten Demak. Kekuatan itu meliputi bidang kemiliteran, pemerintahan dan juga bidang perekonomian. Kekuatan besar itu juga yang menjadi modal utama kadipaten Demak untuk melepaskan diri dari cengkraman Majapahit. Dalam perkembangan selanjutnya, Demak yang mendapatkan bantuan dari daerah-daerah pesisir seperti Jepara, Surabaya, Kudus dan Banten secara terang-terangan memisahkan diri dari Majapahit.

Demak kemudian menjadi kerajaan yang berdiri sendiri dan bercorak Islam (1478 M). Raja pertamanya adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Sri Alam Akbar (Senopati Jin Bun Ngabdur Rahman Panembahan Palembang Sayidin Panata Gama).[16]

Tradisi Majapahit yang berorientasi niaga laut, diteruskan oleh Kesultanan Demak. Dengan demikian kita dapat melihat tokoh seperti Adipati Unus (nama sebenarnya Adipati Yunus), tercatat berperang melawan pihak Portugis di Selat Malaka. Dan para sultan Demak memelihara kontak dengan pihak

[16] Muhammad Muhlisin, *Runtuhnya Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam di Bumi Jawa,* h. 98.

pihak kesultanan lain di kawasan Nusantara dan Verenigde Oost Indische Compagpagnie (VOC). Yang belum jelas bagi kita semua, bagaimanakah hubungan Kesultanan Demak dengan daerah-daerah agraris di wilayah selatannya. Bagaimanapun juga untuk suplai makanan utama berupa beras, Demak harus menggandalkan pada daerah agraris, seperti Cepu. Di daerah itu dua-tiga abad sebelumnya sudah terdapat jaringan pengairan yang menghasilkan sawah-sawah subur, dan hasilnya berupa padi yang diekspor keluar. Demikian juga dengan wilayah Sragen sekarang, dahulu menghasilkan cukup padi dan palawija dari pengairan sungai Bengawan Solo, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil daripada Cepu. Daerah Purwodadi, sekarang sudah menjadi wilayah Kabupaten Grobogan / Purwodadi, sudah menjadi penghasil palawija sejak dahulu, karena tanahnya berkapur (lime soil).[17]

Sultan Patah telah membangun sebuah kekuatan "imperium Islam" pertama dan terbesar di tanah Jawa. Sebuah imperium Islam yang tidak ada tandingannya saat itu. Kerajaan Islam Demak merupakan kerajaan yang sadar akan identitas diri sebagai kerajaan maritim, wilayah kekuasaanya membentang dari ujung Barat Jawa hingga kebagian Timurnya. Bahkan pengaruhnya sampai ke Lampung dan Palembang di ujung Tenggara kepulauan Sumatera maupun di Pasai Aceh kepulauan Malaka, pulau Borneo (Kalimantan) bagian selatan, Celebes (Sulawesi) bagian Selatan, Madura, Lombok, Nusa Tenggara Barat hingga Ternate dan Tidore di kepulauan

[17] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* .h. 27.

Maluku.[18] Bahkan dengan berbasis kelautan inilah agama Islam berkembang pesat di wilayah kita ini.[19]

Perkembangan setelah naiknya Panembahan Senopati Ing Ngalaga Sayyidin Panatagama Kalipatullah Ing Tanah Jawi yaitu gelar Sutawijaya, ke atas tahta kerajaan di Pajang menjadi berbeda sama sekali. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Pajang: di sebelah Timur Bengawan Solo ke Plered, Bantul (daerah di Yogyakarta sekarang). Dengan perpindahan itu, maka kesultanan/kerajaan yang tadinya masih berorientasi niaga-laut, akhirnya menjadi kehilangan arah sama sekali, apalagi Senopati harus melakukan konsolidasi atas kekuasaan yang direbutnya itu. Waktunya hampir secara keseluruhan disita oleh kegiatan dalam rangka konsolidasi militer itu.[20]

Perubahan orientasi pola hidup lebih nyata lagi saat kesultanan di bawah pemerintahan anaknya Sutawijaya sendiri, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Perubahan orientasi hidup dari masyarakat berorientasi niaga-laut, sekaligus berubah menjadi masyarakat agraris. Pola niaga-laut dihancurkan total dalam struktur kekuasaannya, seperti institusi bea cukai, kantor syahbandar menjadi terhenti sama sekali dan pembuatan kapal-kapal laut jarak jauh yang baru terhenti secara keseluruhan.

Dalam pengamatan Gus Dur, Gus Dur melihat masih kuatnya budaya pembangunan kontinental yang ujungnya mengekploitasi alam sekuat-kuatnya, hutan-hutan dibabat oleh para pemegang Hak Penguasahaan Hutan (HPH), izin tambang-tambang yang akibatnya pola pembangunan akan merusak lingkungan. Maka kekayaan lautlah yang seharusnya

---

[18]Rachmad Abdullah, *Kerajaan Islam Demak: Api Revolusi Islam Di Tanah Jawa (1518-1549*), (Solo: Al Wafi, 2015), h. 26.

[19] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* .h.vii.

[20] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h.31.

menjadi dasar bagi kebangkitan kembali ekonomi kita. Kita harus memulai kembali menyusun tata niaga laut.

Pada saat kekinian, negara kepulauan Indonesia dengan kepemimpinan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan merealisasikan ideologi "Trisakti" yaitu menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan. Karena itu, untuk mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan diperlukan suatu terobosan yang didukung oleh karakter masyarakat dan letak geografis negara Indonesia. Konsep "Poros Maritim Dunia" akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, bangsa yang kuat dan jaya.

Dalam visi, misi dan program aksi Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK, telah dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut "NAWACITA." Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui "citizen charter".[21]

Adapun fokus substansi penataan kelembagaan sejalan dengan agenda prioritas dalam NAWACITA dan program Quick Wins, untuk bidang polhukhankam meliputi antara lain penguatan kelembagaan penegakan hukum di wilayah jurisdiksi laut, pengembangan sistem keamanan yang integratif dan komprehensif, penguatan kelembagaan dan terapi penanganan narkoba, penguatan sistem presidensial, peningkatan kapasitas

[21] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional "*Perencanaan Awal RPJMN 2014-2019,* (Jakarta: Bappenas, 2014), h. 713.

lembaga-lembaga perwakilan, penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional, penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kelembagaan APIP (Aparat Pengawasan Inter Pemerintah) untuk mendukung implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), peningkatan efektivitas keterpaduan sistem peradilan pidana, penguatan kelembagaan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas dalam merumuskan peraturan perundangan yang efektif dan sinergis.[22]

Munculnya konsep "Poros Maritim Dunia" Presiden Joko Widodo yang merupakan masalah aktual bahkan sedang hangat dibicarakan, model pembangunan ini tidak lepas dari pokok-pokok pikiran besar KH. Abdurrahman Wahid yang lebih kita kenal dengan "Gus Dur." Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam melihat sejarah masa lampau bangsa kita, dapatlah dicapai kejayaan bangsa ini terbukti pada kehidupan yang berpola niaga laut. Berangkat dari argumen-argumen masalah di atas, sehingga menarik untuk diangkat dan dijadikan sebuah penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Melihat kenyataan bahwa Islam merupakan suatu aturan pedoman hidup yang komprehensif yang merangkum segala aspek kehidupan, bagian dari ajaran itu Allah memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif. Perekonomian kelautan yang didukung oleh karakter masyarakat dan letak geografis negara Indonesia merupakan solusinya.

---

[22] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional "*Perencanaan Awal RPJMN 2014-2019*, h. 740.

Sudah semestinya kebijakan seorang pemimpin sebagaimana yang sudah dikonsepkan secara tegas oleh agama Islam " Tindakan yang dilakukan seorang imam (pemimpin) atas rakyat yang dipimpinya terkait langsung dengan kepentingan kesejahteraan mereka." Apa yang menjadi kebijakan perekonomian Presiden Jokowi saat ini pasti tidak muncul begitu saja, menurut penulis ada hubungannya yang saling mempengaruhi dengan kebijakan perekonomian dan solusi yang ditawarkan Gus Dur sebagaimana dalam bukunya "Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan."

Berangkat dari latar belakang masalah inilah, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Gus Dur mengenai ekonomi kelautan?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Gus Dur tersebut terhadap Pembangunan Indonesia?

Pertanyaan utama ada pada pertanyaan yang pertama, hal ini penting untuk mengungkap teks dan wacana Gus Dur "*Membangun Ekonomi Kelautan*" khazanah keilmuan Islam Nusantara, sehingga dapat dibaca dan mudah dipahami masyarakat luas. Baru kemudian pertanyaan selanjutnya untuk melihat dampak dari pemikiran Gus Dur terhadap proses perubahan pembangunan ekonomi kelautan Nusantara secara langsung untuk mendorong adanya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pemikiran Abdurrahman Wahid terkait pengembangan ekonomi kelautan dalam konteks pemberdayaan masyarakat bahari.

2. Menggambarkan "ekonomi kelautan" dengan melihat geografis Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya laut.

D. Kegunaan Atau Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaatnya penelitian ini diarahkan untuk:

1. Menemukan pemikiran Abdurrahmad Wahid terkait pengembangan ekonomi kelautan yang akan berguna bagi upaya meletakkan dasar-dasar masyarakat bahari.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penelitian selanjutnya yang serupa untuk pengembangan pengetahuan di bidang maritim Nusantara.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian kualitatif ini, peneliti terlebih dahulu melakukan analisa sebelum penelitian ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. Jadi ibarat seorang ingin mencari pohon jati di suatu hutan. Berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Oleh karena itu peneliti dalam membuat proposal penelitian, fokusnya adalah ingin menemukan pohon jati pada hutan tersebut, berikut karakteristiknya.

Secara teknis penulis melakukan identifikasi bahan pustaka yang berhubungan dengan "pemikiran perekonomian" Gus Dur untuk melakukan penelaahan (review). Berdasarkan penelusuran penulis tesis belum ada tesis yang membahas Gus

Dur dengan pemikirannya tentang ekonomi kelautan, namun ada penelitian awal tentang perekonomian Gus Dur yang dilakukan oleh Ahmad Hisyam mahasiswa jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dalam tugas akhir strata satu/skripsi tahun 2015 yang berjudul "Gagasan Ekonomi Gus Dur 1984-2001."

Skripsi Ahmad Hisyam yang berjudul "Gagasan Ekonomi Gus Dur 1984-2001," banyak diuraikan pemikiran-pemikiran ekonomi Gus Dur secara umum dan luas. Dengan kondisi perekonomian yang carut marut, Gus Dur dengan pemikirannya memimpikan adanya suatu jaringan perbankan pedesaan, seperti yang ada di Bangladesh dengan Graameen Bank.[23] Dalam skripsi ini sedikit disinggung konsep pemikiran Gus Dur tentang perekonomian kelautan, akan tetapi skripsi ini cukup membantu penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Selanjutnya penulis melakukan studi kritis terhadap buku Gus Dur "Islamku, Islam Anda, Islam kita." Dalam buku tebal ini dikonsepkan oleh Gus Dur adanya ekonomi kerakyatan yakni ekonomi yang mementingkan kemakmuran dan keselarasan ekonomi bagi rakyat. Jika segala macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini sejak kemerdekaan kita, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa, yang berarti orientasi ini tidak memihak kepada kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kita. Orientasi membangun UKM, dijalankan dengan penyediaan

[23] Ahmad Hisyam "*Gagasan Ekonomi Gus Dur 1984-2001,*" (Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 4.

kredit yang berbunga sangat rendah sebagai modal pembentukan UKM tersebut.[24]

Dalam buku "Islamku, Islam Anda, Islam kita" karya kali ini, sebenarnya secara utuh Gus Dur membahas tentang Islam. Seperti pemahaman tentang kenegaraan, kemajemukan sampai pada masalah ekonomi kerakyatan.

Lebih spesifik lagi, buku yang ditulis oleh KH. Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan "Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan," buku ini menurut penulis tesis sangat singkat karena hanya terdiri atas 128 halaman, akan tetapi padat akan makna. Selanjutnya buku ini akan menjadi rujukan awal dan menarik untuk diungkap dengan melakukan penelitian lebih lanjut. Agar kajian lebih mendalam penulis tesis akan mengumpulkan dan mengidentifikasi serta menganalisis data-data tulisan dan artikel Gus Dur tentang perekonomian. Peneliti selanjutnya akan melakukan uji sahih dengan wawancara mendalam (interview) pada pemangku kepentingan (stakeholder) dan tokoh-tokoh yang pernah berhubungan langsung dengan perekonomian kelautan.

Untuk memperoleh tahap-tahapan mulai dari pertanyaan sampai jawaban sepenuhnya dari ekspirimen dan teknik-teknik Gus Dur tentang ilmu pengetahuan ekonomi kelautan Nusantara, baik itu pengamatan dan pengalaman yang terangkum dalam suatu metode ilmiah, peneliti tesis menggunakan pisau analisisnya Thomas Kuhn yang diistilakan dengan apa yang disebut paradigma dalam revolusi sains.

Tujuan utama Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution itu adalah untuk menantang asumsi yang

[24] Ahmad Suaedy dkk., *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi Abdurrahman Wahid,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 163.

berlaku umum di kalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Kalangan ilmuwan pada umumnya berpendirian bahwa perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi secara komulatif. Pandangan demikian sebagai mitos yang harus dihilangkan. Inti tesis Kuhn bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara komulatif tetapi terjadi secara revolusi.[25]

Alasan utama mengapa saya memilih paradigma Thomas Kuhn, karena paradigma Kuhn relevan untuk mendalami perkembangan sejarah pemikiran revolusi kelautan Gus Dur. Gus Dur mampu meletakkan visi besar dengan melakukan reorientasi pembangunan perekonomian nasional dari perekonomian berbasis daratan menuju perekonomian berbasis kelautan. Transformasi pemikiran ini tentu akan menyangkut adanya suatu perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional serta akselerasi pertumbuhan ekonomi.

F. Kerangka Teori

Untuk mempermudah memahami permasalahan penelitian diperlukan kerangka teori yang relevan. Kerangka ini mencakup tiga konsep teori meliputi teori pembangunan, ekonomi dan kelautan. Dengan teori tersebut dianggap dapat menjadi pisau analisis untuk memahami pemikiran Gus Dur tentang ekonomi kelautan.

[25] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penerjemah Alimandan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 12, h. 3.

1. Pembangunan

Diantara berbagai pengertian pembangunan, menurut pandangan Mandala Harefa pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu seperti yang diungkapkan Gunawan Sumodiningrat,(2009). Di samping itu pembangunan juga merupakan suatu proses yang multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan(Todaro,1997).[26]

Kebijakan pembangunan (*development policy*) dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk menangkap isu-isu yang lebih spesifik dalam rangka merealisasikan tujuan atau sasaran pembangunan. Sementara program pembangunan (*development program*) merupakan rumusan implementasi dari kebijakan pembangunan yang beroperasi lebih spesifik di setiap wilayah. Sebagai misal, isu dominan yang terangkat adalah pembangunan perdesaan. Kebijakan pembangunan yang dapat dirumuskan adalah kebijakan pembangunan pertanian. Sedangkan program pembangunan dapat dirumuskan ke dalam program intensifikasi khusus, program bimbingan masyarakat (Bimas), program transmigrasi dan program spesifik lainnya yang relevan dengan keadaan lokal.[27]

---

[26] Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI, 2015), h. 16.

[27] Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 2012), Cet. II, h. 84.

Pada akhir dasa warsa 1950-an istilah '*pembangunan*' sering dianggap sebagai '*obat*' terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya "*teori pertumbuhan*" menurut Clark (1991:20) "pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pendangan kaum ekonom ortodoks yang melihat '*pembangunan*' sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan."

Sekitar tahun 1980-an, strategi pembangunan mulai bergeser menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Strategi ini pun masih mengalami masalah lainnya, yaitu adanya ketergantuangan negara berkembang kepada negara maju berupa investasi, bantuan luar negeri, dan pinjaman. Kemudian sejak memasuki abad ke-XXI muncul strategi baru, yaitu diterapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan konsep pembangunan manusia (*human development*).

Dengan mengutip Denis Goulet, Suwandi (1997:5) menjelaskan bahwa dalam usaha menuju kehidupan yang baik, sedikitnya ada tiga pokok (*core values*) sebagai konsep pokok dalam memahami pembangunan yaitu: kemandirian hidup (*life sustenance*), harga diri (*self esteem*), kemerdekaan (*freedom*). Melihat konsepsi yang diberikan oleh Suwandi tersebut, jelas bahwa proses pembangunan dititik beratkan pada bagaimana individu-individu yang menjadi objek pembangunan harus mampu mengembangkan sikap mental kemandirian, guna mendukung proses pembangunan yang dijalankan.[28]

[28] Mohammad Mulyadi, "Pembangunan: Analisis Kritis Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Manusia," dalam Sali Susiana, ed., *Pembangunan*

Sehubungan dengan proses pembangunan tersebut, Sumitro Djojohadikusumo mengingatkan pentingnya adanya pembangunan yang berkelanjutan. Paham tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) bersumber pada sebuah laporan yang berjudul *Our Common Future*, disusun di tahun 1987 oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*). Komisi tersebut juga dikenal sebagai Brundtland Commission karena diketuai oleh Nyonya Bo Brundtland, waktu itu Perdana Menteri Norwegia.

Penafsiran tentang pembangunan yang berkelanjutan diartikan sebagai "daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi-generasi mendatang." Dengan kata lain, proses pembangunan harus bisa berlangsung secara terus-menerus dan sambung-menyambung. Hal ini didasarkan atas usaha meningkatkan kemampuan generasi sekarang untuk memenuhi kebutuhannya (terutama kebutuhan dasar bagi golongan miskin dalam masyarakat), tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya pada tahap waktu yang bersangkutan. Dalam haluan pandangan Komisi Brundtland seharusnya tidak ada pertentangan antara tujuan dan sasaran dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua sisi kebijaksanaan yang dimaksud harus direncanakan dan dibina sedemikian rupa sehingga kedua-duanya dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dalam lingkungan hidup yang memadai secara wajar.[29]

Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI, 2015), h. 7.

[29] Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), Cet.1.h.305.

Teori nilai guna (*utility*) apabila dianalisis dari teori maslahah, kepuasan bukan didasarkan atas tingginya pertumbuhan sesaat yang didapat tetapi didasarkan atas baik buruknya sesuatu itu terhadap hasil pembangunan dan dampak lingkungannya. Jika mendatangkan kemafsadatan pada lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِد أُوْلٰى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِع

"*Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat*."

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia dipisahkan ke dalam tiga hal.[30] *Pertama,* perencanaan pembangunan yang didasarkan oleh periode waktu. Berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek atau tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. *Kedua,* perencanaan pembangunan berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi terdiri dari: (a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional, dan (d) perencanaan mikro. *Ketiga,* perencanaan pembangunan berdasarkan prosesnya dibagi menjadi: (1) perencaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*); dan (2) perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*).

[30] Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah*, h. 20.

Pembangunan dalam pelaksanaannya harus menggunakan moral dan cara-cara yang lebih bermanfaat. Pendapat Imam Al-Qarafi dalam kitab Al- Furuq(4/76):[31]

اعلم ان كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها الى الوصية لايحل له

ان يتصرف الا بجلب مصلحة

"Ketahuilah, sesungguhnya setiap pemimpin tidak boleh menetapkan kebijakan kecuali dengan menarik kemaslahatan atau menolak kerusakan."

2. Ekonomi

Konsepsi pemikiran dalam tradisi keilmuan yang berkembang tentang ekonomi menarik untuk dibahas. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel Robins, seperti yang dikutip Muhammad Anwar, menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce with have alternative uses.* Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang

[31] PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar Ke 33 Nahdlatul Ulama,* (Jakarta: LTN-NU, 2016), h. 247.

berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.[32]

Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau iqtishad berasal dari "*qosdun*" yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Kata-kata *al-qashdu* dalam Al-Quran dan Hadis sebagai berikut:

a. Dimaknai sebagai "*sederhana*" dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19: " .... وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ" yang berarti "*dan sederhanakanlah dalam berjalan*." Menurut Tafsir Ibn Katsir (6/342) dan juga al-Qurtuby (14/17) berarti pertengahan, tidak cepat dan juga lambat.

b. Dimaknai juga dengan "*pertengahan*," dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 66: "... مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ...." yang berarti "*di antara mereka terdapat golongan yang pertengahan,*" maka *iqtishad* adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit, dan berlebih-lebihan. Juga dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32: "

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ

لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ

ذٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ

Yang menurut Tafsir al-Qurtuby, muqtashid dimaksudkan juga dengan pertengahan dalam bekerja.

[32] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2.

Ayat lainnya Al-Quran surat Luqman ayat 32 yang juga dipahami oleh beberapa ahli tafsir bahwa hal tersebut berkaitan dengan pertengahan adalah:

وَاِذَاغَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

فَلَمَّانَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّفَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُبِاٰيٰتِنَآاِلَّا كُلُّ

خَتَّارٍكَفُوْرٍ

Kata-kata faminhum muqtashidah dalam ayat ini menurut Tafsir Ibn Katsir (6/353) berarti pertengahan dalam bekerja.

c. Iqtisad juga berarti jalan yang lurus, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُالسَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْشَآءَلَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ

Yang artinya adalah:"*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)*."

d. Dan yang terakhir, iqtisad dalam Al-Quran juga dimaknai dengan "dekat" seperti tertera dalam surat At-Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًاقَرِيْبًاوَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ

عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ

Arti dari ayat ini adalah:" *Kalau kamu seruhkan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.*" Kata safaran *qashidan* diartikan dengan perjalanan dekat dan mudah yang tidak ada kesulitan di dalamnya.

e. Dalam Hadis Rasul, kata-kata '*iqtashada*" dipahami dengan arti hemat "hemat" seperti dalam Hadis :

لا عال من اقصد

Yang berarti "*Tidak akan menjadi fakir orang yang berhemat.*" Kata kerja *qashada* adalah *iqtashada* yang artinya adalah menuju pada keseimbangan, keadilan, kejujuran dan keharmonisan.

f. Dalam Hadis yang lainnya juga disebutkan:

سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا من وشيء الدلجة والقصد

القصد تبلغوا

Atau mempunyai suatu arti, " Jadikan pekerjaanmu itu menjadi lurus dan kuat." Di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang tidak berbelok-belok, dalam artian yang sesungguhnya adalah tidak akan berbelok dari kebenaran. Kemudian *al-qashdu* dipahami dengan kesederhanaan yang berarti tidak akan berbelok melebihi pertengahan dalam segala

hal. Al-qashdu bisa dimaknai pula dengan kesederhanaan dalam kehidupan yang berarti tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir.

Adapun Islam berarti juga damai atau selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam.karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasidari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.[33]

Kemudian penjabaran tentang pengertian ekonomi untuk lebih jelasnya, ikuti pandangan berikut ini. Ibnu Khaldun (1332-1400), misalnya, tokoh yang kemudian dikenal sebagai "ilmuwan sosial muslim klasik" ini menganalisis masalah perekonomian pada dua aras: makro dan mikro. Pada aras makro, konsep dasar pemikirannya berupa tautan lingkaran "sebab-akibat." Dia mengaitkan kontek sosial-ekonomi dengan syariat Islam, kekuasaan politik, peran aktif masyarakat, kekayaan dan potensi sumber daya, serta keadilan. Semua elemen tersebut beririsan dan berada dalam satu lingkaran karena saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Cara kerja lingkaran sebab-akibat itu mirip "rantai reaksi" yang

[33] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6.

berlangsung sepanjang tiga generasi atau rentang waktu sekitar seratus dua puluh tahun yang dibutuhkan bagi terbentuknya sebuah kebudayaan dan peradaban. Dengan konsep pemikiran makro tersebut, politik, budaya, dan agama; pada saat tertentu satu elemen saling mengait dengan elemen lain menentukan maju mundurnya peradaban suatu bangsa. Tautan kuat nilai-nilai agama dengan struktur ekonomi masyarakat dalam konsepsi pemikiran Ibnu Khaldun-seperti Max Weber-merupakan hal kontruktif yang dapat diamati dalam konteks kehidupan individu dan institusional, baik formal maupun informal. Sementara pada aras mikro, Khaldun mengonsepkan tentang perlunya menghidupkan suasana "tolong-menolong" atau "bekerja sama" untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.[34]

Ada titik persamaan cara pandang Ibnu Khaldun dengan analisa Mohtar Mas'oed yang mengutip Charles, tidak bisa dipisahkan antara ekonomi dan kekuasaan karena fenomena ini diikat dengan hubungan yang saling mempengaruhi. Menurut Charles Kindleberger, ekonomi dan politik adalah dua metode yang berbeda untuk mengalokasikan sumberdaya langka; ekonomi melalui mekanisme pasar, sedang politik melalui mekanisme anggaran belanja negara. Namun di negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia, keduanya sangat dipengaruhi oleh prilaku negara.

Untuk memahami proses penciptaan dan redistribusi kekayaan dan kekuasaan itu, analisa ekonomi-politik menekankan asumsi bahwa, karena kelangkaan sumberdaya, tidak ada kebijaksanaan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Pasti ada pihak yang diuntungkan dan

[34] M. Luthfi Malik, "*Etos Kerja, Pasar, dan Masjid: Transformasi Social-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*," (Jakarta: LP3ES, 2013), h. 42.

yang dirugikan oleh suatu kebijaksanaan pemerintah. Konflik kepentingan klasik dalam ekonomi-politik adalah antara kebijaksanaan yang menekankan efisiensi (misalnya, demi percepatan pertumbuhan ekonomi) dan yang menekankan pemerataan (misalnya, demi perubahan tertib sosial-ekonomi sehingga penghuni lapisan bawah bisa memperbaiki nasibnya). Proses pemilihan alternatif inilah yang sangat penting untuk diperhatikan. Analisa baku dalam ekonomi-politik mengharuskan kita untuk mempertimbangkan variable-variabel nilai (*value*), kepentingan (*interest*) dan kekuasaan.[35]

Analisa relung ekologis ekonomi kelautan ini akan semakin tajam sebagaimana pengamatan James C Scoot dalam penelitiannya tentang pergolakan dan subsistensi di Asia Tengara yang kita kenal "Moral Ekonomi Petani." James memandang pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Secara luas pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik.

Dalam arti tertentu prakteknya, Budiono memandang teori ekonomi mengatakan bahwa perdagangan mendorong spesialisasi, kemudian spesialisasi mendorong efesiensi produksi dan selanjutnya efesiensi produksi menciptakan manfaat ekstra yang dapat dinikmati oleh mereka yang ikut dalam kegiatan perdagangan. Apabila masing-masing ekonomi lokal mengkhususkan diri pada produk yang paling cocok dengan iklim, ketrampilan penduduk dan sumber alamnya,

---

[35] Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Cet.1. h. xvii.

ekonomi tersebut akan memperoleh tambahan manfaat atau nilai tambah yang sebelumnya tidak ada. Manfaat ekstra itu disebut manfaat perdagangan atau *gains from trade*. Manfaat ini bisa dipastikan tercipta di kawasan Nusantara pada waktu itu dan menjadi perangsang utama perputaran roda perekonomian di sana.[36]

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan alat komunikasi, mengakibatkan adanya globalisasi ekonomi, situasi ekonomi dunia antara negara-negara maju dan berkembang telah ikut berubah dengan drastis, dimana jurang pemisah antara wilayah yang satu dengan lainnya semakin dapat dipersempit. Deregulasi-deregulasi yang terus menerus dilakukan disesuaikan dengan sistem ekonomi dunia yang ada pada saat ini. Dengan derasnya arus globalisasi masuk ke masing-masing negara berkembang memaksa pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan di negara berkembang harus menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi dunia pada saat ini.[37]

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradah-Nya.

Dalam asas ini, tertancap landasan aqidah pada diri kaum muslimin bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik semua yang ada di langit dan di bumi. Terkait dengan nilai ini, manusia adalah pemegang amanat Allah SWT. Karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Sementara itu, manusia sebagai khalifah Allah tidak memiliki apapun. Dia

---

[36] Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah,* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2016), h. 34.

[37] Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). h. 63.

hanya mengurus serta memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan kehidupannya di muka bumi.[38]

3. Kelautan

Kelautan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dasarnya laut yang berarti kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau, kemudian kelautan sendiri berasal dari kata dasar laut mendapat imbuhan "ke" dan "an" yang diartikan sebagai perihal yang berhubungan dengan laut.[39]

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki sektor maritim yang luas yang dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dari sector maritim antara lain menyumbangkan: 1) integrasi ekonomi dari kepulauan, dengan pergerakan komoditas yang diperdagangkan dan tenaga kerja yang bebas hambatan antara pulau-pulau; dan 2) integrasi sosial dan politik dari bangsa dengan pergerakan warga negara yang bebas hambatan diantara pulau-pulau untuk berbagai tujuan.

Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu "*laut utama*" atau *heart of sea* tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai *sea sistem* yaitu laut Jawa, laut Flores dan laut Banda. Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Bahkan Houben menyatakan bahwa laut Jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi

[38] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.17.

[39] KBBI, arti kata laut menurut KBBI, diakses pada 11 Februari dari http://kbbi.co.id/arti-kata/laut, jam 15.00 WIB.

Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi kawasan Asia Tenggara.[40]

Tak mengherankan, bila kata "*bahari*" dalam kosa kata melayu, bermakna dasar "dahulu kala." Sebuah penandaan tegas tentang kelautan sebagai identitas asli kita. Sehingga bisa jadi benar pendapat beberapa pengamat: kata Indonesia-yang berakar dari kata "Indos" (Indus/India) dan "*nesos*" (nusa/pulau) sangatlah berorientasi daratan. Kata "*nuswantara*" "*tanah air*" atau "*dwipantara*" dirasa jauh lebih cocok menggambarkan realitas historis dan geografis bangsa ini.[41]

Lebih dari itu, letak geografis yang sangat strategis karena berada dikawasan lautan India dan Pasifik dimana dalam dasawarsa terakhir ini negara-negara dikedua kawasan lautan itu semakin memegang peranan penting dalam kancah perekonomian dan politik global. Maka Indonesia memiliki peluang kunci sebagai penyeimbang pembangunan ekonomi di kedua lautan tersebut. Di lautan India terdapat 47 negara yang sangat bervariasi baik itu dalam hal kebudayaan, jumlah penduduk, kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Negara yang paling besar jumlah penduduknya adalah India, lebih dari 1 milyar dan yang paling kecil adalah Seycheles 80 ribu. Adapun dalam hal ekonomi tenggang produk domistik bruto mulai dari US$ 250 milyar, misalnya India dan Australia hingga kurang dari US$ 400 juta misalnya Maldives dan Commoros.[42]

Sehubungan dengan pembangunan perekonomian kelautan Ikhwan Siregar, potensi sumber daya kelautan dapat dibagi ke dalam empat kategori. *Pertama,* sumber daya laut pulih/terbarukan (ikan dan biota lainnya, terumbu karang,

---

[40] Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), h. 89.

[41] Radhar Panca Dahana, *Agama Dalam Kearifan Bahari*, h. 96.

[42] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi,* h.viii.

hutan mangrove, pulau-pulau kecil). *Kedua,* sumber daya tidak dapat pulih/tidak terbarukan (minyak dan gas, bahan tambang dan mineral). *Ketiga,* energi kelautan (gelombang, pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion, angin). *Keempat,* jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah).[43]

Minapolitan adalah istilah baru dalam konsep kebijakan pembangunan nasional yang mengacu kepada pembangunan wilayah yang berbasis kepada aktifitas ekonomi perikanan dan kelautan beserta jasa-jasa penunjangnya. Perhatian kepada minapolitan tidak dapat dilepaskan dengan konsep pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang lebih dahulu diperkenalkan.[44]

Prof. Mochtar Kusumaatmadja (2003) menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu: Pertama, negara-negara tetangga yakni anggota-anggota ASEAN dan negara-negara tetangga lainnya termasuk Australia. Kedua negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, seperti Jepang yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia sejak sebelum perang. Ketiga, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu-lintas pelayaran laut. Dalam golongan ini termasuk negara-negara Eropa Barat yang memiliki armada niaga besar dan maju. Keempat, negara maritim besar yang mempunyai kepentingan terhadap strategi militer, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet.[45]

---

[43] Yusni Ikhwan Siregar, *Menggali Sumber daya Laut Indonesia*, Makalah dalam Forum Rektor di USU Medan, 5-6 Maret 2015.

[44] Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah*, h. 277.

[45] Mustafa Abubakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006). h. 23.

Untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berpihak kepada rakyat, membuka kesempatan kerja dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan konsep" *Revolusi Biru*." Secara umum pengertian Revolusi Biru adalah perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan. Konsep Revolusi Biru dilandasi asumsi-asumsi dasar pembangunan dengan merubah kerangka pemikiran kontinen menjadi kepulauan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih berimbang.[46]

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[47]

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan "*deskriptif analisis*." Dalam rangka memahami pengertian deskriptif analisis, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami metode deskriptif. Definisi metode deskriptif adalah metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterprestasikan hal yang ditulis dengan

[46] Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah*, h. 284.

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* h. 2.

pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan.[48]

Menurut beberapa ahli, metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai berikut:

a. Whitney (1960).

Metode deskriptif analisis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interprestasi yang tepat. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

b. Soegiyono (2009).

Metode diskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian konsep atau pemikiran, dengan menggunakan *deskriptif analisis* yang fokus kajian utama penelitian teori dan konsep pemikiran KH. Abdurrahman Wahid "*Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan"* dengan analisis pendapat para ulama, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dengan kajian tersebut untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sehingga paparan hasil penelitian yang disajikan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat.

---

[48] Bimbingan, Pengertian Pendekatan Diskriptif Analitis, diakses pada tanggal 21 Juli 2017 dari http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm. jam 15.00 WIB.

2. Sumber Data

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan.[49]

Dalam pengertian lain, data adalah semua keterangan yang berasal dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dengan demikian, data adalah semua informasi baik berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, atapun peristiwa / gejala yang ada, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.[50]

Untuk sumber data primer dalam penelitian ini, akan diperoleh dari perpustakaan Pojok Gus Dur, the Wahid Institute, dokumen-dokumen Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, perpustakaan PBNU, perpustakaan FPKB, perpustakaan museum TNI Satria Mandala dan perpustakaan DPR-RI. Sedangkan data-data sekunder berusaha untuk mendapatkan di perpustakaan STAINU dan Perpustakaan Nasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[51]

---

[49] Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 339.

[50] Mastuki. HS. Dan Hamdani, *Pedoman Penulisan Tesis,* (Jakarta: Pustaka STAINU Jakarta, 2016), h. 18.

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 224.

a) Studi Pustaka (Dokumentasi)

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dari bermacam-macam bahan yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis, historis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.[52]

Dalam studi pustaka ini, penulis akan mengkumpulkan dokumen berupa teks-teks tertulis dari sumber primer maupun sekunder. Selain itu penulis juga akan melakukan penelusuran dokumen ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di mana Gus Dur berafiliasi.

b) Wawancara (*Interview*)

Dalam pengumpulan data saat langkah ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam secara *purposive* dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang ekonomi kelautan. Peneliti langsung akan melakukan dialog tanya jawab terstruktur dengan Kapoksi Komisi IV FPKB DPR RI yang membidangi kelautan, Kapoksi Komisi I FPKB DPR RI yang membidangi pertahanan negara tokoh-tokoh yang pernah berhubungan langsung dengan perekonomian kelautan yang dilakukan oleh Gus Dur. Baru kemudian peneliti akan mengidentifikasi tindak lanjut dari hasil wawancara yang di dapat tersebut sehingga akan didapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap.

[52] Mastuki. HS. dan Hamdani, *Pedoman Penulisan Tesis,* h. 20.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data-data yang didapat. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data seluruhnya itu tersedia, data tersebut banyak sekali mungkin kira-kira dapat segudang tentang *"Ekonomi Kelautan."* Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah langkah selanjutnya perlu dicatat dan diteliti secara rinci melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Setelah data tersebut direduksi baru langkah selanjutnya melakukan penyajian data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat tentang *"Ekonomi* Kelautan*,"* berupa teks naratif yang mudah dipahami. Setelah terbentuk naratif, baru langkah selanjutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah ini akan menjawab pada rumusan masalah yang memang dirumuskan sejak awal. Temuan akan berupa deskripsi atau gambaran obyek *"Ekonomi Kelautan,"* yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas.

H. Teknik Dan Sistematika Penulisan

Teknik penulisan tesis adalah cara dan prosedur penulisan yang digunakan peneliti untuk menuliskan tesisnya. Dalam konteks ini, teknik penulisan tesis merujuk pada buku "*Pedoman*

Penulisan Tesis" yang diterbitkan Pascasarjana STAINU Jakarta.[53]

Adapun sistematika penulisan "*Studi Pemikiran Gus Dur Tentang Perekonomian Kelautan*" pada bab satu, sejarah kejayaan bumi Nusantara yang bergantung kepada niaga laut, dalam perkembangan terbarunya Presiden Joko Widodo menyatakan akan merealisasikan ideologi Trisaktinya. Karena itu, untuk mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan diperlukan suatu konsep "*Poros Maritim Dunia*" akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, bangsa yang kuat dan jaya.

Bab dua, membahas tentang model-model ekonomi Nusantara. Model yang bersangkutan merupakan percontohan yang menyajikan penyederhanaan dari suatu realitas perekonomian yang sangat majemuk. Berbagai rupa model tentang jalannya proses perekonomian dapat dianggap bahan bangunan (*building blocks*) dalam kerangka suatu teori mengenai suatu pertumbuhan ekonomi Nusantara. Pada bab ini juga akan diuraikan tentang akar teoritik ekonomi moral Nusantara, bahwa pembangunan ekonomi bukanlah suatu masalah ekonomi semata-mata, Pembangunan ekonomi merupakan penjelmaan dari suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang dibimbing dengan kesadaran.

Bab tiga yang merupakan bab yang paling pokok, membahas biografi dan genealogi keilmuan Gus Dur, akan diuraikan secara panjang lebar latar belakang pendidikan dan ulama-ulama yang akan membentuk karakteristik keilmuan Gus Dur. Selanjutnya akan diuraikan pokok-pokok pemikiran kosmopolitan Gus Dur untuk melakukan reorientasi pembangunan perekonomian nasionalnya dari perekonomian berbasis daratan menjadi perekonomian berbasis kelautan.

---

[53] Mastuki. HS. Dan Hamdani, *Pedoman Penulisan Tesis,* h. 27.

Bab empat, membahas tentang reformulasi pemikiran ekonomi kelautan Gus Dur sebagai suatu konsep teori ekonomi dalam memajukan sistem perekonomian rakyat secara kekinian. Kemudian untuk menciptakan kawasan negara yang aman, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, penting sekali untuk memodernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dan bab lima, bab terakhir, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan saran, diharapkan dari hasil penelitian ini akan ada gambaran lebih jelas "Studi Pemikiran Gus Dur Tentang *Perekonomian Kelautan*" sehingga penelitian ini bermanfaat dapat memberikan masukan-masukan dalam rangka pengembangan teori dan konsep maritim Nusantara serta berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
MODEL-MODEL EKONOMI NUSANTARA: AKAR TEORITIK EKONOMI NUSANTARA

A. Model-Model Ekonomi Nusantara

Model dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) daripada sesuatu yg akan dibuat atau dihasilkan.[54] Sepanjang masa pemikiran ekonomi berkisar pada pengamatan dan kajian hubungan timbal-balik antara beberapa fenomena ekonomi dan interaksinya di antara satu dengan yang lainnya. Menurut hemat penulis pemisahan antara teori dan model sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan secara prinsipal. Suatu teori yang mengandung berbagai konsep pengertian tentang masalah-masalah ekonomi bisa saja disusun dalam bentuk model. Model yang bersangkutan merupakan percontohan yang menyajikan penyederhanaan dari suatu realitas perekonomian yang sangat majemuk. Berbagai rupa model tentang jalannya proses perekonomian dapat dianggap bahan bangunan (*building blocks*) dalam kerangka suatu teori mengenai suatu pertumbuhan ekonomi.

Relevansi suatu model mengenai model pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan maksud dan sasaran dalam

[54] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 941.

penyusunan model. Pada dasarnya suatu model tentang pertumbuhan sebenarnya sama sifatnya dengan maksud dan sasaran suatu teori ekonomi. Pola pendekatannya dan metodologinya mengandung teknik pemikiran yang dapat membantu kita untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tepat. Model ekonomi mengandung sifat abstraksi dengan menyederhahakan gambaran tentang realitas ekonomi masyarakat. Hal itu bermanfaat karena memungkinkan penyaringan dalam benak pemikiran kita tentang hubungan timbal-balik dan interaksi di antara variable-variabel yang sedang dipelajari. Dalam bentuk yang elementer suatu model ekonomi termasuk model tentang pertumbuhan ekonomi merupakan pencerminan secara pokok dan sederhana dari fenomena-fenomena ekonomi yang dianggap penting dalam suatu keadaan tententu di dunia ekonomi riel.[55]

Sejarah Nusantara sebagai bangsa berbudaya memang lebih tua dari kebanyakan bangsa di Barat atau Timur yang kini termasuk bangsa modern. Namun, pengalaman sebagai bangsa modern masih relatif singkat. Adapun ukuran modern memang tidak terlalu mudah diberikan kriterianya. Orang bisa bertanya apakah kita sebagai bangsa ingin modern atau ingin maju. Apakah kita harus melaksanakan berbagai program moderenisasi untuk menjadi bangsa yang maju, atau kita harus membangun dan memajukan macam-macam bidang kehidupan agar kita bisa mencapai tingkat kemajuan yang bisa disebut modern.

Nampaknya, bagaimanapun setiap bangsa mempunyai ukuran-ukurannya sendiri yang menjadi pedoman pelaksanaan langkah-langkah pembangunannya, meskipun ukuran-ukuran

---

[55] Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan,* (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 10.

itu kadang-kadang masih bisa berubah karena terus-menerus memerlukan penyerpurnaan. Hasil penelitian-penelitian sejarah, masa lampau bumi Nusantara yang merupakan kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa dan berkembang jauh lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Kerajaan-kerajaan dengan kepulauan yang kaya akan rempah-rempah justru menjadi sasaran pelayaran dari Barat (Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda dan lain-lain). Dan melaui ekspansi Barat ke Asia, maka terjadilah *imperialisme* Barat serta menyatunya dunia. Dengan kata lain, kedududukan Nusantara tidak kecil dalam percaturan peradaban dunia.

Akhirnya pada tahun 1949 dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) konflik dengan Belanda dapat diakhiri, selanjutnya pada tahun 1950 Indonesia memperoleh pengakuan resmi di dunia Internasional sebagai negara berdaulat. Kita misalnya telah sepakat bahwa pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan manusia yang utuh dan pembangunan seluruh rakyat biasanya diartikan bahwa bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang materiil dan spiritual. Dan pembangunan seluruh rakyat diartikan pembangunan merata atau pembangunan yang adil.[56]

Setelah membentangkan sekilas tentang sejarah ekonomi Nusantara, penulis tesis membagi model ekonomi Nusantara menjadi lima model, adapun kelima model ekonomi tersebut sebagai berikut:

[56] Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 3.

1. Ekonomi Perniagaan Dunia

Dari peninggalan-peninggalan prasasti dan penelitian arkeologis, pada pertengahan abad ke-7 berdiri kerajaan maritim Sriwijaya yang kuat dan besar di Sumatera. Sriwijaya berperan penting dalam perdagangan Asia pada zaman pertengahan, selama lebih dari 500 tahun. Kemudian setelah sejarahnya dihidupkan kembali oleh para sejarawan modern, kerajaan ini menjadi terkenal dalam sejarah Indonesia, terutama di kalangan orang Indonesia. Mereka membanggakan sebagai kekuatan laut besar dan kerajaan tertua dalam sejarah kebangsaan mereka.

Hal yang menarik tentang Kerajaan Sriwijaya adalah kemunculan dan perkembangannya yang tiba-tiba. Pedagang Cina, I Tsing merupakan orang pertama yang membuat catatan tentang kerajaan ini. Ia menceritakan pelayarannya pada 671 M dari Kanton ke Palembang tempat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya waktu itu. Dalam jangka waktu 24 tahun ketika I Tsing berada di seberang laut, kerajaan itu sudah menjadi sangat kuat. Berdasarkan pengetahuannya tentang Indonesia yang diperolehnya sebelum kembali ke Cina pada 695 M, menurutnya Kedah di pantai Barat Semenanjung Melayu selatan telah menjadi tanah jajahan Sriwijaya. Pada 775 M, kerajaan ini telah menjadi begitu terkenal sehingga penguasanya disebut "*raja yang dipertuan dari Sriwijaa, raja tertinggi di antara semua raja di muka bumi*."[57]

Penelitian arkeologis mutakhir telah memungkinkan proto sejarah Asia Tenggara kepulauan bagian barat ditulis kembali mengikuti garis besar yang sama. Penaksiran kembali atas temuan-temuan terdahulu dan penelitian arkeologis mutakhir di

[57] O.W. Wolters, *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII*, Penerjemah Edy Sembodo, (Depok: Komunitas Bambu, 2011), h. 1.

situs-situs awal sepanjang rute-rute perdagangan utama Asia Tenggara maritim membenarkan bahwa negara-negara awal di Thailand Selatan, di pantai barat Semenanjung Melayu, pantai timur Sumatera Selatan, dan pantai utara Jawa dan Bali, telah membina jalinan dagang dengan India maupun Vietnam sejak beberapa abad terakhir sebelum Masehi. Sebagaimana yang dicatat di atas, sejumlah politi pesisir di Semanjung Melayu tampaknya berkembang karena menguasai hubungan dengan penduduk-penduduk hulu yang bergiat dalam pertambangan emas, dan karena menguasai secara langsung pertambangan timah dan ekspor kedua jenis logam ini ke Samudra Hindia. Dengan demikian, jaringan perdagangan awal ini yang sebagian melibatkan pola-pola pertukaran jarak jauh jelas telah terbentuk di Asia Tenggara sebelum pengaruh India secara berarti mengubah ruang agama dan proses pembentukan negara, paling awal pada sekitar abad III.[58]

Sementara itu di bumi Jawa, dengan mulai melemahnya kerajaan Singasari, berdirilah kerajaan Majapahit dengan pendirinya Raden Wijaya. Benih-benih kejayaan kerajaan Majapahit mulai tampak ketika pemerintahan dipegang oleh Tribhuwana Tunggadewi. Komandan pasukan Bhayangkari sekaligus patih kerajaan Daha, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubhumi. Pada masa Pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi wilayah Majapahit yang awalnya hanya meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian meluas hingga ke daerah Sumatera. Para sejarawan juga banyak yang mengatakan bahwa, era Tribhuwana Tunggadewi adalah masa perluasan wilayah Majapahit ke pelbagai penjuru. Perluasan wilayah ini adalah wujud kongkrit dari "*Sumpah Palapa*" yang diikrarkan

[58] Pierre Yves Manguin, Sifat Amorf Politi-Politi Pesisir Asia Tenggara Kepulauan, dalam Wing Karjo dan Joke Moeljono, *Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), Cet.II, h.340.

Patih Gajah Mada. Dari pernikahan Tribhuwana Tunggadewi dengan Kertawardhana lahir seorang anak laki-laki bernama Rajasanagara (*Hayam Wuruk*) yang kelak menjadi raja paling bersinar di Majapahit.

Jalan lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang paling utama di Kerajaan Majapahit adalah sungai-sungai besar seperti bengawan Solo, kali Brantas dan lainnya. Sungai-sungai tersebut menghubungkan kota-kota dan tempat-tempat perdagangan yang terletak di sepanjang perairan tersebut, baik yang ada di daerah pedalaman maupun yang ada di daerah dekat pantai. Beberapa prasasti yang berasal dari zaman Majapahit, bahkan yang berasal dari zaman sebelumnya, telah menunjukkan kepada kita bahwa lalu lintas melalui sungai ini telah menduduki tempat yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Daerah-daerah di sepanjang perairan sungai-sungai dan muara-muara sungai dekat pantai, desa-desa bermunculan dan berkembang menjadi kota-kota pusat kegiatan perdagangan, pelayaran dan penyebrangan (*ferry*) antar daerah. Kota-kota semacam ini sebenarnya telah ada pada zaman raja Airlangga dan bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya. Dari prasasti Kamalagyan (OJO LXI) yang berangka tahun Saka 959 (1037 Masehi), disebutkan bahwa sebuah kota pelabuhan dan perdagangan yang terpenting pada waktu itu yang terletak di tepi sungai ialah Hujungaluh.[59]

Seiring dengan semakin sirnanya pamor Majapahit, kota-kota besar di daerah pesisir dikuasai oleh para pedagang muslim. Di mana para saudagar muslim tersebut selanjutnya membuka bandar-bandar dagang baru yang dapat menyaingi bandar dagang Majapahit. Bintoro atau Demak (*Glagah Wangi*)

[59] Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan masalahnya,* (Depok: Komunitas Bambu, 2012), Cet. II, h. 79.

merupakan suatu daerah pesisir yang menjadi pesaing berat bandar dagang Majapahit. Dalam perkembangan selanjutnya, Demak yang mendapatkan bantuan dari daerah-daerah pesisir seperti Jepara, Surabaya, Kudus dan Banten secara terang-terangan memisahkan diri dari Majapahit. Demak kemudian menjadi kerajaan yang berdiri sendiri dan bercorak Islam (1478 M). Raja pertamanya adalah Raden Patah yang bergelar *Sultan Sri Alam Akbar*. Tradisi Majapahit yang berorientasi niaga laut, diteruskan oleh Kesultanan Demak. Kekuatan alami berupa laut ditansformasi menjadi kekuasaan sangat besar kepada kota-kota pelabuhan itu. Keadaan seperti itulah yang menunjukkan kekuatan Demak sebagai kesultanan yang bergantung kepada niaga laut.

Secara keseluruhan, wilayah Nusantara menunjukkan sebagai daerah yang menarik minat perniagaan dunia, ikan Nusantara termasuk ikan terbaik di dunia, rempah-rempahnya bahkan aneka ragam tanam-tanaman di sepanjang kepulauan mengagumkan pengunjung-pengunjung asing. Nusantara merupakan kawasan subur, tanaman pangan dan tanaman buah-buahan silih berganti sepanjang tahun.

Pedagang-pedagang Nusantara membawa kapas dan bahan pangan pokok (beras, garam, ikan kering, biji-bijian) dari Jawa diangkut ke pelabuhan-pelabuhan di Sunda dan Sumatera Timur serta Sumatera Barat untuk ditukar dengan lada; Pedagang Cina dan India membawa produk-produk seperti sutra, kain katun, porselen ke Jawa dan selanjutnya dibawa bersama beras ke Maluku ditukar dengan cengkeh dan pala; rempah-rempah dan beras dikirim ke Malaka dan sebagian ditukar oleh pedagang Cina dan Indonesia dengan porselen, sutra, logam mulia, atau uang tembaga. Selain spesialisasi produksi, pertukaran atau perdagangan juga mendorong timbulnya satu proses penting lagi, yaitu *monetisasi* penggunaan

uang sebagai alat tukar. Perdagangan dan monetisasi berkembang seiring dan saling memperkuat tumbuhnya perdagangan mendorong tumbuhnya monetisasi, pada giliran monetisasi memperlancar dan memperluas kegiatan perdagangan, dan selanjutnya perluasan perdagangan menuntut kebutuhan alat tukar yang lebih baik.[60]

Sistem tukar-menukar (*barter*) ini kita juga mengenal saat masa awal pemerintahan Islam, sebagaimana dalam sebuah hadis:

عَنْ اَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاتَبِيْعُواالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالفِضَّةِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍوَبِيْعُواالذَّهَبَ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ[61]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah r.a.;Rasulullah Saw. pernah bersabda, *" Jangan jual emas dengan emas kecuali dengan (berat) timbangan yang sama, demikian pula perak dengan perak kecuali dengan timbangan yang sama, tetapi kamu dapat menjual emas dengan perak atau perak dengan emas sebagaimana yang kamu kehendaki."*

2. Ekonomi Monopoli, Eksploitasi dan Liberalisme

Pada tahun 1498 M untuk pertama kalinya bangsa Portugis menginjakkan kakinya di benua Asia. Kapal Portugis dibawah pimpinan Vasco De Gama merapat di Calicut (Kalikut), India. Tujuan kedatangan mereka adalah mencari sumber rempah-

---

[60] Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), Cet. III, h. 29.

[61] Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* Penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), Cet.II,h. 461.

rempah yang mencakup pala, lada dan cengkeh. Orang-orang Eropa sangat membutuhkan untuk bumbu makanan, obat-obatan, campuran pada penghangat minuman dan lain sebagainya.

Sejak Vasco De Gama merintis jalan bagi pelayaran kapal Portugis di Asia, maka berdatanganlah kapal-kapal Portugis ke perairan Asia. Berawal dari perdagangan, kemudian berubah menjadi kolonialisme, kapitalisme dan imperialisme. Mereka membeli rempah-rempah dengan harga yang murah untuk dijual ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Kaum saudagar Katolik Portugis mendapat keuntungan besar dan menjadi kaya-raya.[62]

Setelah mengetahui laporan pada pedagang di Asia Tenggara bahwa Kerajaan Islam Malaka menjadi pusat perdagangan internasional dan sangat kaya-raya, maka raja Portugis mengutus Diago Lopes de Sequeira untuk menemukan Malaka. Setelah menemukan Malaka pada tahun 1509 dan menetap sebagai wakil perdagangan Portugis di sana, Diogo Lopes Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Akan tetapi pada tahun 1510 M Portugis mengusai kerajaan Goa di India. Komunitas Islam internasional meyakinkan Sultan Mahmud Syah bahwa Portugis adalah ancaman besar sebagaimana yang terjadi di Goa.

Pada tahun 1511 M Diago Lopes de Sequeira memimpin pasukan Portugis dengan 4 kapal dengan disertai perlengkapan senjata sampai di perairan Selat Kerajaan Islam Malaka. Akhirnya Sultan Mahmud Syah berbalik arah melawan Portugis akibat serangan kaum Katolik terhadap Goa di India. Sultan Mahmud Syah menawan beberapa orang Portugis dan membunuh sebagian lainnya. Sejumlah 4 kapal Portugis

[62] Rachmad Abdullah, *Kerajaan Islam Demak: Api Revolusi Islam di Tanah Jawa (1518-1549),* (Solo: Al-Wafi, 2015), h. 34.

diserang, namun Diago Lopes de Sequeira berhasil lolos. Pada April 1511 M Albuquerque berangkat dari Goa membawa 17 atau 18 kapal perang dengan 1.200 pasukan Katolik bersenjata.[63] Dari sudut pandang politik dan militer, orang Portugis berupaya menggunakan kekuatan angkatan laut untuk menguasai Samudera Hindia dengan menduduki sejumlah titik strategis. Titik yang dimaksud adalah tempat yang telah dibentengi dapat dipertahankan dengan mudah menggunakan *man of war* (kapal layar abad ke-16 hingga ke-19 bersenjatakan kanon dalam jumlah besar) bersenjata. Ide besar ini disusun oleh Albuquerque. Aspirasi politik dan militernya sesuai dengan tujuan ekonomi, yakni untuk mengalihkan aliran barang dagang, terutama rempah-rempah yang berharga dari Asia ke Portugal melalui Tanjung Harapan. Dengan demikian, hal tersebut memutus hubungan dengan para pedagang dari Asia dan Mediterania.

Dengan demikian, terlihat bahwa Albuquerque mempunyai pandangan yang visioner. Ia merupakan orang pertama yang melihat peluang besar dari penguasa Samudera Hindia. "Orang pertama dalam sejarah yang mengembangkan sistem perdagangan terorganisasi dalam cakupan samudera dan tiba pada pemahaman tentang prinsip-prinsip pertahanannya yang benar sebagai cabang khusus dari ilmu pengetahuan angkatan laut dengan aturannya sendiri.[64]

Bagi orang Eropa bagian utara yang merasa iri dan ingin mendapatkan bagian dalam penyediaan rempah-rempah, bukan rahasia lagi bahwa akhir abad ke-16 kekuatan Portugal di pemukiman-pemukiman Asia sudah menurun. Sebuah panduan

---

[63] Rachmad Abdullah, *Kerajaan Islam Demak: Api Revolusi Islam di Tanah Jawa (1518-1549),* h.36.

[64] Melink Roelofsz, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500-1630,* penerjemah Tim Komunitas Bambu, (Depok: Komunitas Bambu, 2016), h. 116.

yang sangat berharga diberikan oleh orang Belanda oleh Jan Huygen van Linschoten dalam Itinerario. Dia menunjukkan titik-titik lemah sistem portugis kepada rekan-rekan senegaranya. Dia juga memperlihatkan pada mereka di mana mereka dapat memiliki kesempatan besar menghadapi orang Spanyol dan Portugis. Tempat itu adalah kepulauan Indonesia. Tempat yang menjadi wilayah produksi rempah-rempah yang sangat diminati.

Pada tahun 1597, armada ekspedisi pertama yang dikirim oleh Belanda ke Hindia Timur berlayar di sekitar wilayah Indonesia selama delapan bulan tanpa bertemu satu pun kapal Portugis. Namun, saat itu orang Belanda belum datang untuk menguasai. Jika mereka benar bertemu dengan musuh, mereka hanya akan melakukan tindakan defensif. Mereka menghindari benteng-benteng Portugis di Malaka, Maluku dan Solor. Mereka akan berupaya mendapatkan kargo yang sangat diinginkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa. Satu-satunya alasan bagi pengiriman berbagai armada yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan dagang dalam waktu singkat adalah melakukan perdagangan yang menguntungkan. Namun, kemudian terjadi persaingan ketat dan menghambat semua inisiatif melawan musuh bersama.[65]

Sekelompok pemodal Belanda membentuk kongsi dagang Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di Nusantara dengan nama *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Kapal VOC untuk pertama kali datang dan mendarat di Banten pada tahun 1596 untuk membeli barang dagangan seperti rempah-rempah untuk dibawa dan dijual di Eropa. Namun, segera setelah itu, mereka tidak sekedar berdagang, tetapi berniat menguasai sumber-sumber produksi secara langsung atau tidak

[65] Melink Roelofsz, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500-1630,* penerjemah Tim Komunitas Bambu, h. 171.

langsung. Mereka melakukan dengan cara "*diplomasi*" (termasuk adu domba penguasa lokal) dan, apabila tidak bisa, menggunakan kekuatan militer. Itulah yang mereka lakukan secara bertahap tetapi dengan sistematis selama dua abad sejak mereka menginjakkan kaki di Nusantara.

Strategi mereka berhasil. Produksi pala di Banda dikuasai VOC dan dikelola sebagai perkebunan (1621), produksi dan perdagangan cengkeh di Ambon dimonopoli (1656), dan kemudian para penguasa di pantai utara Jawa ditundukkan dan diwajibkan menyetor hasil buminya kepada VOC. Bagi daerah-daerah yang belum bisa ditundukkan, dilakukan "*kerja sama*" dengan penguasa setempat, seperti membuka perkebunan kopi di Priangan, yang ternyata merupakan "*model bisnis*" yang menguntungkan dan tahan hidup lebih dari dua abad.[66]

Sistem Tanam Paksa diterapkan mulai 1830 dan berakhir pada 1870, sistem tersebut menghapuskan para petani pribumi menyerahkan sebagian tanah dan tenaga kerja mereka demi keuntungan penanaman tanaman perdagangan (yaitu gula, kopi, dan indigo). Petani-petani menerima gaji crop (*crop wages*), namun tetap dikenai pembayaran sewa tanah yang telah diperlakukan oleh Raffles pada 1813-1814. Bupati-bupati desa pribumi bertanggung jawab atas pengiriman crops kepada pejabat-pejabat kolonial, dan sebagai imbalannya mereka menerima bagian dari pendapatan (*revenues*). Sebagaimana ditunjukkan oleh Fasseur, sistem tersebut semakin lama semakin menguntungkan. Pendapatan tahunan selama 1850-an dan 1860-an rata-rata 24 juta gulden, dibandingkan dengan kurang lebih 11 juta gulden pada 1830-an dan 1840-an. Pada 1860, keuntungan-keuntungan dari Jawa mencakup sepertiga dari pendapatan total pemerintah Belanda. Dapat dikatakan bahwa sistem Tanam Paksa dihapuskan bukan karena keadaan-

[66] Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, h. 32.

keadaan pada koloni yang kurang menguntungkan, tetapi karena iklim politik yang berubah di negara induk.

Sistem Tanam Paksa sering dianggap telah mengubah perkembangan ekonomi Jawa abad ke-19 secara drastis. Pada kenyataannya, seluruh pulau diubah menjadi suatu perkebunan besar yang dikelola pemerintah Belanda, dan bersifat komersial, di samping menghambat dan mengganggu pertanian penduduk pribumi.[67]

Pemerintahan zaman VOC adalah contoh sistem yang murni bersifat *ekstraktif*, yaitu menggunakan seluruh kemampuan bisnis dan kewenangan publik yang ada ditangannya untuk menyedot surplus ekonomi semaksimal mungkin dari kawasan yang dikuasainya. Sama sekali tidak ada pertimbangan mengenai apa nasib mereka yang hidup disana. Dalam sistem ini, tidak ada perbedaan antara kewenangan korporasi dan kewenangan publik, antara kepentingan bisnis dan kepentingan umum, antara kepentingan pengusaha dan penguasa. Semuanya menyatu dan digunakan untuk mencapai satu tujuan, yaitu menyedot surplus ekonomi secara maksimal dari daerah itu.[68]

3. Ekonomi Berdikari

Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Di tanah air, peristiwa ini membuka peluang sejarah yang langka bagi bangsa Indonesia. Pada masa kekosongan kekuasaan terjadi, para pejuang bangsa Indonesia dengan cerdas menangkap peluang emas uantuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkannya Deklarasi Kemerdekaan Indonesia

---

[67] J Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia,* Penerjemah M Arief Rohman dan Bambang Purwanto, (Jakarta: LP3ES, 2000), h. 12.

[68] Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, h. 35.

oleh Soekarno-Hatta. Belanda terus melakukan agresi militer untuk mengusai kembali Indonesia. Baru pada tahun 1949 dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) konflik dengan Belanda dapat diakhiri, selanjutnya pada tahun 1950 Indonesia memperoleh pengakuan resmi di dunia Internasional sebagai negara berdaulat.

Sebenarnya perencanaan ekonomi pertama dirumuskan dalam konfrensi ekonomi di Jogyakarta pada tahun 1946. Dalam konfrensi dibahas persoalan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga dan distribusi serta alokasi sumber daya manusia oleh Badan Perancang Ekonomi.

Badan Perancang Ekonomi kemudian diperluas dengan nama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) tanggal 12 April 1947 dengan Hatta sebagai ketuanya. Tugas PPSE sebagaimana yang tertera dalam surat pengangkatan anggotanya adalah :

> *….menyiapkan boekti-boekti dan boeah pikiran oentoek mendjadi rentjana dan dasar Pendirian Negara Repoeblik Indonesia oentoek menghadapi peroendingan dan penjelesaian soal-soal ekonomi jang akan datang, teroetama yang berhoeboengan dengan peroesahaan bangsa asing jang ada di negeri kita serta dengan pembentoekan Negara Indonesia Serikat*.[69]

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kemudian menyatakan sikap politik dalam bidang perekonomian Indonesia, bahwa segala milik bangsa asing selain daripada yang diperlukan negara dan diusahakan negara dikembalikan kepada yang berhak, serta yang diambil oleh negara dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnya. Indonesia juga akan mengakui semua hutang Belanda sebelum kedatangan Jepang menjadi hutang

[69] Amiruddin Al-Rahab, *Ekonomi Berdikari Sukarno*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), h. 6.

Republik Indonesia. Argumen ini dikemukakan oleh Hatta agar pemerintah Belanda dan dunia Internasional mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dalam perjalanannya, dengan memburuknya hubungan Indonesia-Belanda di tahun-tahun kemudian. Setelah naik untuk kedua kalinya sebagai PM, Ali Sastroamidjojo mengemukakan untuk membatalkan perjanjian-perjanjian KMB karena perjanjian–perjanjian KMB dinilai menghambat "program pembangunan nasional" yang akan dijalankan. Usul Kabinet Ali ini diterima dengan penuh oleh DPR April 1956. Dalam usulannya, Ali mengatakan bahwa program pembangunan nasional titik beratnya pada bidang ekonomi dan sosial secara "*berencana dan teratur*." Oleh karena itu, diperlukan ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat. Untuk itu perjanjian KMB harus dibatalkan karena perjanjian KMB merupakan hambatan bagi pembangunan dibidang ekonomi dan sosial. Dengan dibatalkannya perjanjian KMB hak-hak istimewa Belanda dalam bidang ekonomi menjadi hilang. Sedangkan perjuangan politik untuk memasukkan Irian Barat ke wilayah RI semakin terasa lebih bebas.[70]

Peristiwa-peristiwa politik mendominasi pentas di sisa dasawarsa 1950-an masalah ekonomi makin terpinggir "*Politik adalah Panglima*" adalah ungkapan yang sering terdengar pada waktu itu. Keadaan ekonomi terus memburuk, tetapi energi bangsa banyak tersita oleh persoalan politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi parlementer menguat. Pemberontakan PRRI-Permesta dan keadaan ekonomi yang semakin berat mempercepat proses runtuhnya sistem demokrasi parlementer.[71]

---

[70] Amiruddin Al-Rahab, *Ekonomi Berdikari Sukarno*, h. 22.

[71] Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, h.94.

Pada bulan Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan kembali kabinetnya kepada Presiden Sukarno, kemudian pada bulan April 1957 Presiden Sukarno membentuk Kabinet Karya (Djuanda sebagai Perdana Menteri). Baru pada bulan Maret 1960 sistem Demokrasi Terpimpin dilaksanakan penuh. Kepribadian Indonesia itu adalah "*gotong royong*" yang merupakan hasil perahan dari sila-sila Pancasila yang dijalankan secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesejahteraan bersama yang penjelmaannya membutuhkan tiga unsur pokok. *Pertama*, kepentingan bersama ditetapkan bersama, usaha bersama yang dijalankan bersama, terakhir pimpinan bersama dimufakati bersama.[72]

Konsepsi mengenai Demokrasi Terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunan dibidang ekonomi, Ekonomi Terpimpin. Sistem ini hakikatnya mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk "*memimpin*" ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Dan semua itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komprehensif.[73] Dalam ekonomi terpimpin ini dirumuskan Rencana Pembangunan Nasional 8-Tahunan untuk dijadikan acuan bagi semua kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemamanan di negeri ini. Sasaran-sasaran yang menjadi penjuru utama ekonomi nasional baik fiskal, moneter dan sektoral harus mengacu dan tunduk pada tujuan besar politik negara.

Tahun 65, enam tahun setelah Manipol dan lima tahun setelah RPSDT, Sukarno melihat kemandekan program Ekonomi Terpimpin dan mengusulkan "*banting Setir*" dengan semboyan "*berdikari*" (berdiri di atas kaki sendiri). Setahun sebelumnya Sukarno mengemukakan untuk memerangi inflasi

[72] Amiruddin Al-Rahab, *Ekonomi Berdikari Sukarno*, h. 34.
[73] Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, h. 95.

perlu perencanaan perkembangan harga, produksi dan distribusi. Untuk itu, perlu ada satu aparat yang berwenang dalam perencanaan dan pengawasan. Maka dari itu dibentuklah Dewan Pimpinan Ekonomi Nasioanl yang langsung berada dibawah pengawasan presiden. Oleh karena itu, Anggaran Belanja Pembangunan langsung dikuasai oleh presiden. Lebih jauh Sukarno mengemukakan masalah efesiensi dalam penyaluran biaya pembangunan, serta penghematan dan pengawasan yang lebih ketat dengan penyederhanaan penyaluran dan mempermudah pertanggungjawaban.[74] Masa berdikari merupakan penegasan posisi negara dalam bidang ekonomi. Negara sebagai penjelmaan dari masyarakat diharapkan untuk menguasai seluruh perangkat ekonomi yang dapat mendatangkan pendapatan untuk negara.

4. Ekonomi Eksklusif

Setelah enam bulan setelah peristiwa 30 September 1965, suasana politik masih sangat tegang dan tidak menentu, sementara birokrasi pemerintahan tidak jalan. Keadaan politik sedikit lebih tenang setelah *de facto* Jenderal Soeharto memegang kendali (Supersemar, 11 Maret 1966) dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh presidium Kabinet Soeharto-Sultan Hamengku Buwono IX-Adam Malik. Sejak itu, rezim Orde Baru secara bertahap mengkonsolidasi kedudukan politiknya. Sultan, sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, didukung tim ekonominya (Profesor Widjojo Nitisastro dan sejumlah teknokrat) mulai mengambil langkah-langkah awal stabilisasi ekonomi. Namun, sifatnya masih *ad hoc*. Program stabilisasi ekonomi yang komprehensif baru dilaksanakan Oktober 1966 sewaktu situasi politik sudah jauh lebih kondusif. Pada Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat

[74] Amiruddin Al-Rahab, *Ekonomi Berdikari Sukarno*, h. 66.

Presiden, dan setahun kemudian pada Maret 1968 sebagai Presiden, mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional. Pada Juni 1968 dibentuk Kabinet Pembangunan I, yang memasukkan para teknokrat (Profesor Sumitro Djojohadikusumo, Profesor Ali Wardhana dan lainnya) dan mengukuhkan peran mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Profesor Widjojo Nitisastro tidak ditugaskan sebagai menteri suatu sektor karena tampaknya dianggap lebih cocok untuk memikirkan strategi besar antar sektor di Tim Ekonomi dan kemudian sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas pada September 1971. Landasan politik program stabilisasi ekonomi makin kokoh.[75]

Peristiwa politik dan keadaan ekonomi 1966 yang semakin memburuk, inflasi merajalela karena politik dijadikan panglima, dan pembangunan ekonomi disubordinasikan pada pembangunan politik. Dalam keadaan perekonomian yang rapuh, prasarana ekonomi yang hancur dan inflasi yang tinggi (sampai mencapai 650% per tahun 1966), maka pemerintah Orde Baru tidak punya pilihan kecuali "*membanting stir*" ke arah yang sebaliknya. Kebijakan ekonomi harus diubah secara drastis dari "*komando*" menjadi "*bebas demokratis*," dari "*tertutup*" menjadi "*terbuka*," termasuk terhadap modal asing, dan secara teknis dari anggaran belanja yang selalu defisit menjadi selalu berimbang, meskipun dana-dana untuk menyeimbangkannya berupa modal dan bantuan yang diperoleh dari luar negeri.

Ekonomi Orde Baru yang berjalan mulus dengan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun (1966-1974) mendapat tambahan dorongan dari rezeki nomplok sebagai akibat kenaikan harga minyak luar biasa pada tahun 1973/74 dan 1979/80. Pertumbuhan ekonomi pada periode tujuh tahun

[75] Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, h.109.

berikutnya (1973-1980) adalah 7,5% meskipun demikian, rezeki nomplok dari minyak nampaknya telah membuat bangsa Indonesia menjadi manja, sehingga kehidupannya menjadi lebih boros dan mewah. Nilai ekspor yang meningkat pesat, yaitu 6,8% per tahun, ternyata diikuti dengan kenaikan nilai impor yang jauh lebih cepat, yaitu 16,6% per tahun, sehingga kebutuhan akan modal asing tidak berkurang, bahkan justru cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun.[76]

Pemerintah saat itu juga dapat dikatakan berhasil mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lewat, antara lain, pembangunan ekonomi pedesaan berdasarkan modernisasi, intensifikasi pertanian dan industrilisasi. Dengan pencapaian tersebut, Indonesia sempat dijuluki oleh Bank Dunia sebagai salah satu "*macan Asia*" bersama-sama dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand. Namun demikian, pencapaian kinerja perekonomian nasional tersebut pada tingkat makro menyembunyikan sejumlah persoalan. Strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan pemerintah menciptakan inefesiensi dan distorsi pasar, baik pasar output maupun pasar input. Walaupun baru disadari setelah dilanda krisis keuangan Asia pada 1987/1988, strategi pembangunan ekonomi Orde Baru menciptakan biaya ekonomi yang sangat tinggi dan memperbesar jurang antara kaum miskin dan kaum kaya. Dengan kata lain, selama era Orde Baru, strategi pembangunan yang dipilih menciptakan pola pembangunan *ekonomi eksklusif* atau hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat dan pengusaha tertentu, yakni mereka yang dianggap oleh pemerintah sebagai kelompok yang sangat penting, tidak saja sebagai motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelangsungan rezim yang berkuasa. Selain itu, pusat

[76] Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia,* h. 10.

pembangunan ekonomi dengan sektor industri sebagai motor utama pertumbuhan adalah Pulau Jawa. Pemerintah beragumen bahwa dengan sumber daya, khususnya modal dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, maka prioritas harus diberikan kepada pihak dan wilayah tertentu saja, dengan kepercayaan pada apa yang disebut dengan efek "tetesan ke bawah" (*trickle down effect*).[77]

5. Ekonomi Kerakyatan

Pada masa Gus Dur memimpin organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, pada saat itu pula Indonesia masuk pada masa pembangunan berbasiskan hutang yang digalang oleh pemerintah Soeharto. Bagi negeri yang berkembang seperti Indonesia, tentu saja menimbulkan banyak kerusakan, diantaranya:

a. Konsentrasi ekonomi diarahkan ke bidang-bidang non pertanian dengan dicampur kebijakan penanaman modal asing dalam bidang-bidang pertambangan, eksploitasi laut, minyak dan sejenisnya untuk mengejar cicilan membayar hutang dan keperluan belanja rutin negara. Keberhasilan-keberhasilan pembangunan hanyalah bersifat semu karena sebenarnya ditopang oleh ketergantungan hutang, ditambah korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela.
b. Degradasi lingkungan hidup yang parah karena alam dieksploitasi untuk mengejar keuntungan guna membayar hutang dan hal itu dilakukan dengan banyak korupsi, kolusi dan nepotisme, baik dibidang hutan, laut maupun dalam bidang-bidang yang lainnya, bukan berbasiskan pada kepekaan memelihara lingkungan.

[77] Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif: Sudah Sejauh Mana Indonesia?*, (Jakarta: LP3ES, 2016), h. 2.

c. Pungutan pajak justru digenjot untuk membayar hutang.
d. Anggaran negara yang seharusnya untuk biaya ekonomi dan sosial dalam negeri justru dilarikan keluar negeri untuk mencicil membayar hutang.
e. Memanjakan para pejabat dengan tanpa berfikir panjang, jika terjadi kesulitan maka akan dicarikan jalan pintas dengan menambah hutang luar negeri (HLN) entah generasi siapa hutang itu akan dilunasi tidak pernah dipikirkan.

Terseoknya kemampuan membayar hutang luar negeri Indonesia, menurut Revrisond Baswir diperparah dengan hancurnya ekonomi Indonesia yang mendasarkan pada beberapa hal berikut:

a. Korupsi, kolusi dan nepotisme.
b. Tingginya konsentrasi untuk membiayai industri yang diwarnai dengan monopolistik dari para krooni penguasa.
c. Kebijakan nilai tukar yang rendah hanya untuk menggenjot industrialisasi, yang mana industri-industri baru yang padat modal membutuhkan barang-barang impor dan komponan lain dari luar negeri, yang hal tersebut jelas membutuhkan modal besar. Kebijakan nilai tukar yang rendah dimaksudkan untuk mendukung industrialisasi ini.
d. Dalam tataran praksis, obsesi industrialisasi ini ternyata tidak fokus sehingga tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa diunggulkan untuk bersaing dengan negara lain.
e. Kebijakan ekspansi perbankan yang luar biasa dengan syarat hanya memiliki modal 1 milyar telah

menyebabkan kredit macet. Hingga April 1998, terdapat 150 triliun dari kredit nasional yang macet.[78]

Dari kondisi yang carut marut perekonomian Indonesia, Gus Dur bersama gerbong NU-nya menciptakan model perekonomian kerakyatan untuk merespon kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Bukti dari besarnya dukungan bagi NU dalam lingkup masyarakat Indonesia adalah dibukanya cabang bank perkreditan rakyat dan sebuah cabang bank di Sidoarjo, di luar Surabaya. Selama beberapa tahun Gus Dur telah mengimpi-impikan adanya suatu jaringan bank pedesaan, seperti yang ada di Bangladesh dengan Grameen Bank. Jaringan bank pedesaan ini akan memberikan kredit kepada mereka yang sukar memperoleh kredit dari bank konvensional. Bank ini didukung oleh Bank Summa, yang dimiliki oleh WNI keturunan Cina, dan juga menerima deposito konvensional yang mendapatkan bunga. Gus Dur dan teman-temannya yang progresif menolak pendapat banyak muslim konservatif bahwa bunga bank modern sama dengan riba, yang dilarang oleh Al-Quran.

Pelarangan riba sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

....وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا....

"….padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…."(QS. Al-Baqarah[2]:275).

Dalam konteks tersebut di atas, Gus Dur tidak setuju dengan pandangan yang menggeneralisasi bahwa setiap bunga bank sebagai riba. Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi, jika bunga bank dipungut dari upaya non-produktif, maka ia dapat

[78] Ahmad Hisyam, *Gagasan Ekonomi Gus Dur 1984-2001,*(Skripsi S1 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 4.

dikatakan riba. Tetapi jika bunga bank tersebut merupakan bagian dari sebuah upaya produktif, maka ia bukan riba, tetapi merupakan bagian dari ongkos produksi saja.[79]

Gus Dur secara konsisten membela WNI keturunan Cina dan orang Kristen Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Hasilnya, banyak WNI keturunan Cina yang bersedia mendukung inisiatifnya. Banyak pengamat pada waktu itu memuji aliansi antara NU dan Bank Summa.[80]

Untuk mengatasi ekonomi yang carut marut harus ditegakkannya suatu orientasi ekonomi yang benar, termasuk orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini sejak kemerdekaan kita, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa saja, yang berarti orientasi ini kecil sekali memihak kepada kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kita. Orientasi membangun UKM, dijalankan dengan penyediaan kredit yang berbunga sangat rendah sebagai modal pembentukan UKM-UKM tersebut.

Adanya perubahan dalam orientasi ekonomi itu, berarti juga harus ada perubahan tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penekanan pada bidang ekspor, yang hasilnya dalam bentuk pajak, sangat sedikit kembali ke kas negara, karena begitu banyak keringanan-keringanan untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru yang harus diutamakan adalah perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.

---

[79] Ahmad Suaedy, dkk., *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi Abdurrahman Wahid,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h.xxvii.

[80] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Penerjemah Lie Hua,(Yogyakarta: LKiS, 2003; reprint, Yogyakarta:Mahabbah,2017), h. 213.

Watak merakyat dari perjuangan ekonomi kerakyatan tidak boleh berubah menjadi perjuangan seremonial pencitraan politik semata. Pada akhirnya yang akan terjadi hal-hal ekonomi pun juga diukur dengan ukuran-ukuran politik. Nyata sekali dalam hal ini, contohnya yang terjadi dengan Kredit Usaha Tani (KUT). KUT yang semula merupakan program ekonomi, dengan cepat berubah menjadi sebuah program politik. Yaitu mengusahakan sebuah program pendukung kekuasaan untuk menang dalam pertarungan politik, tanpa memandang penerima program KUT dari kecakapan ekonomis dan kemampuan finansialnya. Jadilah pelaku program itu menjadi bulan-bulanan pihak Pengadilan Negeri (PN), termasuk di dalamnya para kyai.

Dalam pandangan Islam kepemimpinan pemerintahan adalah untuk menciptakan *maslahah al-ammah*, yang secara sederhana dapat diterjemahkan dengan kata kesejahteraan. Kata kesejahteraan ini, dalam Undang-undang Dasar 1945 kita, dinamakan keadilan dan kemakmuran. Dalam pembukaan UUD 1945 diterangkan, bahwa tujuan bernegara bagi kita semua untuk menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Juga menjadi sasaran dari ketentuan Islam itu, dengan pengungkapan "kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya, terkait langsung dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya (*tasharruf al-imam ala ar-ra'iyyah manuthun bial-mashlahah*).

Dalam bahasa sekarang, sikap agama seperti itu dirumuskan sebagai titik yang menentukan bagi orientasi kerakyataan. Itulah yang seharusnya menjadi arah kita dalam menyelenggarakan perekonomian nasional.[81]

---

[81] Ahmad Suaedy, dkk., *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi Abdurrahman Wahid,* h. 207.

B. Teoritik Ekonomi Moral Nusantara

Sejarah peradaban manusia merupakan suatu jalinan peristiwa sejarah yang tak berkelim. Tak satupun bagian dari sejarah tersebut yang bisa diisolasikan, terutama bagian yang termasuk dalam jalinan perniagaan internasional, seperti halnya pada kawasan Nusantara yang oleh Anthony Reid digambarkan sebagai kawasan "*tanah di bawah angin*."

Kegiatan ilmiah Anthony Reid membuat kita dapat kembali membaca peninggalan-peninggalan besar tentang sejarah perkembangan ekonomi baik dalam produksi dan perdagangan Asia Tenggara, meneliti dengan cermat kehidupan sehari-hari masyarakat dalam hal wilayah, makanan, seks, perumahan, perniagaan, pola-pola kesejahteraan, kedudukan wanita versus laki-laki dan lainnya.

Penulis tesis untuk menjabarkan ekonomi moral Nusantara sebenarnya merupakan hasil potretan dari perkembangan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Nusantara itu sendiri. Moral dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dapat diartikan (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.[82] Senada dengan teori Sumitro Djojohadikusumo saat menjelaskan tentang teori dasar ekonomi, dalam sistematik tata nama yang digunakan oleh Sumitro dalam bukunya, istilah "*perkembangan*" dikaitkan dengan paham "*evolusi*" (*evolution*), pertumbuhan (*growth*) maupun dengan pembangunan (*development*).

Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam

[82] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 971.

pertumbuhan ekonomi, biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Dalam hubungan ini, ditunjukkan hubungan perimbangan kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain. Satu sama lain hal itu dapat dinyatakan dalam kerangka format metematika. Model-model mengenai pertumbuhan ekonomi harus bisa diuji dengan pengukuran empiris-kuantitatif.

Pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Peningkatan produksi memang merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Dalam pada itu, selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada-pola penggunaan (*alokasi*) sumber daya produksi (*productive resources*) di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (*distribusi*) kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (*institutional framework*) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Suatu hal yang amat penting dalam proses pembangunan ialah semakin luasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif (*productive employment*). Pembangunan ekonomi seharusnya membawa partisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat produktif oleh semua anggota masyarakat yang ingin dan mampu untuk berperan serta dalam proses ekonomi. Kegiatan ekonomi yang produktif mengandung berbagai dampak positif, di antaranya menambah pendapatan nyata bagi sebagaian besar rakyat penduduk. Hal ini dapat meningkatkan daya konsumsinya secara kuantitatif maupun kualitatif. Lagi pula, satu sama lain itu dapat mengurangi ketimpangan dalam distiribusi pendapatan di antara berbagai golongan dalam

kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pengertian tentang pembangunan ekonomi selain menyangkut perubahan kuantitatif pada produksi dan pendapatan, mencakup juga perubahan kualitatif dalam tata susunan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti *perubahan struktural*, yaitu: perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi.[83]

Dalam teori Sumitro Djojohadikusumo yang mengutip J.H. Boeke yang menganggap segi sosial budaya sebagai faktor dominan dalam perekonomian Indonesia pada khususnya dan masyarakat Timur pada umumnya juga Clifford Geertz pakar terkemuka di bidang antropologi kebudayaan.

Seluruh pandangan dalam teori dualisme Boeke berpokok pada saran pendapatnya bahwa serangkaian nilai-nilai dasar dalam sosial budaya yang menentukan sikap kelakuan masyarakat Timur itu secara absolut menjadi kendala terhadap kemajuan di bidang ekonomi. Tata nilai sosial budayanya yang sifatnya tidak rasional ekonomis menentukan perilaku warga masyarakat yang bersangkutan yang tidak sesuai dengan sifat kegiatan yang diperlukan oleh proses ekonomi modern dengan organisasi usahanya berdasarkan penerapan teknik produksi yang memadai. Dalam mata pandangan Boeke, tata nilai sosial yang dimaksud sudah menjadi "*beku*" dan tidak dapat diubah. Oleh sebab itu, kebijaksanaan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi akhirnya akan sia-sia belaka dan menemukan kegagalan. Haluan pandangan dan

---

[83] Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, LP3ES, 1994), Cet.1.h. 2.

kerangka analisisnya Boeke sungguh dijiwai oleh pesimisme secara ekstrim.[84]

Tema pokok dalam analisa Geertz pada hakekatnya merupakan suatu varian dari saran pendapat Boeke mengenai kegiatan ekonomi yang memang meluas (karena penduduk bertambah), namun tetap bersifat statis (*static expansion*). Dalam gagasan Geertz, fenomena itu dinyatakan sebagai suatu proses "*involusi*" yang melekat pada masyarakat agraris, suatu *agricultural involution*. Pola dan sifatnya berbeda sekali dari perkembangan yang lazim dianggap sebagai *evolusi*. Tata susunan sosial budaya dalam masyarakat desa, khususnya di Jawa, bersifat kaku, sulit dilakukan perubahan terhadapnya. Kelangsungan tata susunan masyarakat demikian menjurus kepada kemiskinan yang harus ditanggung bersama, *shared poverty*.

Pokok permasalahan dalam gagasan aliran sosial budaya (Hagen-Boeke-Geertz) tentang kegiatan ekonomi masyarakat terletak pada dasar pandangannya dan pangkal haluannya, seolah-olah dimensi ekonomi dalam kehidupan masyarakat negara-negara berkembang menjadi fungsi secara berat sebelah dari tata susunan dan skala nilai-nilai budaya yang melekat (*secara permanen*) dalam masyarakat yang bersangkutan. Sama sekali tidak diakui tentang adanya *interaksi* dalam hubungan pengaruh timbal-balik di antara segi ekonomi-segi sosial budaya-segi politik dalam perkembangan masyarakat dan dalam perjalanan zaman.[85]

Berbeda dengan pendekatan dalam gagasan-gagasan Hagen-Boeke-Geertz, oleh Hoselitz diulas bahwa segi sosial budaya dan segi ekonomi harus dilihat sebagai suatu proses interaksi dalam perkembangan keadaan. Pelajaran tentang

---

[84] Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Cet.1. h. xviii

[85] Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, h. xviii.

transformasi masyarakat dari satu tingkat ekonomi tertentu sampai pada tingkat ekonomi berikutnya yang lebih tinggi dapat dianggap sebagai studi tentang dinamika perubahan masyarakat (*dynamics of social change*).

Hoselitz membedakan antara kegiatan masyarakat yang bersifat "*tradisional*" dan kegiatan masyarakat yang bersifat "*rasional*." Konsep pengertian "*tradisional*" mengandung implikasi bahwa pola dan sifat kegiatannya tidak efisien, didasarkan teknologi sederhana dan menghalangi inovasi. Akan tetapi, sekali-kali berarti bahwa seolah-olah tidak mungkin terjadi perubahan pada masyarakat yang "*tradisional*."

Dalam pandangan Hoselitz, faktor nasionalisme di masyarakat negara-negara berkembang bisa menjadi pendorong ideologis yang kuat bagi proses perubahan masyarakat. Mutu elite politik yang mencakup wawasannya, perilaku moralnya, kemampuannya dalam hal pengelolaan kebijaksanaan, segala sesuatu itu menjadi kekuatan utama untuk proses perubahan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.[86]

Dalam pembangunan ekonomi menurut hemat penulis tesis, implementasi ekonomi moral penting sekali mengulas kembali sebuah penelitian yang dilakukan James C.Scoot yakni "*Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.*" Dari segi sosial petani ada hak-hak atau harapan-harapan moral yang ia kutip dari Barrington Moore "Pengalaman ini (yakni membagi-bagikan resiko di dalam komunitas) merupakan tanah di mana tumbuh adat-istiadat dan norma-norma moral petani yang mereka gunakan untuk menolak perilaku mereka sendiri dan orang lain. Inti sari norma-norma itu adalah satu pengertian kasar tentang persamaan, dengan menandaskan adilnya dan perlunya orang

[86] Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, h. xix.

mempunyai tanah (*sumber-sumber daya*) yang minimum untuk dapat memenuhi tugas sosial yang penting. Norma-norma itu biasanya mempunyai semacam kekuatan religious, dan mungkin penekanan mereka pada hal-hal itulah yang membuat agama yang dianut oleh kaum petani berbeda dari yang dianut oleh kelas-kelas sosial lainnya."

Pelanggaran terhadap norma-norma itu dapat diperkirakan akan menimbulkan kemasygulan dan perlawanan, bukan hanya karena kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi, akan tetapi juga karena hak-hak telah dilanggar.

Jadi, etika subsistensi itu berakar dalam kebiasaan-kebiasaan ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial dalam masyarakat petani. Sebagai prinsip moral, sebagai satu hak atas subsistensi, saya kira saya dapat menunjukkan bahwa ia merupakan norma yang dipakai untuk menilai tuntutan-tuntutan atas surplus yang datang dari pihak tuan tanah dan negara.[87]

Ditinjau dari perspektif ini, maka masalahnya bagi kaum tani selama transformasi kapitalis di Dunia Ketiga, adalah untuk mendapat penghasilan minimum. Meskipun penghasilan minimum mempunyai dimensi-dimensi fisiologis yang kukuh, namun kita tidak boleh mengabaikan implikasi-implikasi sosial dan kebudayaannya. Agar dapat menjadi anggota yang berfungsi penuh dalam masyarakat desa, sebuah rumah tangga memerlukan sumber penghasilan pada tingkat tertentu agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban seremonial dan sosialnya di samping menyediakan makanan yang memadai untuk dirinya sendiri dan meneruskan pekerjaannya bercocok-tanam. Jatuh ke bawah tingkat itu berarti bukan hanya menghadapi risiko kelaparan, akan tetapi juga kehilangan kedudukan sama sekali

[87] James C.Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* Penerjemah Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1981), Cet.1. h.10.

dalam komunitas dan mungkin jatuh ke satu situasi ketergantungan untuk selama-lamanya.

Dalam arti tertentu, komunitas pra-kapitalis berkisar sekitar masalah penghasilan minimum itu, diorganisasikan untuk meminimumkan resiko yang dihadapi oleh anggota-anggotanya akibat terbatasnya teknik-teknik mereka dan ulah sang alam. Bentuk-bentuk tradisional dari tata-hubungan patron-klien, resiprositas, dan mekanisme redistribusi, dapat ditinjau dari perspektif ini. Meskipun masyarakat pra-kapitalis serba kekuarangan sarana untuk menangung anggota-anggotanya dalam hal terjadi bencana kolektif, ia memberikan asuransi sosail, rumah tangga terhadap resiko-resiko pertanian yang normal melalui suatu sistem pertukaran sosial yang seksama.[88]Ia berkesimpulan bahwa "Dalam arti tertentu, ketiadaan ancaman mati kelaparan bagi individu itulah yang membuat masyarakat primitif lebih manusiawi dibandingkan dengan ekonomi pasar, dan sekaligus juga kurang ekonomis.[89]

Di satu sisi, dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, penulis tesis dengan menggunakan kaca-mata analisis Mohtar Mas'oed bahwa ekonomi (yang menyangkut fenomena kekayaan) dan politik (yang berurusan dengan fenomena kekuasaan) diikat oleh hubungan saling mempengaruhi. Di satu pihak, politik umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkan ke arah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Artinya, penerapan dengan segala bentuknya merupakan faktor penting yang menentukan sifat suatu sistem ekonomi. Di pihak lain, proses ekonomi sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Artinya, proses ini bisa mengubah hubungan

---

[88] James C.Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* Penerjemah Hasan Basari, h. 15.

[89] James C.Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* Penerjemah Hasan Basari, h. 9.

kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya ini akan menyebabkan perubahan sistem politik, dan dengan demikian memunculkan suatu struktur hubungan ekonomi baru.

Dalam pengertian ini, hubungan antara politik dan ekonomi, yang di sini diterjemahkan ke dalam isyu tentang hubungan antara kekuasaan dan kekayaan, harus menjadi bagian integral dari analisa politik yang memusatkan perhatian pada fenomena perubahan. Penekanan pada hubungan antara ekonomi dan politik, yang disebut pendekatan ekonomi-politik, juga berkaitan erat dengan analisa yang menekankan peranan negara yang aktif dan otonom. Menurut Charles Kindleberger, ekonomi dan politik adalah dua metode yang berbeda untuk mengalokasikan sumberdaya langka; ekonomi melalui mekanisme pasar, sedang politik melalui mekanisme anggaran belanja negara. Namun di negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia, keduanya sangat dipengaruhi oleh prilaku negara.[90]

Analisa baku dalam ekonomi-politik mengharuskan kita untuk mempertimbangkan variable-variabel nilai (*value*), kepentingan (*interest*) dan kekuasaan. Pembangunan ekonomi sebagai wujud dari perubahan ekonomi, bukanlah proses teknis semata. Di dalamnya terlibat masalah nilai. Misalnya, apakah proses itu akan dilakukan atas dasar nilai yang mengutamakan "*persaingan*" (yang berarti menekankan peranan mekanisme pasar yang efisien, memberi ganjaran pada yang produktif, dan menganggap ketimpangan sebagai keadaan yang tak terelakkan) atau nilai yang menekankan sikap "*kekeluargaan*" atau kerjasama (yang berarti mengistimewakan pemerataan, kesejahteraan dan keadilan sosial dan pemberian wewenang pada tingkat bawah)? Pemilihan alternatif ini menyangkut masalah kepentingan, yaitu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

---

[90] Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Cet.1. h. xvii.

Strategi yang mengutamakan nilai persaingan pasti akan memuaskan kepentingan pesaing yang lebih kuat dan merugikan yang lebih lemah. Sebaliknya, strategi yang menekankan nilai kekeluargaan atau kerjasama umumnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan si lemah dan mendorong upaya redistribusi yang dianggap merugikan kelompok yang lebih kuat. Yang terakhir adalah variabel kekuasaan. Analisa ekonomi-politik sudah tentu harus mempertimbangkan soal: Siapa yang berkuasa? Apa sumber-sumber kekuasaannya? Nilai dan kepentingan apa yang didukung oleh penerapan kekuasaan itu? Distribusi sumberdaya langka dalam masyarakat selalu mencerminkan pola kekuasaan politik, bukan pola kebutuhan manusia.[91]

Bahwa pembangunan ekonomi bukanlah suatu masalah ekonomi semata-mata, sudah dapat dibayangkan apabila kita mengingat bahwa tujuan-tujuan suatu rencana pembangunan ekonomi, sifat-sifatnya, perbandingan antara penanaman modal untuk pembuatan barang-barang modal dengan penanaman modal pembuatan barang-barang konsumsi, ditentukan berdasarkan suatu keputusan politik. Jadi oleh keputusan yang bukan bersifat ekonomis. Begitu pun keputusan mengenai cara-cara pelaksanaan suatu program pembangunan ekonomi, misalnya tentang sentralisasi atau desentralisasi, apakah rencana pembangunan ekonomi itu harus dilaksanakan dengan menggunakan aparatur negara saja atau dengan mengajak rakyat untuk turut serta secara aktif; tempat dan penghargaan yang diberikan kepada inisiatif sendiri di dalam perumusan serta pelaksanaannya, dan kebebasan pribadi di dalamnya, semua itu merupakan suatu keputusan yang sangat erat terjalin dalam

[91] Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, h. xviii.

maksud tujuan masyarakat, atau dalam perkataan lain, mengenai dasar kebudayaannya.[92]

Menurut seorang budayawan Soedjatmoko dalam memandang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti bahwa tujuan-tujuan kebudayaan itu diubah dan kemudian ditentukan tujuan-tujuan yang baru. Jiha hendak menjamin bahwa pembangunan ekonomi itu berhasil, maka kita perlu berusaha supaya tujuan-tujuan baru itu berlainan daripada yang lama, meresap menjadi darah daging kebudayaan tadi. Dalam hal ini penyesuaian itu sebenarnya merupakan suatu reintegrasi pribadi berdasarkan perkembangannya hubungan pribadi atara si buruh atau anggota lainnya dengan tujuan-tujuan masyarakat yang baru itu.

Maka dari uraian di atas ini agaknya sudah teranglah bahwa, jikalau kita hendak melaksanakan pembangunan ekonomi dengan kecepatan yang diperlukan dan sesuai dengan proporsi masalah ini dalam segala sangkut-pautnya, tidak cukup menghadapi pembangunan ekonomi ini dari sudut ekonomi ataupun dari sudut birokratis saja. Pembangunan ekonomi harus didasarkan atas, atau lebih tegas lagi, harus merupakan penjelmaan dari suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang dibimbing dengan kesadaran. Perubahan-perubahan yang diperlukan harus meliputi juga susunan serta lembaga-lembaga hukum, kebiasaan konsumsi dan juga taraf kebutuhan serta sifat-sifat kebutuhan anggota masyarakat Indonesia. Kita harus menyelami soal dorongan untuk kerja (*motivation*), perangsang kerja serta etika kerja. Kita harus menghadapi masalah makna hidup dan masalah penguasaan alam dan pengabdiannya kepada kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita akan harus menentukan nilai-nilai hidup kita, *beroepskeuze*, sesuai dengan

[92] Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan,* (Jakarta: LP3ES, 1983), Cet 1, h. 4.

kebutuhan pembangunan ekonomi dalam taraf sejarah kita sekarang ini. Dan kita harus menghadapi dan menyelami ilmu serta penggunaannya untuk keselamatan umat manusia.

Maka pembangunan ekonomi ternyatalah mempunyai suatu dimensi lain, di samping pengetahuan, keahlian dan faktor-faktor ekonomi yang khusus. Ia juga berdimensi manusia.[93]

Jika kita kembalikan masalah ekonomi Nusantara kita ke dalam kerangka konsep " *ekonomi moral*" maka yang perlu diperhatikan adalah adanya suatu jawaban tantangan ekonomi Nusantara yang mampu menciptakan *keadilan ekonomi* dan *keadilan sosial*.

Meskipun, tentu saja, dalam satu tulisan tidak perlu diuraikan berbagai definisi, tetapi karena yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional kita adalah keadilan sosial, maka orang bisa bertanya apakah ada perbedaan antara keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Secara sederhana perbedaannya harus ada, karena keadilan sosial pastilah lebih luas daripada keadilan ekonomi, dan istilah sosial ekonomi memang biasanya diartikan lebih luas daripada ekonomi semata-mata.

Ditinjau dari segi, sebenarnya memang tidak terlalu keliru untuk tidak membedakan antara keadilan ekonomi dan keadilan sosial, karena dalam literatur ekonomi Barat pun keadilan sosial (*social justice*) tidak atau kurang diperhatikan. Bahkan ahli ekonomi terkenal,TW. Hutchison, dari Inggris menyatakan dengan tegas bahwa "*keadilan sosial bukanlah urusan ekonom*." Sebaliknya keadilan ekonomi dalam ilmu ekonomi teknis (teori ekonomi) dianggap sudah diperhatikan, dan sistem ekonomi pasar sudah secara otomatis bersifat adil bagi semua peserta dan pelaku ekonomi.

---

[93] Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan,* h. 15.

Dalam buku The Rise and Fall of Economic Justice, Mac Pherson membeberkan sejarah konsep keadilan ekonomi terutama sejak Aristoteles melahirkan konsep *commutative justice* dan *distributive justice*. Dalam buku ini keadilan ekonomi diberi definisi sebegai berikut:

> *"Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia."*

Keadilan ekonomi muncul menjadi masalah masyarakat yang penting pada waktu sistem produksi dan sistem distribusi yang berdasar pada kekuatan-kekuatan pasar, mulai masuk ke dalam sistem politik. Dengan kata lain, ia menjadi masalah politik di mana negara (atau pemerintah) dihimbau untuk bercampur tangan, karena kekuatan-kekuatan pasar bebas mulai menunjukkan kekuasaan dan dominasi yang mengatur hubungan produksi dan distribusi di antara pelaku-pelakunya, yang menjurus ke arah ketidakadilan ekonomi. Campur tangan negara sebagai lembaga politik terpenting diharapkan mampu membalikkan kecenderungan ketidakadilan ekonomi yang di khawatirkan mengganggu ketentraman masyarakat.[94]

Memang secara sederhana dalam prakteknya kita mengenal *koperasi*, organisasi ini memang dimaksudkan untuk menjadi suatu bangun usaha yang paling sesuai dengan kepentingan rakyat kecil dalam peningkatan kemakmurannya. Bila rakyat yang paling miskin mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran secara mantap melalui pengembangan usahanya, bukan melaui hadiah/subsidi, maka rakyat sedikit demi sedikit akan mampu memperoleh bagian yang semakin adil dalam produksi dan pendapatan nasional. Dan, inilah keadilan sosial

[94] Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia,* h. 21.

yang dicita-citakan dalam Pancasila; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disini jelas ada perbedaan antara pengertian keadilan ekonomi dan keadilan sosial yang dalam pengembangan organisasi koperasi akhirnya akan menyatu. Keadilan ekonomi adalah kesempatan yang sama bagi semua anggota koperasi untuk memperoleh manfaat dari hasil usaha koperasi, yaitu dengan cara berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha (bisnis) koperasi.

Dengan demikian, jelas bahwa keadilan ekonomi dalam arti yang sebenarnya memang paling mudah dilihat dan diwujudkan dalam bangun usaha koperasi. Sementara itu, keadilan sosial adalah keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri, yang dalam agama berarti pembagian yang adil dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada manusia. Karena keadilan sosial menyangkut pembagian, sedangkan keadilan ekonomi menyangkut kesempatan, maka kita bisa mengembalikan pengertiannya pada konsep Aristoteles tentang keadilan *komutatif* dan keadilan *distributif*; yang pertama adalah keadilan ekonomi (produksi) dan yang kedua keadilan sosial (distribusi).

Dalam hubungan dengan sistem ekonomi, bisa kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila yang demokratis dan berkeadilan sosial adalah sistem ekonomi yang mampu menjamin keadilan ekonomi, dan sekaligus menjamin pembagian (distribusi) yang adil setelah setiap proses produksi terselesaikan.[95]

[95] Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia,* h. 36.

BAB III
PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi dan Genealogi Keilmuan Gus Dur

Dalam banyak kesan, Gus Dur mungkin bisa digambarkan dengan kata-kata yang singkat saja: kompleks dan *nyleneh*. Oleh karena itu, pribadi Gus Dur cenderung sulit dipahami, terutama dalam satu sudut tafsir atas dua kata itu, tergantung siapa yang melihat dan memahami. Bahkan pada saat ia menjabat sebagai Presiden RI, sempat muncul anekdot tentang tiga misteri Tuhan: bahwa ada tiga misteri Tuhan yang tidak bisa dipahami atau diketahui manusia sebelum hal itu terjadi, yakni jodoh, kematian dan Gus Dur. Bagi orang awam dan pengikutnya, bahkan bagi ilmuwan yang intelek sekalipun, Gus Dur sering kali dilihat sebagai pribadi yang misterius, tak terduga, dan *weruh sak durunge winarah* (bisa mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi) sebuah kata-kata Jawa yang memiliki makna yang sangat dalam, sarat dengan hikmah dan misteri.[96]

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilahirkan di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur, disebuah rumah kasepuhan sebuah rumah milik kakek dari pihak ibunya, KH. Bisri Syansuri. Rumah itu sendiri berada di dalam kompleks Pondok Pesantren Mambaul Maarif yang

[96] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*. Penerjemah Lie Hua, (Yogyakarta: LKiS, 2003; reprint, Yogyakarta:Mahabbah, 2017), h. vi.

dihuni ribuan santri dari berbagai penjuru tanah air. Dalam biografi resmi disebutkan bahwa Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Menurut penanggalan Hijriyah konon sebenarnya Gus Dur lahir tanggal 4 Sya'ban dan itu adalah bertepatan dengan tanggal 7 September 1940.

Mengenai tanggal lahir ini bermula sewaktu masih kecil. Saat itu Gus Dur mendaftarkan diri sebagai siswa di sebuah Sekolah Dasar (SD) di Jakarta, Gus Dur ditanya oleh pihak sekolah,"Namamu siapa Nak?"

"Abdurrahman," jawab Gus Dur.

"Tempat dan tanggal lahir?"

"Jombang…," jawab Gus Dur, kemudian terdiam beberapa saat.

"tanggal empat, bulan delapan, tahun 1940," lanjutnya Gus Dur agak ragu. Rupanya, saat itu Gus Dur sedang menghitung tanggal dan bulan kelahirannya. Gus Dur hanya ingat bulan Hijriyahnya, yaitu hitungan berdasarkan perputaran bulan. Dia tidak ingat bulan Syamsiyahnya atau hitungan berdasarkan perputaran matahari.

Gus Dur waktu itu mengingat bahwa dia lahir bulan Sya'ban itu sama saja dengan bulan kedelapan dalam hitungan Hijriyah. Tetapi gurunya menganggap itu Agustus, yaitu bulan delapan dalam hitungan Syamsiyah. Maka sejak itu, Gus Dur dianggap lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 padahal sebenarnya dia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriyah atau 7 September 1940.[97]

Sewaktu Gus Dur lahir memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dachil yang dapat diartikan "*Abdurrahman Sang Penakluk*." Sebuah nama yang mengingatkan pada sosok seorang pemimpin besar Islam dari Dinasti Umayyah yang berhasil menaklukan Andalus (Spanyol) sebuah negara di benua

[97] M. Hamid, *Gus Gerr Bapak Pluralisme dan Guru Bangsa,* (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2010), h. 14.

Eropa yang kemudian memasukkannya ke dalam wilayah kekuasaan Islam.

Ayah Gus Dur, KH. Wahid Hasyim, adalah putra seorang ulama besar KH. Hasyim Asy'ari pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, pendiri NU, sementara ibunda Gus Dur adalah Solichah puteri Kiai Bisri Syansuri pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, juga pendiri NU. Jadi Gus Dur adalah keturunan tokoh-tokoh besar yang sangat dihormati oleh masyarakat, baik karena ilmunya, karena keagamannya, juga karena kepemimpinan dan kedekatan mereka dengan gerakan nasionalis yang memimpin perjuangan revolusioner melawan penjajah Belanda pada akhir Perang Dunia II. Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh perumus Pancasila di samping Soekarno, Hatta dan lain-lain, di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ia kemudian menjabat Menteri Agama pada masa pemerintahan Soekarno, sementara Hasyim Asy'ari, oleh kalangan NU diberi gelar yang tak pernah diberikan kepada pemimpin NU lainnya yaitu; Rois Akbar atau Hadratussyaikh yang kurang lebih artinya "*Pemimpin Besar*" atau "*Ketua Agung*."[98]

1. Fase Internalisasi (Keluarga dan Pesantren)

Pada bulan Maret 1942, Jepang mendirikan Shumubu, Kantor Urusan Agama, Jepang meminta KH Hasyim asy'ari untuk mengurusinya. Permintaan ini merupakan dilema jika beliau menolak tentu akan menimbulkan kecurigaan, dengan argumentasi akan sangat melelahkan perjalanan Jakarta-Jombang di saat usia sudah 70 tahunan. Kemudian beliau mengusulkan agar putera sulungnya, Wahid Hasyim diizinkan sebagai kuasanya. Pada saat itu Wahid Hasyim telah menjadi seorang nasionalis terkemuka, pada tahun 1939 ia sibuk dalam

[98] Arief Mudatsir Mandan dan Miftahuddin, *Jejak Langkah Guru Bangsa Gus Dur,* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2010), h. 23.

Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan juga merintis perkembangan Hizbullah yang merupakan sayap militer MIAI. Hizbullah melatih para pemuda sebagai persiapan untuk perjuangan revolusioner yang akan tiba. Usulan untuk mengepelai Shumubu ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Dengan demikian Wahid Hasyim dapat bergerak di Jakarta bersama-sama dengan kaum nasionalis seperti Soekarno-Hatta tanpa menimbulkan kecurigaan berlebih dari Jepang.

Pada tahun 1949 ketika clash dengan pemerintah Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya tamu-tamu yang terdiri dari para tokoh dengan berbagai bidang profesi yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri Agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumahnya.[99]

Wahid Hasyim adalah seorang menteri dan ia terkenal dikalangan pemerintahan Jakarta. Akan tetapi, Gus Dur tidak pernah bersekolah di sekolah-sekolah elit yang biasanya dimasuki oleh anak-anak pejabat pemerintah. Ayahnya pernah menawari Gus Dur untuk masuk ke sekolah elit, tetpi ia lebih menyukai sekolah-sekolah biasa. Menurutnya, sekolah-sekolah elit membuatnya tidak betah. Gus dur memulai pendidikan dasarnya di sekolah Dasar KRIS di Jakarta Pusat. Ia mengikuti pelajaran di kelas tiga dan kemudian di kelas empat. Akan tetapi

[99] Mastuki HS dan M Ishom El-Saha,ed., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Seri 3, h.339.

ia kemudian pindah ke Sekolah Dasar Matraman Perwari yang terletak di dekat rumah keluarga mereka yang baru di Matraman Jakarta Pusat.

Pada tahap ini, pendidikan Gus Dur sepenuhnya bersifat sekuler. Namun, tentu saja ia telah mempelajari bahasa Arab ketika kecil dan mempunyai cukup pengetahuan untuk dapat membaca Al-Quran dengan suara keras. Akan tetapi, baru setelah beranjak remaja, ia mulai belajar bahasa Arab secara sistematik. Ia dan saudara-saudaranya mempunyai kenangan indah mengenai rumah mereka di Matraman. Rumah ini selalu didatangi oleh tamu-tamu menarik yang berbicara dalam berbagai bahasa. Selain itu, di rumah ini terdapat buku, majalah, dan koran dalam jumlah besar.[100]

Pada tahun 1954, setahun setelah menamatkan sekolah dasar dan memulai Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP). Ia terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Kegagalan ini jelas disebabkan oleh karena seringnya ia menonton pertandingan sepakbola sehingga ia tak mempunyai cukup waktu untuk belajar.

Disaat proses belajar pendidikan menengah ini, Gus Dur juga mengikuti belajar di pondok pesantren. Dalam tiga kali seminggu Gus Dur belajar bahasa Arab kepada KH Ali Ma'shum pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Ali Ma'shum terkenal sebagai kiai yang egaliter, beliau tidak memberikan perlakuan khusus istimewa kepada putera-putera kiai-kiai terkemuka yang dipercayakan kepadanya, malah cenderung keras terhadap mereka. Beliau bergaul bebas dengan murid-muridnya dan bahkan sering kali mendatangi tempat- tempat belajar santri-santrinya.

Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta pada tahun 1957, Gus Dur mulai

[100] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 42.

mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh. Ia bergabung dengan Pesantren Tegalrejo di Magelang, yang terletak di sebelah utara Yogyakarta yang dapat dicapai dengan mobil dalam waktu satu jam. Ia tinggal dipesantren ini hingga pertengahan tahun 1959. Di sini ia belajar kepada Kiai Chudori, yang merupakan salah satu dari pemuka NU. Pada saat yang sama, ia juga belajar paro waktu di Pesantren Denanyar, Jombang, di bawah bimbingan kakeknya dari ibu, Kiai Bisri Syansuri.

Gus Dur membuktikan dirinya sebagai siswa yang berbakat dengan menyelesaikan pelajarannya di Tegalrejo di bawah asuhan Kiai Chudori ini selama dua tahun. Kebanyakan siswa yang lain memerlukan empat tahun untuk menyelesaikan pelajaran. Bahkan di Tegalrejo ini Gus Dur banyak menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kelas dengan membaca buku-buku Barat.

Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke Jombang untuk belajar secara penuh di Pesantren Tambakberas di bawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah. Ia belajar di sini hingga tahun 1963 dan selama kurun waktu itu selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syansuri. Selama tahun pertamanya di Tambakberas, Gus Dur mendapat dorongan untuk mulai mengajar. Ia kemudian mengajar di madrasah modern yang didirikan di kompleks pesantren dan juga menjadi kepala sekolahnya. Selama masa ini, ia tetap berkunjung ke Krapyak secara teratur. Di kota ini, ia tinggal di rumah Kiai Ali Ma'shum. Pada masa inilah sejak akhir tahun 1950-an hingga 1963 Gus Dur mengalami konsolidasi dalam studi formalnya tentang Islam dan sastra Arab klasik. Di kalangan pesantren, ia dianggap sebagai siswa yang cemerlang.[101]

[101] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 53.

a. KH. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari dilahirkan di Jombang Jawa Timur pada bulan Februari Tahun 1871 M. Beliau adalah seorang tokoh yang telah mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari tahun 1926 M, Hadratussyaikh sangat dihormati sebagai seorang pemimpin Islam dalam masyarakat pedesaan tradisional. Lebih dari itu, beliau juga dikenal sebagai seorang guru yang telah banyak memberikan inspirasi sekaligus sebagai seorang yang terpelajar. Tidak diragukan lagi beliau juga merupakan seorang revolusioner nasionalis sejati yang berwawasan kebangsaan yang telah menggerakkan ribuan santri-santri untuk mempertahankan kemerdekaan.

Keluarga Kiai Hasyim Asy'ari dengan bangga menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Raja Brawijaya VI yang berkuasa di Jawa pada abad XVI M., dan terkenal sebagai salah seorang raja terakhir kerajaan Hindu-Budha yang terbesar di Jawa, Kerajaan Majapahit. Bahkan yang lebih penting lagi, tokoh legendaris Jaka Tingkir, putera Brawijaya VI, dianggap sebagai seorang yang memperkenalkan agama Islam di daerah pantai timur laut pulau Jawa. Sedangkan puteranya, Pangeran Banawa dikenang sebagai orang pertama yang meninggalkan kerajaan untuk mengajar sufisme. Silsilah ini dianggap sebagai hal yang sangat baik dalam masyarakat tradisional Jawa.[102]

Sejak usia belia Hasyim Asy'ari telah menuntut ilmu agama ke berbagai pesantren khususnya yang ada di Jawa Timur dan Madura. Kemudian pada tahun 1892, ia pergi ke Makah untuk haji dan menuntut ilmu, dibawah bimbingan seorang guru dari Sumatera Barat, Syaikh Ahmad Chatib Minangkabau.[103] Beberapa orang pria dalam balutan jubah hitam dan jubah

---

[102] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 27.

[103] Arief Mudatsir Mandan dan Miftahuddin, *Jejak Langkah Guru Bangsa Gus Dur,*h.24.

hitam-putih, sedang berjalan sambil membicarakan Islam. Pria itu masih berusia dua puluhan, berkumis dan berjenggot, dengan sorot mata tajam. Pakaian seperti orang Arab yang lainnya. Jubahnya putih panjang dengan penutup kepala berupa kain yang dililitkan pada kepalanya. Perawakannya tenang namun tegas. Alisnya melengkung sempurna. Dalam sekali tatap, orang akan terkesan bahwa ia adalah seorang pria berkemauan kuat. Seorang pejuang.

Ia sedang berjalan-jalan bersama seorang laki-laki yang berkumis dan berpakaian seperti dirinya. Usianya sekitar sepuluh tahun lebih tua daripada dirinya. Laki-laki itu berwajah lebih kurus dan alisnya tidak melengkung seperti dirinya.

"Sudah berapa lama kau belajar di sini, Hasyim?"

Hasyim Asy'ari tersenyum. "Tujuh. Sudah tujuh tahun Guru."

"Ilmu Hadits sudah kau kuasai. Sudah saatnya kau kembali," Syaikh Ahmad Chatib Minangkabau berkata padanya.

Hasyim Asy'ari menunduk, matanya menatap wajah-wajah yang dikenalnya. Langkahnya terhenti dan ia memandang hamparan langit biru di kota yang terlihat sangat kokoh dengan bangunan-bangunan putih dan tinggi.

"Sudah waktunya kau mengabdikan ilmu yang kau terima di sini di tempatmu, Hasyim."

Hasyim mengerti yang dimaksudkan gurunya.[104]

Setelah belajar di Makah selama tujuh tahun, Hasyim kemudian kembali ke Jombang. Ia lalu mendirikan pesantren di Tebuireng pada tahun 1899. Tebuireng, saat itu terkenal sebagai daerah kaum abangan yang mengelilingi pabrik gula di daerah tersebut. Hasyim Asy'ari sengaja memilih tempat tersebut sebagai titik tolak misi dakwah dan pendidikannya, dengan alasan bahwa sebuah pesantren sudah seharusnya memainkan

[104]Damien Dematra, *Sejuta Hati Untuk Gus Dur: Sebuah Novel dan Memorial,*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 20.

peran di dalam mengubah masyarakat di sekitarnya. Di pesantren ini Hasyim memperkenalkan sejumlah pembaruan terhadap pengajaran di pesantren, yaitu berupa sistem kelas yang terstruktur. Sistem ini kemudian banyak diikuti oleh sejumlah pesantren lainnya.[105]

b. KH. Bisri Syansuri

KH. Bisri Syansuri dilahirkan pada bulan September 1886 di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai banyak pesantren. Di daerah pesisir ini, Islam masuk lebih awal daripada daerah pedalaman, yang masih menganut agama Hindu-Budha. Bersama dengan Hasyim Asy'ari, dia dianggap sebagai seorang tokoh kunci bagi lahirnya NU.[106]

Setibanya di tanah air Bisri Syansuri tinggal bersama mertuanya, KH. Chasbullah, tepatnya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Selama dua tahun beliau mertuanya dalam bidang pendidikan dan pertanian. Namun akhirnya beliau diberi sebidang tanah di Denanyar yang masih berdekatan dengan Desa Tambakberas untuk merintis kehidupannya secara mandiri dan untuk mendirikan pesantren.

Denanyar merupakan sebuah desa yang terletak di garis perbatasan antara Jombang dan daerah pedalaman sebelah barat dan barat laut. Sayangnya, moralitas masyarakatnya demikian buruk yang terlihat dengan banyaknya wanita tuna susila (WTS), kekerasan, pembegalan, perampokan dan pembunuhan.

Pada tahun 1917, atas dorongan mertuanya KH Chasbullah yang kemudian direstui gurunya KH Hasyim

---

[105] Arief Mudatsir Mandan dan Miftahuddin, *Jejak Langkah Guru Bangsa Gus Dur,* h. 25.

[106] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 29.

Asy'ari, Bisri Syansuri bersama istrinya Nor Khodijah mendirikan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Pada mulanya beliau hanya menyediakan lembaga pendidikan untuk kaum pria saja, akan tetapi dua tahun kemudian KH Bisri Syansuri bersama istrinya melakukan terobosan baru dengan membuka kelas khusus untuk santri puteri.[107]

Keterlibatan KH Bisri Syansuri tidak bisa lepas dari proses Muktamar Islam Sedunia yang diselenggarakan di Makah. Dalam buku sejarah NU 1952-1967, Greg Fealy mencatat, kegagalan kaum Islam tradisionalis untuk ikut serta dalam muktamar sedunia di Makah ini, menimbulkan perasaan kecewa bagi KH Abdul Wahab Chasbullah.

Selain itu, terdapatnya respon kurang baik dari atas hal yang dianggapnya penting dalam kelangsungan muktamar tersebut, juga mendorong munculnya keinginan untuk mewujudkannya dalam suatu pergerakan tersendiri.

Berangkat dari kegagalan tersebut, kemudian memunculkan sikap tegas KH Abdul Wahab Chasbullah untuk mengambil prakarsa mendirikan apa yang kemudian dinamai "*Komite Hijaz*." Komite ini bergerak guna mencari dukungan atas apa yang dianggapnya penting dengan tujuan utama mengirimkan sebuah delegasi ke Saudi Arabia untuk memperjuangkan pendiriannya kepada Raja Abdul Aziz ibn Sa'ud.

Untuk mengumpulkan dukungan dari para kiai pesantren juga melibatkan adik iparnya, KH Bisri Syansuri. Mereka berdua menanggung beban tugas berkeliling pulau Jawa,

---

[107] Mastuki HS dan M Ishom El-Saha,ed., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), Seri 3. h.49.

menghubungi kiai-kiai dari Banyuwangi di ujung timur pulau Jawa hingga ke Menes di ujung barat.[108]

c. KH. Abdul Wahab Chasbullah

Seorang tokoh kunci yang juga mempunyai banyak pengaruh terhadap kehidupan Gus Dur adalah Kiai Wahab Chasbullah. Wahab yang dilahirkan di Tambakberas pada tahun 1883 adalah murid murid Kiai Hasyim Asy'ari dan sekaligus merupakan salah seorang keponakannya. Seperti halnya Hasyim Asy'ari dan Bisri Syansuri, Abdul Wahab Chasbullah pun menempuh pendidikan di Makah di bawah bimbingan Syaikh Chatib Minangkabau yang terkenal itu. Sebelumnya, dia berguru kepada Kiai Cholil, yang juga sama tenarnya dengan Syaikh Chatib Minangkabau, di Bangkalan, Madura. Di pesantren Kiai Cholil inilah, Wahab untuk yang pertama kalinya berjumpa dengan Hasyim Asy'ari yang merupakan salah seorang pamannya. Wahab Chasbullah berasal dari Jombang, di kota ini, ayahnya, yakni Kiai Chasbullah adalah pemilik pesantren Tambakberas. Wahab Chasbullah dan Bisri Syansuri adalah dua orang yang memiliki kepribadian berbeda, namun demikian keduanya bisa dengan cepat bersahabat dalam suatu persahabatan yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena Wahab diperintahkan oleh Kiai Cholil untuk menempuh pelajaran di Jombang di bawah bimbingan salah seorang muridnya, yakni Kiai Hasyim Asy'ari, maka Wahab pindah dari Bangkalan ke Tebuireng. Di sini dia kembali bertemu dengan Bisri syansuri selama empat tahun.[109]

Pada tahun 1914, Abdul Wahab Chasbullah kembali ke Nusantara dan menikah dengan puteri Kiai Musa yang bernama

---

[108] KH. Abdussalam Shohib,dkk, *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap,* (Jombang: Yayasan Mamba'ul Ma'arif, 2015), h. 46.

[109] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 30.

Maemunah. Sejak saat itu, beliau tinggal bersama sang mertua di Kampung Kertopaten Surabaya.

Sebagai awal dari aktivitas kemasyarakatannya di Nusantara, Abdul Wahab Chasbullah bersama KH Mas Mansyur memelopori berdirinya kelompok Tashwirul Afkar (potret gagasan) (1914). Meskipun tidak mendapatkan pendidikan modern, dalam arti pendidikan ala Barat, ide dan pemikiran-pemikiran orisinal beliau sangat segar dan hidup dalam kontek zamannya. Pemikiran-pemikiran beliau sama sekali jauh dari kesan terbelakang dan kolot, sebagaimana umumnya image yang dibangun dalam memandang masyarakat santri dengan tradisi pesantrennya. Ide dan gagasannya senantiasa mengalir dalam merespon perjalanan zaman yang terus berubah.

Secara umum ide dan pemikiran-pemikiran beliau mencakup ide tentang kebangkitan kaum ulama, ide tentang pentingnya perorganisasian perjuangan; ide tentang perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, ide tentang perjuangan untuk menggapai, mempertahankan, mengisi kemerdekaan; ide tentang pembangunan di segala bidang yang meliputi pembangunan karakter dan taraf hidup bangsa Indonesia, serta prestasi nasional demi kepentingan bersama.[110]

Bagi seorang penggerak seperti Kiai Wahab perjuangan memang telah meragasukma dalam dirinya. Sebagaimana ia tidak mengenal adanya sertifikat dan surat tugas dengan demikian juga tidak mengenal pensiun. Kapan saja sempat akan selalu bergerak, menggerakkan dunia sekelilingnya dan memberi inspirasi pada siapa saja yang dekat dan membaca pikirannya. Tidak peduli bagi orang segenerasinya atau generasi

[110] Mastuki HS dan M Ishom El-Saha,ed., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Seri 3, h. 55.

yang sedemikian jauh jaraknya. Tetapi inspirasi ibarat lorong waktu, bisa menerobos segala zaman yang telah berlalu maupun yang akan datang.[111]

d. KH. Wahid Hasyim

Ayah Gus Dur, Wahid Hasyim, dilahirkan di Tebuireng, Jombang, pada bulan Juni 1914. Ia adalah putera laki-laki pertama dan anak kelima dari sepuluh bersaudara. Menurut Gus Dur, Nyai Hasyim Asy'ari yang tiada lain adalah nenek Gus Dur sendiri, menderita sakit keras ketika sedang mengandung Wahid Hasyim. Nyai Hasyim kemudian bersumpah apabila anak yang dikandungnya ini dapat lahir dengan selamat maka ia akan membawanya ke Kiai Cholil di Madura. Nyai Hasyim Asy'ari pun akhirnya berangsur-angsur sembuh dan kemudian dapat melahirkan Wahid Hasyim tanpa kesulitan. Sesuai dengan sumpahnya, ia pun membawa anaknya ke Madura agar bisa diberkati oleh guru suaminya. Oleh banyak orang, kejadian ini dianggap sebagai pertanda bahwa si anak (Wahid Hasyim) akan menjadi orang besar.

Wahid Hasyim tidak perlu bepergian jauh untuk belajar karena ia lahir di pesantren milik salah seorang kiai termasyur di Jawa. Ayahnya adalah seorang guru yang sangat dihormati. Baginya, belajar adalah suatu hal yang serius. Akan tetapi, ia adalah juga seorang kiai yang demokratis. Ia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menentukan apa yang akan mereka pelajari. Sebagai anak kecil, Wahid Hasyim belajar membaca Al-Quran dengan suara keras dan ketika berusia tujuh tahun, ia telah dapat membaca kitab suci ini seluruhnya (tentu saja ia belum memahami bahasa Arab klasik yang digunakan dalam kitab suci ini).

---

[111]KH. Abdul Wahab Chasbullah, *Kaidah Berpolitik dan Bernegara*, (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2015), Cet. II, h. xxxiii.

Wahid Hasyim belajar di madrasah milik ayahnya. Ketika berusia dua belas tahun ia menyelesaikan pelajarannya di madrasah dan mempunyai kecakapan yang cukup untuk membantu ayahnya mengajar. Wahid Hasyim diberkati ingatan yang kuat dan gemar menghafal puisi klasik Arab. Pada usia tiga belas tahun Wahid Hasyim meninggalkan Tebuireng dan sebagimana kebiasaan santri saat itu, ia pun pergi dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Akan tetapi yang sedikit tidal lazim, dia tinggal di tiap pesantren hanya beberapa hari saja, bukan beberapa bulan, dan apalagi beberapa tahun. Setelah cukup lama berpindah-pindah pesantren untuk mendapatkan berkah dari sang kiai, ia pun cepat-cepat kembali ke Tebuireng dan dengan persetujuan ayahnya ia melakukan studi pribadi selama empat tahun.[112]

e. Hj. Solichah

Menurut Gus Dur, pada akhir tahun 1930-an, Wahid Hasyim dianggap sebagai salah seorang perjaka di Jombang yang paling diminati. Sebagai seorang yang rupawan dan cerdas, ia menerima banyak tawaran perkawinan dari keluarga-keluarga terkemuka. Selama beberapa tahun ia menolak semua tawaran ini. Akan tetapi pada suatu hari, pada tahun 1930, Wahid Hasyim, yang ketika itu berusia 29 tahun, menghadiri upacara perkawinan seorang sanak saudaranya. Di sana, perhatiannya tercuri oleh seorang gadis muda berpakian kerja biasa yang sedang membawa seember air untuk mencuci piring di dapur, jauh dibalik suasana pesta di depan. Ia adalah Solichah, puteri Kiai Bisri Syansuri. Solichah bukanlah gadis yang cantik, namun ada sesuatu dalam diri gadis ini yang mencuri perhatian Wahid Hasyim. Keesokan harinya, ia menemui Kiai Bisri dan melamar Solichah. Meskipun usia Solichah belum genap enam belas

[112] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 32.

tahun, namun menurut ukuran zaman itu, ia sudah menjelang dewasa dan siap untuk menikah, apalagi dengan seorang calon suami yang banyak diinginkan para gadis seperti Wahid Hasyim ini. Dengan senang hati, Kiai Bisri menerima lamaran itu dan pada tahun itu pula Wahid Hasyim menikahi Solichah.

Wahid Hasyim dan Solichah memang saling mencintai. Anak pertama mereka lahir pada tahun pertama perkawinan. Ketika menikah, Solichah yang masih berusia muda tidak mengenyam banyak pendidikan namun ia selalu ingin tahu dan mempunyai pikiran aktif dan keinginan kuat. Ia mendapat pendidikan di sekolah ayahnya, tetapi sebagaimana banyak pelajar madrasah lainnya, ia pertama-tama belajar membaca dan menulis dalam bahasa Arab, yang saat itu digunakan untuk bahasa Melayu dan Arab. Wahid Hasyim lantas mengajarinya membaca huruf latin, serta bahasa yang merupakan alat percakapan orang Belanda dan Indonesia, yaitu bahasa Melayu lokal yang dipilih oleh kaum nasionalis saat itu sebagai bahasa yang baru.[113]

f. KH. Ali Maksum

Beliau, Muhammad Ali bin Maksum bin Ahmad dilahirkan di Lasem, kota tua di Jawa Tengah dari keluarga keturunan Sultan Minangkabau Malaka. Putra pasangan Kiai Haji Maksum Ahmad dan Nyai Hajjah Nuriyati Zainuddin ini, dari jalur kedua orang tua beliau juga merupakan keturunan Sayyid Abdurrahman Sambu alias Pangeran Kusumo bin Pangeran Ngalogo alias Pangeran Muhammad Syihabudin Sambu Digdadiningrat alias Mbah Sambu. Garis keturunan ini banyak melahirkan keluarga pesantren yang tersebar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

---

[113] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 34.

Masa muda beliau habiskan dengan berguru dari pesantren ke pesantren. Dimulai dari ayahnya sendiri yang juga seorang kiai ulama besar, beliau kemudian nyantri kepada Kiai Amir Pekalongan untuk kemudian melanjutkan nyantri kepada Kiai Dimyati Abdullah (adik Syeikh Mahfudz Attarmasi) Tremas Pacitan Jawa Timur. Sejak di Termas inilah beliau terlihat menonjol dan akhirnya ikut membantu gurunya mengajar dan mengurus madrasah pesantren dan membuat karangan tulisan.

Tak lama setelah diambil menantu oleh KH.M. Munawwir al Hafidh Al-Muqri Krapyak Yogyakarta, beliau dibantu oleh seorang saudagar Kauman Yogyakarta untuk berhaji ke Makah. Kesempatan ini beliau pergunakan pula untuk melanjutkan mengaji tabarrukan kepada para ulama Makah ; Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasni, Syaikh Masyayikh Hamid Mannan, Syaikh Umar Hamdan dan sebagainya.

Setelah dua tahun mengaji di Makah Kiai Ali kembali ke tanah Jawa. Sedianya beliau hendak tinggal di Lasem membantu ayahnya mengembangkan pesantren. Namun, sepeninggal Kiai Munawwir Krapyak, Pondok Krapyak memerlukan beliau untuk melanjutkan perjuangan di bidang pendidikan bersama-sama dengan KH.R. Abdullah Affandi Munawwir dan KH.R. Abdul Qadir Munawwir.

Akhirnya beliau menghabiskan umur dan segenap daya upaya beliau untuk merawat dan mengembangkan Pondok Krapyak, yang pada saat diasuh mendiang Kiai Munawwir merupakan cikal-bakal pesantren Al-Quran di Indonesia.

Di bidang pendidikan pesantren, beliau merintis pola semi modern dengan sistem klasikal hingga berkembanglah madrasah-madrasah hingga saat ini. Beliau juga diminta untuk menjadi dosen luar biasa pada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di bidang kemasyarakatan dan politik, beliau pernah menjadi anggota Majelis Konstituante, sebuah lembaga pembuat Undang-Undang Dasar pada masa Rezim Orde Lama. Dalam organisasi para kiai, Nahdlatul Ulama, beliau pernah memangku jabatan Rais 'Aam Syuriyyah yang mengantarkan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama keluar dari jalur politik pada masa rezim Orde Baru.

Di sela-sela mengasuh seribuan lebih santrinya, beliau menyempatkan diri untuk memberikan pengajian di masyarakat, mengawasi sendiri pembangunan gedung-gedung pondok dan menulis kitab-kitab. Hujjah Ahlis Sunnah wal Jama'ah, Tasrif Ul-Kalimah, As Shorf Al Wadlih, Risalatussiyam, Ilmu Mantiq, adalah beberapa dari kitab berbahasa Arab susunan beliau.

Sebelum meninggal pada akhir 1989, dari sentuhan tangan beliau telah dilahirkan ratusan kiai dari ribuan santri yang mengaji pada beliau pada kurun 1946 hingga 1989. Dari keteguhan beliau, Pondok Krapyak beberapa hari sebelum beliau meninggal menjadi tempat penyelenggaraan Muktamar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, pertemuan paling bergengsi organisasi para ulama Indonesia, yang dihadiri oleh penguasa Indonesia saat itu, Jenderal Suharto.

Dari kesabaran beliau yang selama hidup dibantu oleh istrinya Nyai Hasyimah Munawwir, telah berdiri dan berkembang Taman Kanak-Kanak, Madrasah Diniyyah, Madrasah Tsanawiyyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Tahfidzil Qur'an dan Madrasah Takhassusiyah untuk para santri mahasiswa. (Afif).[114]

---

[114] Pondok Pesantren Krapyak, KH Ali Maksum, diakses pada 21 Juli 2017 dari http://krapyak.org/2010/12/25/ali-maksum-sang-pendiri/, jam 15.00 WIB.

g. KH. Chudori

KH Chudlori lahir di Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah dari pasangan Muhammad Ikhsan dan Mujirah. Ia anak kedua dari sepuluh bersaudara. Muhammad Ikhsan adalah penghulu Tegalrejo pada masa penjajahan Belanda. Ayah Muhammad Ikhsan bernama Abdul Halim, juga penghulu zaman Belanda yang sangat dihormati. Abdul Halim menangani urusan agama di Magelang meliputi kecamatan Candimulyo, Martoyudan, Mungkid, dan Tegalrejo.

Pada tahun 1923, seteleh menyelesaikan Hollandsch-Inlandsche School (HIS), lembaga pendidikan setingkat Sekolah Dasar zaman Belanda, Chudlori kecil dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh KH Siroj. Ia menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut. Kemudian pindah ke pesantren Koripan di bawah asuhan Kiai Abdan. Tapi kemudian pindah lagi ke pesantren Kiai Rahmat di daerah Gragab hingga tahun 1928.

Kehausan akan ilmu agama, ia kemudian nyantri ke Tebuireng yang waktu itu diasuh Hadrotussyaikh KH Hasyim Asy'ari. Di pesantren pendiri NU tersebut, ia mempelajari beragam kitab. Saat di Tebuireng, ayah Chudlori mengirim uang sebanyak Rp. 750,- per bulan, tetapi ia hanya menghabiskan Rp.150,- dan mengembalikan sisanya. Chudlori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Dia melakukan ini dalam rangka riyadlah, amalan yang biasa dilakukan para santri.

Cerita lainnya tentang Chudlori, di kamarnya di Tebuireng, ia membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut diantara loteng dan atap. Kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Chudlori naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak ini sempit, tidak nyaman

dan berbahaya untuk duduk. Jadi dengan kedisiplinan dia dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, dia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur.

Kemudian pada tahun 1933, ia pindah lagi Bendo, Pare, Kediri, menjadi santri Kiai Chozin Muhajir. Di situ ia belajar fiqih dan tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Empat tahun berikutnya, ia mengaji di pesantren Sedayu, belajar ilmu membaca Al-Qur'an selama 7 bulan. Pada tahun 1937, ia nyantri lagi ke Lasem, Jawa Tengah, yang diasuh KH Maksum dan KH Baidlowi.

Setelah menikahi putri KH Dalhar Watucongol, ia sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut. Namun mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-citanya yang menggebu-gebu sehingga ia selalu melakukan mujahadah dan meminta petunjuk Allah Swt untuk niatnya itu.

Setelah mendapat petunjuk dan membicarakan kepada mertuanya, kemudian pada 15 September 1944 KH Chudlori pulang kampung dan mendirikan pesantren di Tegalrejo. Masyarakat desa itu, ketika ia mendirikan pesantren, terbelah menjadi yang pro dan kontra. Kalangan yang pro gembira karena ada anak kampungnya yang menyebarkan ajaran agama. Sebaliknya yang kontra, lebih karena antipati terhadap penyebaran Islam.

Sebagai kiai yang digembleng bertahun-tahun, Chudlori tetap tegar menghadapi kalangan yang kontra. Ia tetap menjalankan misinya mengembangkan syariat Islam.

Awalnya, Chudlori tak memberikan nama khusus pada pesantrennya, namun pada tahun 1947, atas saran teman-teman seperjuangannya, ia menamainya dengan Asrama Perguruan Islam (API). Nama itu merupakan hasil istikharahnya. Dengan

nama itu, ia berharap santri-santrinya kelak akan jadi api penerang umat dalam kegelapan.

Pada tahun 1947, ketika Belanda melakukan Agresi Militer, Pesantren API menjadi benteng perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh para gerilyawan. Bahkan Chudlori yang kini sudah bergelar kiai, mengizinkan santrinya untuk turut berjuang. Aktivitas belajar-mengajar dihentikan untuk sementara waktu.

Karena perjuangan itu diketahui Belanda, pesantrennya kemudian dibakar habis. Santri, keluarga, dan Kiai Chudlori sendiri mengungsi dari satu desa ke desa lain. Kemudian di tahun 1949, ia kembali ke desanya dan mebangun kembali pesantren. Pembangunan kali ini, dibantu warga masyarakat yang telah bersimpati pada perjuangannya. Santri pun bertambah banyak. Pada tahun 1977, ia memiliki sekitar 1500 santri. Di tahun tersebut, pesantren API sedang berkembang pesat, tapi di tahun itu pula Kiai Chudlori dipanggil yang Kuasa. (Abdullah Alawi, dari berbagai sumber).[115]

2. Fase Eksplorasi (Kairo, Baghdad dan Eropa)

Makah merupakan kota yang dituju bagi orang yang akan naik haji, sementara Kairo, salah satu dari kota-kota terbesar di dunia Arab, pada tahun 1960-an merupakan kota tempat menuntut ilmu bagi para muslim Indonesia. Selama berabad-abad banyak orang pergi ke Timur Tengah, baik untuk menunaikan ibadah haji maupun untuk menuntut ilmu.

Bagi mereka, yang menjadi daya tarik terbesar kota Kairo adalah Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia yang

[115] PBNU, KH Chudlori, Santri Kelana Pendiri API Tegalrejo, diakses pada tanggal 21 Juli 2017 dari http://www.nu.or.id/post/read/71337/kh-chudlori-santri-kelana-pendiri-api-tegalrejo- jam 15.00 WIB.

sudah berusia ribuan tahun. Universitas ini berabad-abad lebih tua daripada Oxford, Cambridge, Sorbonne dan universitas-universitas tua lainnya di Eropa. Al-Azhar adalah juga pusat dari sejumlah ide yang sangat modern dari dunia Islam. Di bawah pimpinan Muhammad Abduh, salah seorang yang dikenal sebagai perintis gerakan modernism Islam, ide-ide modern itu diperkenalkan di Indonesia oleh mereka yang pernah belajar di Al-Azhar. Bahkan banyak cendekiawan muslim terbaik Indonesia berasal dari beberapa generasi mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di universitas ini.[116]

Modernisasi Islam muncul pada paro kedua abad XIX M. Bagi kaum modernis Indonesia, satu-satunya pemikir reformis yang paling penting adalah sarjana Mesir yang bernama Muhammad Abduh, yang pada awal abad XX M., mengajar di Universitas Al-Azhar (universitas di Kairo, Mesir, tempat Gus Dur belajar selama dua setengah tahun). Muhammad Abduh beragumentasi bahwa salah satu alasan utama mengapa masyarakat muslim dengan mudah ditaklukan oleh kekuatan penjajah Barat adalah karena adanya kemandegan pemikiran yang selama berabad-abad menghambat perkembangan masyarakat muslim. Pendekatan tradisionalis terhadap teologi dan yurisprudensi di dunia Arab, demikian katanya, secara fundamental bertentangan dengan inovasi dan ide-ide baru, alih-alih mendorong munculnya pemikiran kreatif. Pendekatan tradisionalis semacam itu menekankan pentingnya tunduk pada otoritas kolektif (*taqlid*). Di kalangan kaum tradisionalis, hal ini diwujudkan dalam bentuk kesetiaan pada salah satu dari empat madzhab ortodoks (aliran yurisprudensi Islam). Posisi ini, demikian argumen Abduh merupakan antitesis dari pengembangan pemikiran modern. Sudah waktunya, demikian kata Abduh, bagi "*pintu ijtihad*" atau penafsiran pribadi untuk

[116] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 87.

sekali lagi dibuka. Daripada bersikap *taqlid*, dengan hanya bergantung pada pemikiran yang sudah mapan dan sederhana maka ijtihad yang disertai dengan pendekatan yang baru dan kreatif terhadap pemecahan masalah, dan penerimaan akan pendapat yang telah mapan secara sederhana dan tanpa keraguan, haruslah menjadi dasar bagi pemikiran Islam modern. Dalam hal ini, mereka menekankan pentingnya rasionalitas dan secara lebih khusus, pentingnya mengambil pendekatan rasional terhadap penerapan ide-ide penting Islam ke dalam kehidupan modern.

Wacana Abduh mengenai *taqlid* dan *ijtihad*, terutama berkenaan dengan pemikiran teologi dan yurisprudensi. Secara naluriah, hal ini dilihatnya sebagai akar masalah yang mempengaruhi setiap cabang pencarian intelektual. Ia mengajukan argumentasinya bahwa jika kaum mempelajari ilmu Barat dan pemikiran Barat sebagai suatu kesatuan, dengan perhatian khusus pada ilmu pengetahuan, teknologi dan kedokteran maka masyarakat muslim akan mendapatkan kemajuan dengan cepat. Dikatakannya bahwa pengabdian wilayah-wilayah pemikiran modern semacam itu berarti mengambil resiko terjadinya kemandegan dan melepaskan kesempatan untuk menghapus kemiskinan dan keterbelakangan, dua hal yang secara umum diderita oleh sebagian besar masyarakat Islam.

Pada awal abad XX M. Abduh juga dengan bersemangat mengajukan argumentasi yang menyokong adanya pendekatan yang lebih modern terhadap pendidikan. Pada satu tingkat, ini merupakan metode pendidikan modern, termasuk inovasi-inovasi yang saat itu dianggap radikal, seperti penggunaan papan tulis, kursi dan meja. Kesemuanya ini sangat

bertentangan dengan madrasah tradisional (sekolah-sekolah agama yang dikenal di seluruh dunia Islam).[117]

Dalam pengalaman perjalanan belajar Gus Dur berada di Kairo menarik untuk dituturkan. Meskipun pada awalnya Gus Dur sangat bersemangat dengan studinya Al-Azhar, namun ia kemudian merasa sangat kecewa oleh karena masa keemasan Al-Azhar telah mencapai puncaknya beberapa dasawarsa sebelumnya. Pada pertengahan tahun 1960-an tingkat pertama di universitas ini tidak menawarkan banyak hal baru bagi seorang lulusan sejumlah pesantren terbaik di Indonesia.

Menurut Gus Dur, pada saat tiba di Al-Azhar ia diberitahu oleh pejabat-pejabat universitas itu bahwa dirinya harus mengikuti kelas khusus untuk memperbaiki pengetahuan mengenai bahasa Arab. Dari studinya di Jombang pada tahun 1960-an, Gus Dur sebenarnya telah mempunyai sertifikat yang menunjukkan bahwa ia telah lulus studi yurisprudensi Islam, teologi dan pokok-pokok pelajaran lain yang terkait, yang kesemuannya itu memerlukan pengetahuan bahasa Arab yang baik, namun sayangnya ia tidak mempunyai ijasah yang menunjukkan bahwa ia telah lulus kelas dasar bahasa Arab. Sebagai akibatnya, ia dimasukkan ke kelas yang benar-benar pemula. Banyak dari mereka, yang masuk dalam kelas baru itu, baru tiba dari Afrika dan hampir tidak tahu sama sekali abjad Arab, apalagi menggunakan bahasa itu dalam percakapan. Sebagai reaksinya, Gus Dur tidak mengikuti kelas itu. Diingatnya bahwa oleh karena sepanjang tahun 1964 ia hampir tidak masuk kelas pemula itu, ia pun berarti tidak melakukan studi formal.[118]

Bila Al-Azhar merupakan kekecewaan bagi seorang yang namanya Gus Dur, tapi justru sebaliknya Kairo adalah kota

---

[117] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.71.
[118] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 88.

yang sangat menyenangkan bagi Gus Dur. Di Kairo Gus Dur mendapati ia dapat menonton film-film terbaik Prancis, menikmati film-film Eropa dan Amerika. Gus Dur banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan Universitas Amerika yang ada di Kairo. Menurut Gus Dur perpustakaan ini adalah perpustakaan terbesar yang pernah dijumpai selama hidupnya saat itu, ia membaca sebanyak yang diinginkannya.

Di Kairo, Gus Dur hampir membaca semua karya William Faulkner karena keeksotikan Amerika yang dipaparkan oleh penulis di dalam novel-novelnya. Gus Dur sangat menyukai sastra Eropa terutama prosanya, ia membaca prosa dan puisi karya Edgar Allan Poe dan puisi-puisi John Donne. Dihafalkannya sebagain besar puisi Donne yang berjudul *No Man Is an Island*. Beliau juga membaca karya-karya Andre Gide dan Kafla juga karya-karya Tolstoy yang sebelumnya tak bisa diperoleh.

Pada pertengahan tahun 1966 Gus Dur mendapatkan kabar baik dengan mendapatkan tawaran beasiswa di Universitas Bagdad, kesempatan ini digunakan oleh Gus Dur sebaik-baiknya sebagai kesempatan kedua untuk belajar di dunia Arab. Universitas Bagdad telah mapan sebagai universitas Islam tetapi tidak seperti Al-Azhar. Pada pertengahan tahun 1960-an universitas ini bergaya Eropa. Universitas Bagdad ini mengambil manfaat dari kehadiran banyak akademisi terbaik dunia Arab. Ironisnya, banyak dosen favorit Gus Dur adalah orang-orang Kairo, Mesir yang pindah ke Bagdad dengan alasan karena kota ini memberikan kepada mereka kebebasan akademik yang lebih besar dan gaji yang lebih tinggi. Banyak diantara mereka adalah lulusan universitas di Eropa dan mereka mencoba untuk menerapkan standar Eropa para mahasiswa-mahasiswanya di Universitas Bagdad. Dalam hal ini, mereka tidak semua berhasil, namun keadaan dan harapan intelek para

mahasiswa jauh berbeda dari apa yang dialami oleh Gus Dur di Al-Azhar. Para mahasiswa diharapkan untuk berfikir kritis dan banyak membaca. Tugas-tugas juga harus mencerminkan hal ini. Bagi Gus Dur, yang diperolehnya adalah dorongan intelektual yang sejati dan bukan cara belajar menghafal. Ia pun harus belajar keras dan lebih teratur daripada sebelumnya.[119]

Pada pertengahan tahun 1970-an Gus Dur menyelesaikan studinya di Universitas Bagdad kemudian ia pun pindah ke Eropa. Gus Dur tinggal di Belanda mencoba mencari kesempatan untuk melakukan studi pascasarjana di bidang perbandingan agama. Akan tetapi kekecewaan yang ia peroleh karena di Leiden dan seluruh Eropa studinya di Universitas Bagdad hampir tidak memperoleh pengakuan, dengan kata lain universitas-universitas Eropa menetapkan prasyarat yang mengharuskannya untuk mengulang studi tingkat sarjana.

Gus Dur akhirnya tinggal selama enam bulan di Belanda. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk mencari tahu mengenai kesempatan untuk bisa belajar di Leiden dan di universitas-universitas di kota-kota yang berdekatan dengan Belanda dan Jerman. Selama waktu ini, ia mencari uang dengan bekerja ditempat binatu milik orang Cina. Di sini ia belajar menggosok dan melipat pakaian dengan sangat efisien dan kesemuanya itu sebagian terbantu oleh musik Janis Joplin! Dari Belanda ia pindah ke Jerman dan tinggal di sini selama empat bulan dan kemudian ia tinggal di Prancis selama dua bulan. Setelah itu, ia kembali ke Tanah Air.[120]

---

[119] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 103.
[120] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 112.

3. Fase Rekonstruksi (LSM, PBNU dan Pro Demokrasi)

Gus Dur kembali ke Jawa pada tanggal 4 Mei 1971. Diakuinya bahwa ketika itu ia dilanda kekecewaan kaeran usahanya untuk melanjutkan studi di Eropa gagal total. Namun ia menghibur diri sambil berpikir bahwa ia mempunyai kesempatan baik untuk dapat diterima di program studi Islam yang terhormat di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Gus Dur memiliki pikiran yang cerdas sehingga tidaklah sukar baginya untuk mendapatkan referensi dan mentor yang dapat menyakinkan pihak universitas bahwa ia cocok untuk studi pascasarjana di McGill. Pada saat yang sama, koneksi keluarganya mempunyai jalur ke menteri agama. Oleh karena itu, Gus Dur merasa yakin bahwa ia akan dapat memperoleh beasiswa di McGill. Universitas ini telah mempunyai kesepakatan tetap dengan pemerintah Indonesia untuk menerima kaum intelek muda Indonesia yang terpilih guna mengikuti kuliah di salah satu fakultas di IAIN, dan kemudian membimbing mereka dalam program riset pascasarjana yang memerlukan pengetahuan tentang teks-teks Islam klasik. Gus Dur merasa yakin bahwa McGill tidak akan seperti universitas-universitas di Eropa yang meragukan ijazah studinya di Baghdad.

a. Bergabung Dengan LSM

Begitu kembali tinggal di rumah ibunya di Matraman, suatu daerah dekat pusat kota Jakarta, Gus Dur ingin sekali mengetahui apa saja yang telah terjadi di tanah air ketika ia berada di luar negeri. Paling tidak ia harus menunggu satu tahun sebelum bisa bergabung dengan McGill; oleh karena itu ia mempunyai banyak waktu untuk mengunjungi pesantren-pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika itu, ia

memang banyak waktu. Nuriyah sendiri sedang menyelesaikan studinya untuk gelar sarjana muda di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karena itu, Gus Dur dan Nuriyah baru bisa mengadakan resepsi pernikahan dan memulai menjalani hidup bersama pada bulan September tahun itu. Apabila keadaan memungkinkan, Nuriyah pergi ke Jakarta untuk menemani Gus Dur dan setelah itu Gus Dur pun pergi ke Yogyakarta bersama Nuriyah. Setelah menyelesaikan seluruh mata kuliahnya, Nuriyah pun sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir. Kini jadwalnya lebih luwes dan ia pun bisa menemani Gus Dur dalam banyak kegiatan, termasuk kunjungan-kunjungan yang teratur ke Jombang.

Gus Dur sudah lama tidak tinggal di Jakarta. Terakhir kalinya ia berdiam di kota ini ketika masih menjadi seorang anak laki-laki kecil. Dikenangnya bahwa ia sangat ingin kembali ke Matraman untuk dapat berkenalan dengan komunitas intelek kota Jakarta. Beberapa bulan kemudian ia diundang untuk ikut serta dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pengetahuan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang merupakan salah satu dari sejumlah LSM penuh harapan yang lahir pada tahun 1970-an. Pada mulanya, LP3ES didanai oleh German Neumann Institute dan kemudian mendapat bantuan dari Yayasan Ford. Sebenarnya bantuan dana tersebut dimaksudkan untuk mendirikan pusat bagi riset sosial dan pemikiran kritis di Indonesia. Lembaga ini menarik bagi para intelektual muda negeri ini, terutama yang berasal dari kalangan Islam progresif dan kaum sosial demokrat, seperti Dawam Rahardjo, Adi Sasono, Aswab Mahasin dan Abdurrahman Wahid. Salah satu prestasi penting lembaga ini adalah menerbitkan Jurnal Prisma, yang selama bertahun-tahun menjadi sebuah jurnal ilmu sosial untuk Indonesia. Gus Dur pun menjadi penulis tetap jurnal ini.

LP3ES menarik bagi Gus Dur karena lembaga ini menunjukkan minat yang besar terhadap dunia pesantren dan juga ada upaya untuk menggabungkannya dengan pengembangan masyarakat. Masih diingat oleh Gus Dur betapa ia merasa terdorong oleh rasa hormat dan pengakuan yang dalam yang ditunjukkan oleh pimpinan lembaga ini terhadap apa yang dapat disumbangkan pada lembaga (pesantren) ini. Kemudian diaturlah agar Gus Dur datang di kantor LP3ES Jakarta dua minggu sekali dan bekerja di sana dua hingga empat hari tiap kalinya. Ia memberikan pemahaman kepada pihak LP3ES mengenai dunia pesantren dan Islam tradional dan dari lembaga ini pula ia belajar mengenai aspek-aspek praktis dan kritis mengenai pengembangan masyarakat. Kombinasi ini benar-benar cocok baginya. Bila sedang tidak bekerja di Jakarta, ia bebas bepergian ke Jawa. Rasa cintanya kepada rakyat dengan demikian dapat dikombinasikan secara baik dengan minat umum untuk mengunjungi tempat-tempat baru dan juga untuk, secara teratur, berziarah ke tempat-tempat lama yang menjadi favoritnya.[121]

b. Menjadi Pengurus PBNU

Gus Dur memenuhi permintaan kakeknya KH. Bisri Syansuri yang saat itu menjadi Rais 'Aam PBNU untuk bergabung di Syuriah PBNU. Ini berarti bahwa ia harus secara teratur berada di Jakarta agar dapat menghadiri rapat-rapat Syuriah PBNU dan juga untuk berkonsultasi dengan anggota-anggota Syuriah lainnya. Pengalaman ini membuatnya melihat dengan jelas cakupan dan sifat masalah-masalah yang dihadapi oleh NU dan juga memperkokoh reputasinya sebagai pemimpin muda yang penuh harapan.

---

[121] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 115.

Menjelang tahun 1982, Gus Dur erat dengan Kiai Achmad Siddiq, seorang kiai senior yang berjiwa pembaru. Kedua orang ini bekerja sama dengan baik dan berpengaruh besar di dalam Dewan Syuriah. Kiai Achmad Siddiq berusia dua puluh empat tahun lebih tua daripada Gus Dur dan ia bersikap seperti seorang ayah bagi Gus Dur. Seperti halnya Gus Dur, Kiai Achmad Siddiq juga telah banyak berfikir mengenai perlunya suatu pembaruan di dalam tubuh NU. Ia adalah seorang dari kiai NU pertama yang berbicara secara terbuka mengenai pentingnya ijtihad atau penafsiran individual terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ia juga seperti seorang perantara budaya. Ia mampu menerjemahkan ide-ide modern ke dalam bahasa Islam tradisional dan mengungkapkannya dengan cara yang dapat diterima oleh ulama yang lebih konservatif. Dia bersama Gus Dur membentuk suatu tim yang mengesankan dan banyak yang berharap bahwa keduanya akan memimpin NU di masa datang.[122]

Pada tanggal 2 Mei 1982, dua hari sebelum dilangsungkannya Pemilu, empat orang kiai senior dari Dewan Syuriah berkumpul di Jakarta dan mengunjungi Idham Chalid di rumahnya di Cipete, daerah pinggiran Jakarta. Tiga dari empat kiai ini adalah pendiri NU dan karena itu mereka sangat berpengaruh dan berkuasa. Mereka adalah guru Gus Dur, Rais Aam Kiai Ali Maksum, Kiai Machrus Ali, Kiai As'ad Syamsul Arifin dan Kiai Masykur. Ketika kiai ini bertemu dengan Idham, mereka meminta agar ia melepaskan jabatannya "dengan alasan kesehatan yang buruk". Mereka yakin bahwa NU sedang dalam saat-saat menjelang kematiannya dan bahwa perubahan kepemimpinan sangat diperlukan agar organisasi ini dapat maju. Mereka merasa bahwa para politikus dan teknokrat dalam Dewan Tanfidziyah telah terlalu lama mendominasi NU

[122] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 153.

sehingga mereka meminggirkan para ulama di Dewan Syuriah. Permintaan para kiai itu tentu saja tidak disetujui oleh Idham dan merasa tidak senang karena ditekan untuk turun dari jabatan. Permintaan para kiai ini sangatlah tidak umum. Akan tetapi, walaupun tindakan itu tidak diatur dalam Anggaran Dasar NU, namun hal itu tidaklah bertentangan dengan semangat Anggaran Dasar, yang menentukan bahwa Tanfidziyah tunduk pada Syuriah.

Sebagai akibat dari diskusi yang dilakukan antara Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq serta kiai-kiai lainnya dari Syuriah, akhirnya dibentuklah forum bagi kiai-kiai yang memiliki semangat pembaruan dan kaum intelektual muda agar mereka dapat bergulat dengan banyak hal yang dihadapi oleh organisasi yang sedang sakit ini. Forum ini terdiri dari 24 orang dan mencakup pemikir-pemikir cemerlang NU berusia muda (bersama dengan beberapa orang lainnya yang ingin mengasah senjata politiknya atau paling tidak melindungi minat mereka menjadi penyantun). Forum ini dinamakan Dewan 24 dan bertemu beberapa kali sebelum akhirnya menunjuk sejumlah anggotanya agar bekerja sama secara erat untuk menjadi ujung tombak bagi usaha reformasi. Tujuh orang termasuk Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq terpilih dan ditugasi untuk memetakan rencana pembaruan NU.

Adanya kabar bahwa Idham Chalid mengundurkan diri akhirnya terdengar pada 6 Mei tahun itu. Gus Dur dan Fahmi Saifuddin, salah seorang anggota Tim Tujuh, yaitu kelompok yang ditugasi untuk memformulasikan reformasi, memutuskan untuk mengunjungi Idham Chalid agar kemarahannya terhadap Dewan Syuriah bisa mencair. Gus Dur masih ingat bahwa ia memulai pembicaraan dengan berkata sebagai berikut: "Pak Idham, masalah turunnya Bapak sebagaimana diusulkan oleh para kiai dua hari yang lalu itu sebenarnya tidaklah

konstitutional." Idham menjawab, "Ya, tetapi saya tidak dapat menolak usulan para kiai itu. Mereka adalah kiai-kiai terbesar di NU dan Tanfidziyah selalu harus mendengar kata-kata Syuriah. Apa yang dapat saya katakan untuk membela diri di hadapan kiai-kiai Syuriah itu?" Gus Dur menjawab: "Baiklah, tetapi tindakan Bapak tidaklah konstitutional dan saya hanya akan bertindak secara konstitutional." Terima kasih, terima kasih," kata Idham. Gus Dur kemudian melanjutkan: "Pak Idham, pahamilah bahwa saya anggota Syuriah dan sebagai murid kiai senior dalam Dewan Syuriah, saya harus mengikuti kepemimpinan mereka dan tidak dapat menentang mereka."

Baik Gus Dur maupun Idham mengakui bahwa mereka sama-sama menghadapi jalan buntu. Idham tidak mau begitu saja melepaskan kekuasaannya di dalam NU, tetapi kiai-kiai Syuriah yang telah menemuinya bertekad untuk melanjutkan kepemimpinan kolektif secara sementara hingga seorang ketua baru dapat terpilih dalam muktamar berikutnya dua tahun lagi. Gus Dur menyarankan suatu kompromi yang memungkinkan kedua kubu itu bekerja sama dalam memimpin NU selama masa peralihan. Idham pun menunjukkan kesediaannya dan Gus Dur menyimpulkan seperti ini: "Baiklah, saya akan mewakili para kiai dan Bapak menunjuk Chalid Mawardi sebagai wakil Bapak. Saya akan membuka komunikasi dengan Chalid Mawardi dari saat ini hingga muktamar nanti."[123]

Pada saat muktamar yang dinanti-nanti sudah semakin mendekat, Mahbub Djunaidi, seorang pembaru yang berpengaruh dan anggota Tim Tujuh, mendekati Gus Dur dan berkata: "Baiklah, tapi saya ingin bebas memilih tim kepemimpinan saya- pilih saja Rais Aam dan saya sendiri." Ketika muktamar dimulai, Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang pesantrennya digunakan sebagai tempat muktamar, mengatakan

[123] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 158.

bahwa ia akan membentuk suatu komisi yang terdiri dari dirinya sendiri dan enam orang lainnya yang akan memutuskan komposisi kelompok kepeminpinan yang baru. Dengan menyarankan hal ini ia mengingatkan kembali akan contoh sejarah dalam pemilihan Khalifah Islam yang ketiga, dua belas abad sebelumnya, suatu citra yang sangat cocok bagi ulama NU yang muak dengan kepemimpinan teknokrat. Gus Dur setuju oleh karena itu ia berfikir hal ini hanya akan merupakan formalitas saja. Ia pun memberikan daftar anggota-anggota yang disukainya untuk duduk dalam Pengurus Besar NU. Kemudian daftar ini ditandatangani oleh Idham di sebelah kiri, oleh Munawir Sjadzali di tengah dan oleh Gus Dur di sebelah kanan. Setelah daftar ini melalui proses seperti itu, Gus Dur berharap bahwa daftar itu akan melaju tanpa perubahan.

Pagi-pagi sekali pada hari terakhir muktamar, setelah peserta muktamar secara formal mengambil keputusan munas mengenai Pancasila dan kembalinya NU ke khittah 1926, Gus Dur pergi ke Pasir Putih, kota yang letaknya sekitar 50 km. Dari Situbondo, untuk menjumpai Idham Chalid di hotelnya. Ia tiba beberapa saat sebelum fajar agar dapat melakukan pertemuan terakhir dengan Idham dan menanyakan apakah akan ada perubahan yang ingin dibuatnya terhadap daftar itu. "Tuliskanlah perubahan-perubahan apa saja di atas kertas ini dan tanda tanganilah." Idham menuliskan sebuah nama baru, untuk jabatan bendahara dan menandatangani kertas itu lagi. Gus Dur kembali ke Situbondo sekitar pukul sepuluh pagi dan setibanya di sini ia menemui Kiai As'ad di kamarnya. Kiai ini memberikan tanda tangannya juga di atas daftar yang akan membimbing dewan pemilih dalam merumuskan susunan kepemimpinan baru. Gus Dur kembali ke kamarnya dan tidur. Dan tepat pada pukul satu siang ia bangun untuk menghadiri rapat paripurna yang dilangsungkan di bawah tenda besar yang

khusus didirikan untuk muktamar ini. Kiai As'ad telah bertemu dengan enam anggota komisi lainnya. Setelah ditunggu setengah jam, mereka muncul di hadapan peserta muktamar. Kiai As'ad meminta seseorang membacakan nama-nama anggota Pengurus Besar NU yang baru. Susunan ini sama sekali berbeda dari nama-nama yang ada di daftar yang ditandatangani oleh Gus Dur. Hampir semua orang Idham telah disingkirkan dan diganti oleh orang-orang yang dipilih oleh Kiai As'ad. Gus Dur melancarkan protesnya tetapi Mahbub Djunaidi berkata: "Duduklah, terima sajalah. Kalau tidak, akan ada pertarungan sengit." Gus Dur menjawab: "Baiklah, tetapi Anda sebaiknya berbicara dengan Idham." Idham ditelpon tapi ia sudah berada di Surabaya. Katanya: "Beritahu Abdurrahman agar jangan cemas. Kami tidak akan melakukan apapun untuk menentangnya secara terbuka dan tidak akan ada pertarungan."[124]

Ketika terpilih menjadi Ketua PBNU sebagai keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, usianya baru 44 tahun. Usia semuda itu memang terasa sangat penting dalam sebuah organisasi milik para ulama seperti NU. Karena itu, tidak sedikit orang pada waktu itu berpendapat bahwa, karena nasiblah Gus Dur terpilih menjadi ketua PBNU. Kalau bukan karena cucu KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tidak akan dia memperoleh jabatan sedemikian tinggi dalam usia yang begitu muda. Malah, ketika naik tahta Gus Dur belum menyandang "gelar" haji. Gus Dur baru menunaikan ibadah haji pada 1985 itu pun lantaran dia mendapat tugas dari Majelis Ulama.[125]

Dalam usianya yang semuda itu Gus Dur diakui telah menunjukkan kematangan dan kecemerlangannya dalam

---

[124] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 168.

[125] E. Kosasih, *Hak Gus Dur Untuk Nyleneh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h.20.

berfikir. Tepat pada saat ini NU membutuhkan figur pemimpin baru yang segar dan mampu menyelamatkan harapan para kiai sepuh yang dirundung kekecewaan, kurun waktu kepemimpinan sebelumnya dianggap tidak mungkin dipertahankan lagi. Bukan hanya karena sudah terlalu lama, tetapi terutama karena Idham mengendalikan NU lebih untuk kepentingan politik praktis.[126]

Kaum pembaru yang dipimpin oleh Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq dan didukung oleh teman-teman mereka dalam Tim Tujuh dan Dewan 24, juga berargumentasi bahwa NU harus menarik diri dari politik kepartaian dan kembali ke khittah tahun 1926 yang menyatakan bahwa ia adalah organisasi soial keagamaan.[127] Kembalinya Nahdlatul Ulama (NU) ke khittah 1926 merupakan salah satu tonggak penting kepemimpinan Gus Dur selama menjadi Ketua Umum PBNU. Sejak itu, NU keluar dari arena politik dan menjadi organisasi keagamaan (jamiyyah diniyah). Komitmen yang lahir pada Muktamar ke-27 tahun 1984 itu dipandang sebagai pintu gerbang atas reaksi kekecewaan politik eksternal dan sekaligus sebagai penyelesaian konflik internal, untuk penajaman kembali arah perjalanan NU.

Persoalannya, sebagai organisasi yang anggotanya mencapai sekitar 30 juta ini, NU jelas menjadi rebutan dalam hubungannya dengan negara. Kekuasaan amat berpengaruh terhadapnya. Karena itu, penggarisan NU untuk tidak bernaung di bawah partai politik tertentu menjadi masalah bagi lingkungan eksternal. Demikian pula di lingkungan internal, bagaimana sesungguhnya acuan yang benar bagi tokoh NU khususnya ketika bersentuhan dengan politik yang riel.

---

[126] E. Kosasih, *Hak Gus Dur Untuk Nyleneh*, h.21.
[127] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 161.

Gus Dur menulis dalam artikelnya bahwa kembalinya NU ke khittah 1926 adalah untuk mengantarkan NU dari tahap politik praktis ke bentuk perjuangan kemasyarakatan semesta. NU diarahkan untuk bisa melepaskan diri dari kaitan langsung dengan politik praktis. NU tetap berpolitik, tetapi berpolitik dengan tidak merepotkan diri dengan kelembagaan politik.

Lebih lanjut Gus Dur menjelaskan bahwa penerapan politik yang lebih baik itu adalah peran transformasi, perubahan masyarakat, bahwa NU harus mempersiapkan warganya memasuki era industri tanpa kehilangan sendi-sendi keagamaan. Artinya, NU harus menciptakan di dalam dirinya momentum atau dorongan yang memungkinkan warganya menjadi manusia modern tetapi tetap Muslim yang baik dan Ahlusunnah wal Jamaah, mengikuti salah satu madzhab yang empat.[128]

Sejak menjabat sebagai ketua PBNU, Gus Dur sering terlibat dalam kritik terbuka terhadap kebijakan rezim yang berkuasa. Ia menggunakan profil publiknya untuk membantu aktivis-aktivis lain (kebanyakan dari mereka kurang dikenal dan lebih rentan terhadap intimidasi dan represi pemerintah) untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa pemerintah perlu memikirkan kembali pendekatan yang tak berperasaan dalam memberikan ganti rugi pada desa-desa yang digusur untuk pembangunan waduk Kedung Ombo. Proyek ini dikritik luas oleh karena beberapa alasan. Bagi sebagian orang, proyek ini tidak bagus bagi lingkungan. Yang lain berpendapat bahwa penyitaan tanah petani tidak adil, khususnya karena para petani ini tidak berhasil dipindahkan ke tempat lain. Penggunaan sebagaian dari tanah yang disita untuk membangun lapangan golf yang mewah merupakan bukti lebih lanjut sikap rezim Soeharto yang mementingkan diri sendiri. Gus Dur menyarankan agar sejumlah teman di Ornop untuk menulis

[128] E. Kosasih, *Hak Gus Dur Untuk Nyleneh*, h.36.

surat kepada Bank Dunia dan memberikan kepadanya garis besar rasa prihatin mereka dan meminta agar ia menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola proyek-proyek seperti itu. Walaupun surat ini merupakan prakarsa Gus Dur, namun bentuk akhir sedikit berbeda dari apa yang telah digambarkan oleh karena kata-katanya lebih keras dan secara pribadi bersikap kritis terhadap Soeharto. Karena itu, Soeharto menuntut Gus Dur agar meminta maaf, dan Gus Dur pun memenuhinya setelah ia menghadap Soeharto untuk berbicara mengenai surat itu. Namun demikian, kejadian ini membuat banyak pengkritik Gus Dur dalam NU secara terbuka mempertanyakan bukannya Gus Dur yang nanti akan menjadi semacam meriam liar yang akan membahayakan keselamatan semua warga NU.

Pada Munas NU tahun 1987, sejumlah kelompok memprakarsai gerakan untuk mencopot Gus Dur pada muktamar tahun berikutnya. Banyak politikus NU yang marah karena Gus Dur berusaha melemahkan PPP dalam Pemilu 1987. Segera setelah ini, ada kejadian lain yang terus-menerus membuat komitmen Gus Dur terhadap NU dan juga Islam dipertanyakan. Menurut Gus Dur, seorang aktivis Ornop abangan, yang juga temannya, meminta nasihat kepadanya bagaimana ia harus memberi salam pada suatu pertemuan publik oleh karena ia merasa tidak tepat menggunakan salam standar kaum muslimin, *assamu'alaikum.* Gus Dur memberi nasihat agar temannya itu tidak membiarkan dirinya tertekan dan cukup menggunakan ungkapan 'selamat pagi'. Ia menjelaskan lagi bahwa akar kata selamat sama dengan kata Arab *Salam* dan 'selamat pagi' memberi pengertian yang sama dengan ungkapan *assalamu'alaikum* (damai untuk Anda).[129]

[129] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 189.

Masa jabatan pertama Gus Dur sebagai ketua umum PBNU akan berakhir pada akhir tahun 1989. Oleh karena itu, muktamar NU direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini. Muktamar akan memilih pengurus PBNU yang baru. Sebelumnya, ada indikasi bahwa Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq akan secara otomatis terpilih kembali. Bagi banyak kalangan, mereka merupakan pasangan yang sangat serasi. Kebanyakan ulama konservatif menaruh rasa hormat yang besar kepada Kiai Achmad Siddiq karena ia dinilai sangat saleh dan menguasai ilmu agama. Para pemuda dan ulama yang lebih progresif dan kebanyakan lulusan pesantren menghargai keduanya karena kesediannya untuk membela ide-ide baru, seperti halnya ketika mereka menyambut baik dalam viutalitas intelektual dan keberanian yang telah diperkenalkan oleh Gus Dur pada organisasi.

Bahkan, mereka yang hampir-hampir tak mempunyai minat dalam hal-hal seperti itu merasa senang melihat NU mulai memperlihatkan posisinya dalam masyarakat Indonesia. Barangkali mereka sebanarnya tidak paham mengapa dunia ini sangat memperhatikan pemimpin mereka, namun demikian menyambut baik perhatian itu. Setelah sekian lama melihat NU dianggap berada di pinggiran sebagai organisasi yang tidak penting, para anggota merasa gembira karena kini NU mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pada sebelumnya. Ketua-ketua cabang NU dan pemimpin-pemimpin lainnya menyambut baik adanya dinamisme di puncak organisasi, dan mereka juga terkesan ketika Gus Dur datang jauh-jauh dari Jakarta untuk menemui mereka.[130]

Namun demikian, dua tahun terakhir Gus Dur memangku jabatannya yang pertama ini, ia semakin menjadi sosok yang kontraversial. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo makin

[130] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.203.

lantang mengkritik Gus Dur. Kiai As'ad mengumumkan niatnya bahwa ia ingin agar muktamar NU diselenggarakan di Situbondo lagi, tetapi Gus Dur dan Kiai Akhmad Siddiq enggan kembali ke sana. Keduannya justru melobi Krapyak, dan pesantren lama guru Gus Dur asuhan Kiai Ali Maksum yang akan menjadi tempat muktamar NU.

Baik Kiai Ali Maksum maupun Kiai As'ad sebenarnya sama-sama sangat dihormati sebagai anggota pendiri NU, tetapi tak disangsikan lagi bahwa Kiai Ali Ma'sum dipandang lebih tinggi karena pengetahuan dan juga otoritasnya yang karismatik sebagai guru agama. Terlebih lagi, saat itu Kiai Ali Ma'sum sedang dalam keadaan sakit-sakitan sehingga disepakati bahwa dengan menyelenggarakan muktamar di pesantren yang dipimpinnya, NU dengan tepat menghormati para pendiri NU yang masih hidup.

Seorang Ahli antropologi Belanda, yang juga lama menjadi pengamat NU, Martin van Bruinessen, hadir dalam muktamar NU tahun 1989 dan membuat cacatan yang sangat jelas mengenai jalannya muktamar tersebut. Menurutnya, dipilihnya Krapyak sebagai tempat muktamar jelas memberikan keuntungan tersendiri bagi Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq. Kiai Ali Maksum dapat diandalkan untuk membela murid lamanya, dan oleh karena itu makin sulit bagi orang untuk mengkritik Gus Dur dengan mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan dukungan dari kiai-kiai senior. Sebelumnya, Gus Dur memang terlibat dalam pertengkaran sengit dengan Kiai Ali Maksum mengenai penggunaan istilah 'selamat pagi' dan *assalamu'alaikum.* Akan tetapi setelah Gus Dur menulis surat kepada Kiai Ali Maksum untuk meminta maaf atas kesalahpahaman ini, sang kiai pun segera memaafkan murid lamanya tersebut dan hubungan keduanya kembali menjadi baik.

Sebelum muktamar NU tahun 1989, Gus Dur lebih sering mengunjungi pesantren-pesantren. Bahkan beberapa bulan ketika Gus Dur baru saja terpilih menjadi ketua umum PBNU, ia telah membiasakan untuk secara teratur berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga ke cabang-cabang NU di Sumatera Selatan, Bali, Lombok dan beberapa tempat lainnya. Hampir setiap minggu ia melakukan perjalanan dan memfokuskan diri ke cabang-cabang di luar Jawa. Ia sadar akan adanya rasa tidak puas terhadap PBNU dan karena itu ia sangat ingin menunjukkan bahwa ia mendengarkan rasa prihatin mereka dan bersimpati terhadap keluhan mereka.

Hari-hari terakhir sebelum berlangsungnya muktamar, Gus Dur diam-diam pergi ke Makah. Menurut pengamatan Van Bruinessen, sebagaimana dikabarkan oleh koran-koran bahwa di Makah ia berkunjung ke syaikh besar kelahiran Sumatra Barat, Syaikh Muhammad Yasin, atau Syaikh Minangkabau begitulah ia kadang-kadang disebut. Syaikh Minangkabau dianggap oleh kebanyakan kiai NU, termasuk yang paling konservatif, sebagai pemilik otoritas agama yang paling tinggi. Ketika Gus Dur berbicara dalam muktamar, ia tidak menyebut-nyebut perjalanannya ke Makah, apalagi pertemuannya dengan Syaikh Yasin. Ia tidak perlu membicarakan hal ini karena beritanya telah dimuat secara panjang lebar di surat kabar. Ia juga tidak menganggap perlu untuk memperkuat kesan bahwa Syaikh Yasin telah memberkatinya untuk mas jabatan kedua.[131]

Nilai penting muktamar NU tahun 1989 ditandai bukan saja oleh hadirnya Soeharto untuk membuka acara tersebut secara resmi, melainkan juga oleh hadirnya sejumlah menteri: Menteri Dalam Negeri, Rudini; Sekretaris Negara, Moerdiono; Menteri Pertahanan, Benny Murdani, dan Panglima ABRI, Try Soetrisno semua menyampaikan pidato panjang. Beberapa hari

[131] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.207.

sebelumnya, Wapres Soedarmono membuka kongres tarekat (persaudaraan Sufi tradisional yang berafiliasi dengan NU), dan organisasi-organisasi di dalam NU dan bertanggung jawab untuk mengordinasikan masalah-masalah tarekat. Sejak tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU, Idham Chalid terus memimpin serikat tarekat. Simbolisme yang diperoleh hadirnya wapres untuk membuka kongres tarekat yang jauh lebih kecil juga penting. Semua menteri senior ini mempunyai kepentingan dengan hasil muktamar, akan tetapi tiga menteri, pada khususnya, yakni Rudini, Benny Murdani dan Try Soetrisno yang diketahui memang mendukung calon-calon mereka, sangat ingin agar orang-orang mereka dapat melaju.[132]

Ketika tiba saatnya untuk memilih susunan pengurus baru untuk lima tahun ke depan. Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq menghadapi saingan ketat (dari lawan-lawannya-ed) yang dipimpin oleh Kiai As'ad syamsul Arifin, Idham Chalid dan Yusuf Hasyim. Jika pendukung-pendukung ketiga orang ini dapat dipercaya maka, menurut mereka, Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq tidaklah populer dan akan kalah dalam pemungutan suara. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam persaingan untuk posisi Rais Aam, Kiai Achmad Siddiq mengalahkan Idham Chalid dengan 188 suara melawan 116 suara. Saingan utama Gus Dur untuk posisi Ketua Umum adalah pamannya sendiri, Yusuf Hasyim. Akhirnya, Yusuf Hasyim gagal memperoleh 40 suara cabang yang dipersyaratkan agar dapat ikut serta dalam persaingan babak kedua sehingga Gus Dur pun kembali terpilih secara aklamasi.

Muktamar ini merupakan ujian berat Gus Dur. Akan tetapi, ia mampu melewatinya dan akhirnya tampil lebih kuat dalam posisinya. Kini, kepengurusan NU lebih merupakan hasil pilihan sendiri sehingga otoritasnya dalam organisasi pun makin

[132] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.208.

kuat. Terlebih lagi, keputusan-keputusan yang dibuat oleh majelis dengan kuat mendukung inisiatifnya, khususnya dalam masalah pembangunan masyarakat.[133]

Gus Dur bangga bahwa Islam di Indonesia secara keseluruhan, lebih ramah dan toleran daripada dibanyak tempat lain di dunia. Ketika ia keluar negeri selalu ingin mendorong adanya minat yang lebih besar dan pemahaman simpatik mengenai Islam yang ramah. Ia selalu mencoba untuk mendorong pemimpin-pemimpin muslim menyelesaikan masalah dengan dialog. Gus Dur sangat dihormati karena ide-idenya sebagai sumbangsih pemikiran pemecahan persoalan sebagai daya bagi tercapainya toleransi agama, perkembangan ekonomi yang adil dan demokrasi.

Gus Dur banyak mengalami ketidakpastian dan pergolakan terutama ketika dicemburuhi rezim yang berkuasa bergabung dengan Megawati Soekarno Putri. Soeharto sendiri jelas sangat khawatir bahwa Gus Dur akan mencoba untuk masa jabatan ketiga, dan bahwa Soeharto pun akan memastikan bahwa hal ini tidak pernah terjadi.

Secara sepintas, Gus Dur telah berbicara mengenai kemungkinan dirinya mengundurkan diri dari Tanfidziyah dan hanya berkiprah di Syuriah. Pada bulan Oktober ia meluncurkan ide mengenai penghapusan Tanfidziyah dan meletakkan NU hanya di bawah kendali Syuriah. Akan tetapi usulan ini tidak diterima. Dalihnya karena terdapat bahaya bahwa kepentingan politik akan kembali membajak NU, hanya kali ini kepentingan politik itu berkaitan dengan rezim yang berkuasa. Soeharto marah karena Gus Dur tidak mendorong anggota-anggota NU agar aktif dalam ICMI. Lewat ICMI-lah presiden berhasil mengkooptasi kebanyakan dari mereka yang secara militan mengkritiknya dan lewat ICMI pula ia telah

[133] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.213.

mampu merebut hati hampir separo dari seluruh umat Islam. Ia merasa jengkel karena hanya satu orang saja bisa menghalangi usaha terbaiknya untuk merebut hati seluruh umat Islam.

Tentu saja Gus Dur bukan tidak sadar akan kejengkelan Soeharto terhadap dirinya. Ia juga tahu bahwa Soeharto mungkin akan terpaksa menyingkir dari kedudukannya dalam lima tahun mendatang dan bahwa hal itu akan menciptakan peralihan politik yang penuh kekalutan. Oleh karena itu, ketika tinggal beberapa minggu sebelum muktamar NU dilaksanakan pada bulan November Gus Dur mengumumkan bahwa ia berubah pikiran dan berkeinginan untuk ikut serta dalam pemilihan ketua umum PBNU baginya untuk yang ketiga kalinya, hampir tak ada yang merasa terkejut ia mencoba membenarkan sikapnya ini dengan mengatakan bahwa ia prihatin dengan apa yang mungkin akan dialami oleh NU dalam keadaan politik seperti itu dan mengenai akan segera berakhirnya rezim Soeharto. "akan ada badai dan laut akan sangat berombak," demikian dalihnya," dan lebih daripada sebelumnya, NU akan memerlukan seorang kapten yang berpengalaman.[134]

Penentangan terbesar bagi Gus Dur mungkin datang dari luar organisasinya. Pada prinsipnya, pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua umum PBNU adalah masalah intern; namun pada praktiknya, pemerintah dan pihak militer mencoba untuk ikut memainkan peran penting. Bagimanapun, dalam organisasi lainnya atu partai politik yang kurang lebih sama besarnya dengan NU, pemerintah selalu berhasil memperoleh apa yang diinginkannya. Pada mulanya, tampak seolah-olah rezim yang berkuasa akan membiarkan NU memecahkan masalahnya sendiri. Pernyataan-pernyataan awal dari pemerintah menyarankan bahwa mungkin terdapat dukungan kecil untuk

[134] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.246.

Gus Dur. Sekretaris Negara, Moerdiono, misalnya, secara pribadi memberikan jaminan kepada para pimpinan NU bahwa presiden tidak keberatan bila Gus Dur terpilih kembali dan tidak akan campur tangan dengan kelangsungan muktamar.

Meski demikian, kampanye anti- Gus Dur dengan cepat meningkat dalm minggu-minggu sebelum muktamar. Kampanye ini dikenal sebagai kampanye ABG (Asal Bukan Gus Dur). Salah satu tokoh penting dibalik kampanye ini adalah Letjen Hartono, ketika ia menjabat sebagai Kassospol ABRI. Bersama dengan Hartono, yang juga menentang Gus Dur adalah ketua umum Golkar Harmoko, Menteri Agama Tarmizi Taher dan B.J. Habibie. Juga ada tanda-tanda yang jelas bahwa puteri sulung Soeharto, Tutut, merupakan salah satu dari mereka yang mendorong usaha untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur sendiri bersikap hati-hati dalam mengidentifikasi mereka yang berada di balik kampanye ABG.[135]

Apakah Soeharto lagi-lagi bermain ganda. Soeharto telah memberikan indikasi positif lewat Moerdiono bahwa ia mendukung Gus Dur, namun demikian ia juga tampaknya aktif dalam merekayasa kampanye menentang Gus Dur. Keadaan sebenarnya menjadi lebih jelas ketika sebagaimana biasa, Soeharto diundang untuk membuka muktamar dan memberikan pidato sambutan. Yang penting diperhatikan adalah bahwa kali ini Gus Dur mendapat tempat duduk di baris ketiga dari depan dan tidak disapa secara resmi oleh Soeharto. Walaupun secara jelas hal ini merupakan tindakan penghinaan yang sengaja, namun secara publik hanya dianggap sebagai kelalaian. Hampir separo acara muktamar dihabiskan untuk mendengarkan pidato dari menteri-menteri dan pejabat-pejabat militer. Jenderal Faisal Tandjung, waktu itu menjabat sebagai Pangab, memberikan sambutan bersama dengan 10 menteri

[135] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.249.

lainnya. Muktamar akhirnya ditutup secara resmi oleh Wapres Try Soetrisno. Pada waktu itu para anggota delegasi merasa benar-benar muak dengan pidato-pidato para menteri, dan oleh karenanya Try Soetrisno tidak diberi sambutan riuh rendah seperti yang terjadi lima tahun sebelumnya.

Muktamar di Cipasung, kota yang terletak di luar Tasikmalaya Jawa Barat, merupakan muktamar yang sungguh menyibukkan. Sebagaimana biasa, terdapat atraksi-atraksi dan stan-stan di sepanjang arena utama. Sedangkan kebanyakan pertemuan diadakan di suatu tempat di bawah atap terpal yang didirikan di halaman tengah pesantren. Akan tetapi, kehadiran banyak personil tentara dalam acara muktamar kali ini menjadikan berbeda dari muktamar-muktamar sebelumnya. Paling tidak terdapat 1500 personil berseragam yang ditugaskan di sana bersama dengan lebih dari seratus perwira intel untuk memantau situasi.

Ketegangan memuncak begitu tinggi menjelang hari terakhir muktamar ketika akan diadakan pemungutan suara untuk memilih ketua umum baru. Para peserta yang hadir pada hari itu harus melalui pemeriksaan militer sebelum memasuki arena muktamar. Begitu berada di dalam, mereka praktis terpisahkan dengan dunia luar oleh karena serdadu dan panser mengelilingi tempat itu. Para menteri dan juga pejabat ABRI datang dan pergi dengan helikopter militer. Pada malam terakhir muktamar ini, Gus Dur secara berkelakar berterima kasih kepada tentara yang telah meminjamkan serdadu tambahan kepada Banser,"pasukan" berseragam pemuda NU, Ansor. Tampaknya, banyak dari orang-orang muda berbadan kekar yang berpatroli di tempat berlangsungnya muktamar dengan menggunakan seragam Ansor sebenarnya adalah personil-personil ABRI.[136]

[136] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.251.

Pada putaran pertama pemungutan suara, Gus Dur mengumpulkan 157 suara, Abu Hasan 136, Fahmi Saifuddin 17 sedangkan Chalid Mawardi 6 suara. Abu Hasan berada dalam kedudukan yang cukup dekat untuk bisa menyerang Gus Dur. Hampir pasti 6 suara yang diperoleh Chalid Mawardi akan diberikan Abu Hasan sehingga yang akan menjadi penentu adalah 17 anggota delegasi yang mendukung Fahmi. Pendukung Gus Dur berantakan. Mula-mula mereka berharap walaupun terdapat oposisi yang kuat, Gus Dur diperkirakan dapat mengumpulkan 65 persen suara; tetapi ternyata ia bahkan tidak mampu mencapai 50 persen dalam putaran pertama ini. Para kiai tua tak lagi dapat menahan kegundahan dan mereka pun menangis, sedangkan yang lebih muda mondar-mandir kebingungan. Beberapa kiai senior yang paling dekat dengan Gus Dur diam-diam berdoa kepada Allah [dan meminta] agar Dia ikut campur dalam hal ini. Sudah jauh lewat tengah malam ketika pengitungan dimulai dan pekerjaan ini baru rampung tiga jam kemudian.

Segala sesuatunya tergantung pada beberapa jam terakhir muktamar. Jika Abu Hasan menang maka pemerintah tampaknya akan dapat menguasai NU dan vitalitas intelektual akan disapu bersih. Bagi anggota NU yang lebih muda, pengumpulan suara ini merupakan titik penentu. Kalau Gus Dur kalah, mereka akan meninggalkan NU dan memilih organisasi lain untuk berkiprah. Banyak dari mereka berkomentar bahwa tanpa Gus Dur kehilangan masa depan.

Pengambilan suara terakhir dilakukan di ruang pertemun utama yang luas. Pada malam penghitungan suara, ruang pertemuan itu penuh sesak. Suasana pun tegang. Sepanjang lewat tengah malam yang sudah masuk Selasa pagi itu tak seorang pun apa yang akan terjadi. Menjelang pukul tiga

dinihari, ketika penghitungan suara hampir rampung, ketegangan sangat terasa.

Segerombolan anggota-anggota muda usia yang berharap-harap cemas berkumpul di luar pintu ruang utama itu sambil mendengarkan penghitungan suara lewat pengeras suara. Kelihatannya, segala hal sangat mungkin terjadi bila hasil pengitungan suara itu merugikan Gus Dur. Seluruh tempat berlangsungnya muktamar dikelilingi oleh personil ABRI dan panser. Akan sukar bagi pendukung-pendukung Gus Dur untuk dapat meninggalkan tempat ini, dan oleh karena itu kemungkinan meletusnya konflik di tempat ini makin menjadi nyata.

Akhirnya, hasil penghitungan suara pun diumumkan. Gus Dur mengumpulkan 174 suara sedangkan Abu Hasan 142 suara. Ledakan kegembiraan pun menyapu ruang pertemuan itu. Di luar ruang pertemuan, kelompok-kelompok muda segera meledakkan kegembiraan dan kelegaan mereka sambil berteriak-teriak. Berpuluh-puluh dari mereka membentuk lingkaran sambil berlari berputar-putar meneriakkan yel-yel dalam bahasa Inggris: "*Soeharto has to go, Soeharto has to go* (Soeharto turun, Soeharto turun)."[137]

c. Mendirikan Pro Demokrasi

Setelah terjadinya peristiwa pembredelan tabloid Monitor dan didirikannya ICMI, Gus Dur dan sejumlah teman yang sepaham dengannya merasa prihatin dengan terus meningkatnya sektarianisme atau politik aliran. Oleh karena itu, mereka menuntaskan untuk membentuk suatu organisasi untuk membela pluralisme dan demokrasi. Pada awal tahun 1991, empat puluh intelektual yang berasal dari berbagai kelompok agama dan masyarakat di Indonesia mendirikan Forum

[137] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.254.

Demokrasi. Gus Dur terpilih menjadi ketua dan juru bicara forum ini. Ketenaran dan pengaruh Gus Dur akan membuat organisasi baru ini mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu juga karena Gus Dur sukar dibungkam oleh rezim yang berkuasa oleh karena itu ia mempunyai basis massa yang luas di NU. Para intelektual yang bergabung dalam Forum Demokrasi dengan hati-hati menunjukkan bahwa mereka bukanlah kampanye atas dasar partai politik dan bahwa mereka juga tidak berharap akan dapat, demikian jelas Gus Dur, Forum Demokrasi didirikan untuk memberikan kekuatan pengimbang terhadap lembaga-lembaga seperci ICMI yang mendorong tumbuhnya pemikiran sektarianisme. Forum Demokrasi, demikian katanya, akan berkampanye menentang pemanfaatan politis sentimen aliran. Pada tahun 1950-an, kebanyakan partai politik dibentuk berdasarkan garis agama atau ideologi dan dalam waktu yang cukup lama hal ini dianggap sebagai perkembangan politik yang wajar. 'Politik yang berdasarkan keyakinan' seperti itu, demikian jelas Gus Dur, pada dasarnya bersifat sektarian, tidak sehat dan antidemokrasi.

Dalam sebuah tulisan yang muncul tak lama setelah terbentuknya Forum Demokrasi, Gus Dur menjelaskan mengapa ia memandang penting tegaknya demokrasi. "Sayang sekali, masalah sektarianisme ditangani seolah-olah ia merupakan masalah pokok, atau seolah-olah penyebab, bukan akibat. Sebenarnya, inti masalahnya adalah kurangnya demokrasi dan kebebasan."

Forum Demokrasi merupakan kelompok kecil yang kebanyakan anggota-anggotanya bukan tokoh-tokoh menonjol. Kebanyakan dari mereka bukan dari NU dan malah bukan pula muslim banyak diantaranya beragama Katolik atau Protestan, dan sebagian mempunyai latar belakang sosialis. Dua dari tokoh pentingnya adalah Marsillam Simanjuntak, seorang

aktivis sosial yang lantang dan Bondan Gunawan, seorang Jawa abangan yang juga aktif dalam masyarakat sipil. Sebagian orang dalam NU mengkritik Gus Dur karena ia bergabung dengan kelompok ini. Mereka mengatakan, jika Gus Dur
Ingin membuat kelompok yang akan bisa mendorong NU untuk bertindak lebih keras, sebenarnya ia dapat memilih orang-orang dalam NU sendiri untuk mendukungnya. Akan tetapi Gus Dur memang lebih senang mempunyai lingkup perkawanan yang luas, yang berasal dari beragam masyarakat, agama dan intelektual. Bergabungnya Gus Dur dalam Forum Demokrasi dan keanggotaan forum ini yang berasal dari berbagai kelompok agama dan masyarakat memang disengaja. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa terdapat basis-basis lainnya, di samping agama dan suku bangsa, untuk mendirikan organisasi secara politik.

Ironisnya, semakin besar rasa tidak senang yang ditunjukkan oleh rezim yang berkuasa terhadap Forum Demokrasi, organisasi ini justru menjadi makin populer dan makin sering ditulis orang di media massa. Bagi sebuah kelompok dengan jumlah anggota yang sekecil itu dan dengan sedemikian sedikit kegiatan formal, atau dengan sedemikian sedikit pernyataan mengenai posisi mereka yang disusun dengan sangat hati-hati. Forum Demokrasi memang mempunyai profil tersendiri. Dengan semakin dekatnya Pemilu Juni 1992, rezim yang berkuasa menjadi semakin terganggu oleh hadirnya Forum Demokrasi sehingga mereka tidak jarang membubarkan pertemuan-pertemuan kecil organisasi ini umumnya dengan alasan bahwa pihak penyelenggara tidak mempunyai "izin yang sesuai."[138]

[138] Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h.226.

B. Pokok-pokok Pemikiran Gus Dur tentang Ekonomi Kelautan

Dalam pandangan Gus Dur krisis ekonomi yang menghantam perekonomian Indonesia di tahun 1997 telah mengakibatkan turunnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.[139]Untuk mampu melepaskan diri dari jeratan krisis harus mampu meningkatkan sumber daya manusia dan mengoptimalkan sumber daya alam untuk menyusun agenda pembangunan baru yang akan merupakan rintisan bagi penciptaan peradaban baru ekonomi kelautan Nusantara.

Dengan memperhatikan tradisi keilmuan Gus Dur, rumusan pemikiran Gus Dur ekonomi kelautan secara konsepsional adalah sebagai berikut:

1. Paradigma Ilmu Ekonomi Kelautan Gus Dur

Dalam pandangan Islam, tujuan hidup perorangan adalah mencari kebahagian dunia dan akhirat yang dicapai melalui kerangka peribadatan kepada Allah Swt. Terkenal dalam hal ini firman Allah melalui kitab suci Al-Quran: "Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Ku (*wa ma khalaqtu al-jinna wa al-insa illa liya'buduni*)" (QS.Adz-Dzariyat [51]:56). Dengan adanya konteks ini, manusia selalu merasakan kebutuhan akan Tuhan, dan dengan demikian ia tidak berbuat sesuka hati. Karena itulah, akan ada kendali atas perilakunya selama hidup, dalam hal ini adalah pencarian pahala/kebaikan untuk akhirat, dan pencegahan sesuatu yang secara moral dinilai buruk atau baik di dunia. Karena itulah do'a seorang muslim yang paling tepat adalah "Wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*rabbana atina fi ad-*

[139] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h.v.

dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan)" (QS.Al-Baqarah [2]:201).

Yang digambarkan di atas adalah kerangka mikro bagi kehidupan seorang Muslim di dunia dan akhirat. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang disimpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.

Karena manusia adalah bagian dari sebuah masyarakat, maka secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri. Terkenal dalam hal ini ungkapan: "Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan. (*La Islama Illa bi Jama'ah wala Jama'ata Illa bi Imarah wala Imarata Illa Bi Tha'ah*)." Dengan demikian, kedudukan dan tugas seorang pemimpin sangat berat dalam pandangan Islam. Dia harus menciptakan kelompok yang kuat, patuh dan setia pada kerangka peribadatan yang dikemukakan Islam. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki strategi yang jelas agar tercapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini diungkapkan dengan indahnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sedang dalam bahasa Arab, seorang pemimpin harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran atau "*al-maslahah al-âmmah*".[140]

Hal penting selanjutnya yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang benar dalam memerintah adalah orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala macam kebijakan pemerintah,

---

[140] Ahmad Suaedy dkk., *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi Abdurrahman Wahid,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h.161.

tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini sejak kemerdekaan negara kita, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan dalam prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa, yang berarti orientasi ekonomi ini kurang menyentuh ekonomi masyarakat kecil, maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi pembangunan. Pembangunan ekonomi sudah saatnya diarahkan pada pembangunan ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Karena struktur geografis Nusantara terbesar terdiri dari lautan, sudah tentu kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, maka program-program pembangunan ekonomi baiknya mengakar pada perekonomian berbasis kelautan.

Sudah saatnya Indonesia untuk melakukan reorientasi pembangunan perekonomian nasionalnya dari perekonomian berbasis daratan menjadi perekonomian berbasis kelautan. Ini karena sesuai dengan struktur geografis Indonesia yang 75% wilayahnya (± 3,1 juta km persegi) terdiri dari laut. Kekayaan laut Indonesia sangat melimpah. Mulai dari ikan, binatang laut yang dapat dimakan dan dipelihara, sumber minyak, tambang dan mineral lainnya hingga turisme. Potensi kekayaan alam ini hingga kini belum dieksploitasi secara optimal.[141] Begitu besar karunia Allah Swt. yang ada pada lautan, sebagaimana berfirman:

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

[141] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.73.

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." (QS. An-Nahl [16]: 14).

Secara jelas dan tegas menurut pakar kelautan Indonesia saat ini Rokhmin Dahuri, banyak faktor yang menyebabkan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lainnya di Asia, dan hingga kini belum menjadi negara maju dan makmur. Namun yang paling mendasar adalah karena selama ini kita belum memiliki visi dan rencana pembangunan nasional yang komprehensif, tepat dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Setiap ganti pemerintah, gubernur, dan bupati/walikota, berganti pula kebijakannya. Pemimpin pemerintahan yang baru, baik tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota cenderung menegasikan kebijakan dan program pembangunan dari pemimpin sebelumnya. Sehingga, akumulasi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi sangat lambat. Ibarat membangun istana pasir.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, rata-rata 5,8 persen pertahun selama sepuluh tahun terakhir, ternyata sebagian besar berasal dari konsumsi, ekspor sumber daya alam (SDA) mentah (tidak diolah lebih dahulu, sehingga nilai tambahnya rendah), dan investasi asing portofolio, bukan *foreign direct investment*. Contohnya, sekitar 70 persen dari seluruh ekspor Indonesia berupa komoditas, seperti CPO (Crude Palm Oil), batubara, bahan tambang dan mineral lainnya, udang, tuna dan rumput laut. Sebaliknya produktivitas dan daya saing

kebanyakan sektor ekonomi Indonesia justru masih sangat rendah (Mc Kinsey,2012).[142]

Seiring dengan penemuan dan kemajuan di bidang teknologi, lebih-lebih pada kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, maka terjadi suatu pergerakan atau perpindahan manusia, komoditas, barang, dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain di bumi semakin mudah dan cepat, seakan dunia ini tanpa sekat. Kecenderungan global dengan rezim perdagangan bebas yang dianut oleh hampir semua negara-negara di dunia telah dan akan terus mengakselerasi serta memperluas perdagangan barang dan jasa antar negara, yang pada gilirannya akan melipatgandakan aktivitas produksi, konsumsi dan transportasi dari semua komoditas.

Sisi yang lain, pembangunan ekonomi yang tidak inklusif, tidak berkeadilan, merusak lingkungan dan menjurus kearah yang tidak berkelanjutan (*unsustainable development*) yang dipertontonkan oleh model pembangunan kapitalisme yang hanya sekedar memuaskan nafsu hedonisme dan materialisme manusia semata. Kapitalisme memandang bahwa kekayaan, SDA dan atribut kebendahan (duniawi) adalah milik manusia bukan ciptaan dan titipan amanah dari Allah Swt. Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta. Kapitalisme tidak menghadirkan Tuhan dalam mengelola pembangunan ekonomi dan kehidupan manusia, akibatnya dengan kekuatan modal untuk mengalahkan persaingan tidak sehat dengan manusia lain. Padahal manusia atas karunia alam yang ada hanya sekedar sebagai wakil, karena Allah Swt. adalah pemilik mutlak terhadap alam semesta ini, firman Allah:

---

[142] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, (Bogor: Roda Bahari, 2016), Cet V, h. 4.

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

"Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." (QS. An-Najm [53]: 31).

Secara makroekonomi Indonesia memang merupakan salah satu dari sedikit negara berhasil di tengah krisis ekonomi global. Permasalahnnya dan tantangannya adalah bahwa faktanya angka pengangguran dan kemiskinan masih begitu tinggi, kesenjangan antara kelompok kaya vs miskin semakin lebar, disparitas pembangunan antar wilayah masih sangat tinggi, dan daya saing ekonomi serta IPM masih rendah. Semua indikator itu menggambarkan bahwa fundamental ekonomi kita sejatinya masih sangat rapuh.

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi, rata-rata 5,4% per tahun dalam sepuluh tahun terakhir, tidak dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Jawabannya jelas, pertama bahwa pertumbuhan ekonomi itu kurang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi selama dekade terakhir sebagian besar dihasilkan dari sektor finansial dan sektor riil non-tradable (seperti konstruksi, angkutan, pasar swalayan / malls, dan hiburan), yang sedikit sekali menyerap tenaga kerja. Selama ini setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 150.000 tenaga kerja (aviliani, 2012). Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas tersebut sebagian besar berlangsung di kota-kota besar dan Pulau Jawa serta kebanyakan hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas.

Sektor-sektor ekonomi riil tradable, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pariwisata, dan industri manufakturing, justru tumbuh sangat lambat. Padahal sektor-sektor riil tradable ini

dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sekitar 500.000 orang untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi (Bappenas, 2008). Lebih dari itu, hamper semua kegiatan sektor ekonomi riil tradable ini terdapat di wilayah-wilayah pedesaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan serta dapat dikerjakan (dinikmati) bukan hanya oleh warga negara kelas ke atas, tetapi juga oleh rakyat biasa atau kelas bawah yang umumnya berpendidikan dan berketrampilan rendah (miskin).[143]

Perkembangan masyarakat di Nusantara tentang pola hidup, sejarah mencatat ada dua pola macam yang saling berlawanan. Satu bertumpu pada pertanian dengan ciri utamanya adalah lapangan hidup utama para penduduk adalah bercocok tanam lebih muda kita sebut dengan masyarakat agraris, sedangkan yang sebuah lagi bertumpu pada arus perdagangan / niaga dengan pulau-pulau lain.

Sejarah riset yang menyajikan contoh kongkrit tentang sain berkembang, yaitu perkembangan pengetahuan ekonomi kelautan Nusantara. Perkembangan ekonomi kelautan Nusantara menjadi bagian komponen fakta perjalanan hidup Gus Dur itu sendiri. Dengan kesadaran struktur geografis Nusantara sebagai negara kepulauan, kuatnya pengetahuan sejarah kejayaan Nusantara, adanya anomali kuatnya budaya pembangunan kontinental yang ujungnya mengekploitasi alam sekuat-kuatnya hingga diturunkan konsep ekonomi kelautan sebagai solusinya.

Dalam perkembangan ekonomi kelautan Nusantara secara sederhana, Gus Dur dengan mengistilahkan dengan "*pola kehidupan*" yang mempunyai hubungan yang nyata secara revolusioner dapat dinyatakan adanya fase normal kelautan

[143] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Cet V, h. 12.

Nusantara, fase anomali dan terjadinya krisis serta fase munculnya revolusi ekonomi kelautan.

a. Fase Normal Kelautan Nusantara

Selama empat puluh tahun terakhir, telah dilakukan riset terhadap sejarah Crivijaya (Sriwijaya). Hasil yang dicapai kadang kala spektakuler, terutama yang dicapai oleh ilmuwan Perancis, Coedes yang karyanya berjudul "*A Romance of Scholarship*". Baru setelah kebangkitan kerajaan ini yaitu sekitar awal abad ke-11, sumber-sumber Cina dan Arab mulai mengungkapkan peran spesifik wilayah Indonesia. Selama ratusan tahun, pusat pemerintahan Kerajaan Buddha Sriwijaya yang terkenal ini berada di kota Palembang modern. Dalam beberapa hal, kerajaan ini dianggap sebagai pendahulu Malaka. Karena Sriwijaya menguasai sebagian besar wilayah pesisir Timur Sumatera dan juga sebagian Semenanjung Malaya, kerajaan ini mengendalikan Selat Malaka sama seperti yang dilakukan Malaka di masa selanjutnya. Bahkan kekuasaan Sriwijaya dianggap jauh lebih luas karena Jawa bagian Barat menjadi negara vassal (*lindungan*) sehingga Selat Sunda juga berada di bawah kendalinya. Di Semanjung Malaya, pengaruhnya meluas hingga Ligor yang terletak dekat Tanah Genting. Pengaruh juga meluas ke pusat perniagaan lama di Kedah. Namun, kekuatan Sriwijaya yang sebenarnya adalah penguasaan kedua sisi Selat Malaka.[144]

Sementara itu di bumi Jawa, dengan mulai melemahnya kerajaan Singasari, berdirilah kerajaan Majapahit dengan pendirinya Raden Wijaya. Baru pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi wilayah Majapahit yang awalnya

---

[144] Melink Roelofsz, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500-1630,* penerjemah Tim Komunitas Bambu, (Depok: Komunitas Bambu, 2016), h. 11.

hanya meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian meluas hingga ke daerah Sumatera. Para sejarawan juga banyak yang mengatakan bahwa, era Tribhuwana Tunggadewi adalah masa perluasan wilayah Majapahit ke pelbagai penjuru. Perluasan wilayah ini adalah wujud kongkrit dari "*Sumpah Palapa*" yang diikrarkan Patih Gajah Mada.

Dengan melihat letak geografis kerajaan itu dekat sungai besar seperti Brantas, tidak salah juga menyimpulkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang berpola hidup niaga laut. Penulis tidak tahu, sampai seberapa jauh munculnya orientasi niaga laut ini dipengaruhi oleh sisi Buddha dari kaum Hindu Buddha, yang bercampur dengan orientasi kaum Sufi dari tarekat Qadiriah. Yang jelas pengaruh angkatan laut Majapahit, dengan Bendera Merah Putihnya segera memiliki kawasan sangat luas.

Tradisi Majapahit yang berorientasi niaga laut, diteruskan oleh Kesultanan Demak. Dengan demikian kita dapat melihat tokoh seperti Adipati Unus (*nama sebenarnya Adipati Yunus*), tercatat berperang melawan pihak Portugis di Selat Malaka. Dan para Sultan Demak memelihara kontak dengan pihak pihak kesultanan lain di kawasan Nusantara dan *Verenigde Oost Indische Compagpagnie* (VOC).

Gus Dur mengungkapkan bahwa sejarah membuktikan bahwa kejayaan bangsa kita diwaktu yang lalu berakar di laut. Dengan dasar pembangunan berbasis kelautan kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada waktu itu sangatlah luar biasa. Bahkan dengan berbasis kelautan inilah agama Islam berkembang pesat di wilayah kita ini.[145]

b. Fase Anomali dan Terjadinya Krisis

[145] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* (Jakarta: Teplok Press, 2004), h.vii.

Perkembangan setelah naiknya Panembahan Senopati Ing Ngalaga Sayyidin Panatagama Kalipatullah Ing Tanah Jawi yaitu gelar Sutawijaya, ke atas tahta kerajaan di Pajang menjadi berbeda sama sekali. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Pajang: di sebelah Timur Bengawan Solo ke Plered, Bantul (daerah di Yogyakarta sekarang). Dengan perpindahan itu, maka kesultanan/kerajaan yang tadinya masih berorientasi niaga-laut, akhirnya menjadi kehilangan arah sama sekali, apalagi Senopati harus melakukan konsolidasi atas kekuasaan yang direbutnya itu. Waktunya hampir secara keseluruhan disita oleh kegiatan dalam rangka konsolidasi militer itu.[146]

Perubahan orientasi pola hidup lebih nyata lagi saat kesultanan di bawah pemerintahan anaknya, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Perubahan orientasi hidup dari masyarakat berorientasi niaga-laut, sekaligus berubah menjadi masyarakat agraris. Pola niaga-laut dihancurkan total dalam struktur kekuasaan yang dimilikinya, seperti institusi bea cukai/kantor syahbandar menjadi terhenti sama sekali, pembuatan kapal-kapal laut jarak jauh yang baru terhenti secara keseluruhan. Tetapi yang lebih mendasar adalah penyiapan struktur baru yang akan melayani kepentingan-kepentingan masyarakat agraris.

Badan-badan negara yang mengatur pengairan sawah, pengenaan pajak yang lebih teliti, penyiapan angkutan hasil-hasil pertanian ke pasar dan jalan-jalan transportasi di seluruh negara memperoleh perhatian utama sedangkan alat-alat angkutan sungai dan laut dibiarkan bertambah merosot kwalitasnya.[147]

---

[146] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h.31.

[147] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h.33.

Perkembangan selanjutnya, pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Di tanah air, peristiwa ini membuka peluang sejarah yang langka bagi bumi Nusantara. Pada masa kekosongan kekuasaan terjadi, para pejuang bangsa Indonesia dengan cerdas menangkap peluang emas uantuk menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Pada saat pemerintahan Presiden Soekarno peristiwa-peristiwa politik mendominasi pentas di sisa dasawarsa 1950-an masalah ekonomi makin terpinggir "*Politik adalah Panglima*" adalah ungkapan yang sering terdengar pada waktu itu. Keadaan ekonomi terus memburuk, tetapi energi bangsa banyak tersita oleh persoalan politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi parlementer menguat dan keadaan ekonomi yang semakin berat.

Akhirnya setelah enam bulan setelah peristiwa 30 September 1965, suasana politik masih sangat tegang dan tidak menentu, sementara birokrasi pemerintahan tidak jalan. Keadaan politik sedikit lebih tenang setelah *de facto* Jenderal Soeharto memegang kendali (Supersemar, 11 Maret 1966) dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh presidium Kabinet Soeharto-Sultan Hamengku Buwono IX-Adam Malik. Sejak itu, rezim Orde Baru secara bertahap mengkonsolidasi kedudukan politiknya.

Indonesia sempat dijuluki oleh Bank Dunia sebagai salah satu "*macan Asia*" bersama-sama dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand. Namun demikian, pencapaian kinerja perekonomian nasional tersebut pada tingkat makro menyembunyikan sejumlah persoalan. Strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan pemerintah menciptakan inefesiensi dan distorsi pasar, baik pasar output maupun pasar input. Walaupun baru disadari setelah dilanda krisis keuangan Asia pada 1987/1988, strategi pembangunan ekonomi Orde Baru

menciptakan biaya ekonomi yang sangat tinggi dan memperbesar jurang antara kaum miskin dan kaum kaya.

c. Menuju Revolusi Ekonomi Kelautan

Bertolak dari kondisi yang carut marut perekonomian Indonesia, Gus Dur bersama gerbong NU-nya menciptakan model perekonomian kerakyatan untuk merespon kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Kemudian karena kecerdasan Gus Dur membaca potensi geografis alam Indonesia, beliau mengungkapkan bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak 1997 diperlukan reorientasi basis/dasar pembangunan ekonomi, yaitu dari ekonomi berbasis daratan menjadi ekonomi berbasis kelautan. Harus diakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia 75% terdiri dari laut. Sayang potensi ekonomi laut belum dimanfaatkan secara optimal. Mestinya ekonomi berbasis kelautan menjadi primadona pembangunan perekonomian nasional.[148]

Pada sudut pandang pengamatan yang lain Gus Dur melihat kuatnya budaya pembangunan kontinental yang ujungnya mengekploitasi alam sekuat-kuatnya, hutan-hutan dibabat oleh para pemegang HPH (Hak Penguasahaan Hutan), izin tambang-tambang yang akhirnya merusak lingkungan. Maka tinggal kekayaan lautlah yang seharusnya menjadi dasar bagi kebangkitan kembali ekonomi kita sebagai bangsa. Kita harus memulai kembali menyusun tata niaga laut kita, guna menghindari pengurasan kekayaan laut untuk kepentingan orang lain.[149]

---

[148]Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h. vi.

[149] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h.66.

Ekonomi berbasis kelautan harus menjadi primadona pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu program-program pembangunan ekonomi harus mengakar pada perekonomian berbasis kelautan. Atau bahasa tehnisnya, *backward* dan *forward linkages* antar berbagai sektor di perekonomian nasional harus mengakar pada ekonomi berbasis kelautan. Ini berarti ekonomi berbasis daratan juga harus mengacu ekonomi berbasis kelautan. Termasuk di dalamnya pertanian, perkebunan, industri dan lain sebagainya. Ringkasnya dapat dikategorikan menjadi ekonomi sektor riil, keuangan, industri, tenaga kerja, dan perdagangan internasional.

Sektor riil mencakup manufaktur hingga pertanian dan perkebunan. Sektor manufaktur harus diarahkan pada produksi supra dan infrastruktur angkutan laut yang harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Ini termasuk produksi dari berbagai sarana pengangkutan laut, peralatan pelabuhan dan sebagainya. Sementara itu, sektor pertanian dan perkebunan harus diperluas jangkauannya hingga mencakup perikanan darat(*on land aquafarming*). Hal ini secara otomatis akan menciptakan kesempatan kerja alternatif bagi para petani yang jumlahnya sudah melimpah ruah(*over crowded*) dibandingkan dengan lahan pertanian yang ada, khususnya di pulau Jawa.[150]

Untuk mengatasi masalah ini kita harus merombak seluruh aturan main di sektor manufaktur dengan arah acuannya adalah ekonomi berbasis kelautan. Tentu saja harus sesuai dengan kaidah ekonomi pasar yang bertujuan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ambil contoh produksi makanan. Ini harus diarahkan untuk memproduksi makanan yang bersumber dari laut. Dengan jumlah pulau yang kita miliki lebih dari 17.000 maka bila produksi makanan ini tersebar di perbagai

[150] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h.75.

pulau tentu saja akan menciptakan stimulus bagi tenaga kerja untuk melakukan transmigrasi secara suka rela. Penyebaran penduduk semakin merata dan selanjutnya ini akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Sektor keuangan, industri, dan perdagangan. Pembiayaan dari sektor keuangan bank dan bukan bank harus diarahkan pada pengembangan sektor industri dan perdagangan yang berbasis ekonomi kelautan. Hingga saat ini pembiayaan dari lembaga keuangan bagi nelayan dan kegiatan-kegiatan usaha yang berbasis kelautan masih amat sedikit dibandingkan dengan pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi yang berbasis daratan. Saat ini juga belum tampak program pembiayaan yang komprehensif untuk pengembangan usaha yang berbasis kelautan.[151]

Dari uraian diatas menunjukkan fakta adanya pola-pola yang dapat direduksir menjadi suatu pemikiran Gus Dur pada ekonomi kelautan. Perubahan pola-pola kehidupan dari normal selanjutnya terjadi penyimpangan yang memuncak adanya anomali dan krisis baru akhirnya muncul konsep pemikiran baru sebagai akibat dari revolusi.

2. Laut adalah Komoditas Publik

Harus diakui laut adalah komoditas publik (*public goods*), artinya manfaat laut itu milik rakyat (Musgrave dan Musgrave). Contoh, setiap sungai pasti bermuara di laut jadi sisa air mandi kitapun pasti akan bermuara ke laut. Kenapa laut merupakan komoditas publik? Ini karena manfaat laut tidak bisa dibatasi hanya untuk segelintir orang saja. Misalnya, seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pemandangan indah pantai, memancing ikan, melakukan olahraga laut dan lain sebagainya

[151] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*, h.77.

di seluruh pulau dan pantai yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari :

ِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُفِى ثَلَاثٍ فِى الْمَاءِوَالْكَلَاءِوَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ

اَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput hutan dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah)."

Karena manfaat ini bersifat publik maka laut dikatagorikan komoditas publik. Jadi sudah merupakan tugas negara untuk menjaga kebersihan, mengamankan dan menyelamatkan dari segala bentuk polusi laut demi kesejahteraan rakyat. Dari mana sumber dana pemerintah untuk pembiayaan itu. Tak lain ini dari pajak yang kita bayar. Ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan dan lain sebagainya.

Selain aspek pembiayaan, diperlukan juga pengaturan pengelolaan laut untuk kesejahteraan rakyat. Ini mencakup seperangkat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Menteri, Gubernur dan Bupati. Seluruh aturan main tersebut haruslah saling terkait sehingga manfaat laut memang betul betul untuk sesejahteraan rakyat.[152]

[152] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.82.

Wilayah laut merupakan sumber daya milik bersama alias tidak ada individu/perusahaan/koperasi yang memilikinya (*a common property resource*). Sebagai konsekuensinya, jika tidak diatur secara tepat dan bijaksana oleh suatu pemerintahan, baik melalui pendekatan hukum (*command and control*) maupun pendekatan ekonomi, maka pola (*regime*) pemanfaatannya pun akan mengikuti pola akses terbuka (*open access*). Siapa saja, kapan saja dan berapa saja boleh menangkap ikan dari laut, membuang limbah ke laut, dan lain sebagainya. Apabila pola pemanfaatan SDA semacam ini diteruskan tanpa pengendalian maka akhirnya akan terjadi pencemaran, overfishing, degradasi fisik ekosistem laut (seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuary), abrasi, pengikisan keanekaragaman hayati, pemusnahan jenis (*Species extinction*), kerusakan lingkungan dan musnahnya ikan serta biota-biota laut lainnya.

Lebih jelasnya pendapat Rokhmin Dahuri dalam pengaturan pengelolaan kelautan, ia menyatakan Indonesia tidak boleh mendasarkan pembangunan ekonominya pada mahzab kapitalisme (*neoliberal*) maupun sosialisme (*komunisme*). Pasalnya kedua mahzab ekonomi tersebut terbukti telah gagal membawa umat manusia pada tujuan hidup hakikinya, yakni kehidupan masyarakat yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan damai. Matinya komunisme sejak 1989 bersamaan dengan runtuhnya emperium Uni Soviet, krisis yang terus berulang melanda negara-negara blok kapitalisme, mulai dari *the Great Depression* 1930 hingga krisis ekonomi yang menerpa AS sejak 2008 dan Eropa yang sampai sekarang belum berakhir adalah merupakan bukti empiris tentang kegagalan dari kedua mahzab ekonomi itu.

Mahzab ekonomi yang mestinya pedoman kita adalah ekonomi Pancasila atau Ekonomi Syariah. Suatu mahzab ekonomi yang meniscayakan pemerintah (negara) melakukan

intervensi secara tepat dan benar pada sektor sektor publik, yang menyangkut kehidupan rakyat (*public*) seperti sektor kesehatan, pendidikan, bahan pangan pokok, dan kekayaaan alam (migas, bahan tambang, dan mineral lain, air, hutan dan laut).

Adapun sektor-sektor maupun kegiatan ekonomi yang secara fitrah (*natural*) cukup diatur oleh mekanisme pasar, maka harus diserahkan kepada mekanisme pasar, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Pemerintah (negara) dibolehkan melakukan intervensi (campur tangan), apabila terjadi distorsi pasar, misalnya monopoli, monopsoni, praktik dumping oleh negara lain dan subsidi terselubung terhadap suatu sektor ekonomi di negara lain yang mengekspor produksinya ke Indonesia.[153]Dalam kontek ini Allah Swt. sudah memberikan isyarat, firman:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

> *"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (QS. Ali Imran [3]: 104).

Mahzab ekonomi Pancasila meyakini, bahwa semua materi, kekayaan, dan barang ekonomi lainnya adalah hahekatnya milik Allah Swt. sementara kita sebagai manusia harus memposisikan bahwa semua harta, benda, dan barang ekonomi lainnya yang kita miliki hanyalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan bumi dengan segala isinya.

---

[153] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Cet V, h. 19.

Semua kekayaan, keuntungan, usaha, barang ekonomi yang kita miliki selain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita secara wajar, juga harus digunakan untuk menolong kepada sesama yang membutuhkan, sebagai sarana ibadah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad Saw., "Apakah kebaikan di dalam islam itu?" Nabi Saw. menjawab, "memberi makan orang lain dan memberi salam kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kau kenal."[154]

Memang dalam hal pengelolaan laut pemerintah memberikan hak khusus atu konsesi kepada seseorang atau badan usaha tertentu. Misalnya konsesi penangkapan ikan dan binatang laut lainnya yang dapat dimakan serta dipelihara dan pengelolaan pantai untuk dijadikan kawasan pariwisata. Pemberian konsesi ini sudah pasti menjadikan pemilik hak konsesi itu mengkonversi laut dari komoditas publik menjadi komoditas privat. Artinya manfaat laut itu tidak lagi menjadi milik publik, masyarakat luas, tapi menjadi milik si pemegang konsesi. Adapun masyarakat yang ingin ikut menikmati manfaat itu harus membayar kepada si pemegang konsesi.

---

[154] Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* Penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), Cet.II,h. 15.

Misalnya, si A diberi konsesi untuk pengelolaan pantai untuk dijadikan kawasan rekreasi, penginapan dan olahraga pantai di utara Surabaya. Maka masyarakat luas yang tadinya gratis datang ke pantai tersebut sekarang bila ingin ikut menikmati pantai tersebut harus membayar pada si A. apakah ini adil? Tergantung. Bila ternyata biaya yang dipungut oleh si A tersebut sangat mahal sehingga hanya masyarakat strata ekonomi atas yang dapat menikmatinya maka sudah tentu tidak adil. Jadi biaya tersebut harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat luas sekitar kawasan pantai tersebut.[155]

3. Nilai Tambah Ekonomi Kelautan

Berangkat dari cakupan ekonomi kelautan yang sangat luas sehingga sulit untuk menghitung nilai ekonomis dari seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kelautan. Lebih mudahnya Gus Dur mendefinisikan ekonomi kelautan " seluruh aktivitas ekonomi yang nilai tambahnya terkait langsung dengan laut." Lebih lanjut dapat dikategorikan bahwa kegiatan- kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut mencakup (1) turisme, (2) aquakultur, (3) pengangkutan (*shipping*), (4) pabrik dan perawatan kapal (*boat, ship building and maintenance*), (5) pertahanan dan keamanan (*military*), (6) bioteknologi dan pendidikan.

Dampak dari laut terhadap kegiatan-kegiatan yang sulit dihitung nilai ekonominya dapat dikelompokkan menjadi eksternalitas posisitif dan negatif. Yang posisitif misalnya pemendangan pantai yang indah. Bagi negara-negara berkembang, laut juga erat dengan aktivitas spiritual. Ini terkait dengan dengan kepercayaan kekuatan alam gaib laut. Adapun yang negatif, misalnya, gelombang besar sehingga

[155] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.83.

mengakibatkan banjir. Jasa laut lainnya yang sering dilupakan oleh manusia adalah laut sebagai tempat pembuangan limbah cair. Hebatnya, limbah ini mencakup seluruh lini sektor ekonomi mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, industri dan jasa.[156]

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki sektor maritim yang luas yang dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dari sektor maritim antara lain menyumbangkan: 1) integrasi ekonomi dari kepulauan, dengan pergerakan komoditas yang diperdagangkan dan tenaga kerja yang bebas hambatan antara pulau-pulau; dan 2) integrasi sosial dan politik dari bangsa dengan pergerakan warga negara yang bebas hambatan diantara pulau-pulau untuk berbagai tujuan.

Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu "*laut utama*" atau *heart of sea* tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai *sea sistem* yaitu laut Jawa, laut Flores dan laut Banda. Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Bahkan Houben menyatakan bahwa laut Jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi kawasan Asia Tenggara.[157]

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 5.4 juta km,

---

[156] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.90.

[157] Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), h. 89.

mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7.1 juta km. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Klasifikasi potensi tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angina dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*); dan sumber daya tidak terbarukan (*non renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0.9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budadaya moluska (kekerangan, mutiara dan teripang), dan budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa), kolam air tawar dan mina padi di sawah, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan.

Selain itu juga terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi (1) pengembangan pulau-pulau kecil, (2) pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, (3) pemanfaatan air laut dalam (*deep sea water*), (4)

industri garam rakyat, (5) pengelolaan pasir laut, (6) industri penunjang dan (7) keanekaragaman hayati laut.

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah lingkup tugas KKP dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US$82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15.1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46.7 miliar per tahun, potensi perairan umum sebesar US$ 1.1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun. Potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5.2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun.[158]

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam. Dengan luas lautan hamper 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14 pesen dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Kekayaan spesies terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya tampak berlimpah di perairan Alor, Nusa Tenggara Timur. Segitiga terumbu karang tersebut juga sebagai hutan amazon di bawah laut (*Amazon of the Seas)* mencakup wilayah perairan tengah dan timur Indonesia, Timor Leste, Filipina, Sabah-Malaysia, Papua Nugini, dan kepualauan Salomon diperkirakan dihuni sekitar 3000 spesies ikan.

Kekayaan laut Indonesia sangat memiliki potensi yang tinggi, baik dari segi perdagangan hasil laut, maupun dari segi pariwisata. Dengan keanekaragaman dan berlimpahnya

---

[158] Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal KKP, 2010), h. 19.

kekayaan laut, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya untuk diolah sebagai bahan makanan. Ikan-ikan Indonesia sudah banyak di kirim ke Jepang, China, Korea dan beberapa negara lain di benua Asia dan bahkan sudah menembus benua Amerika.

Dari segi pariwisata, Indonesia banyak memiliki tempat-tempat wisata laut menarik, antara lain: Kepulauan Seribu, taman laut Bunaken, keindahan laut Lombok, Bali, dan banyak tempat wisata laut menarik lainnya. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing maupun lokal, untuk berkunjung ke Indonesia.[159]

4. Integrasi Ekonomi Kelautan di Lautan India

Di lautan India terdapat 47 negara yang sangat bervariasi baik itu dalam hal kebudayaan, jumlah penduduk, kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Dari 47 negara tersebut yang paling besar penduduknya adalah negara India, lebih dari 1 milyar dan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah negara Seycheles, 80 ribu. Adalah fakta bahwa dunia semakin penuh sesak oleh manusia (*increasingly more crowded world*). Pada tahun 1950 penduduk dunia 2,5 milyar orang, lalu membengkak menjadi 6,1 milyar orang pada tahun 2000 (UN, 2002). Kemudian, tahun lalu penduduk dunia menyentuh angka 7 milyar jiwa. Pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8 milyar orang, dan di akhir abad-21 akan sekitar 10-12 milyar orang (UN,2011). Jumlah penduduk dunia yang terus bertambah dan pendapatan (kualitas hidup) nya yang juga meningkat sudah barang tentu akan melipatgandakan

[159] Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), h. 110.

kebutuhan manusia terhadap bahan pangan, energi, air, dan berbagai jenis SDA lain beserta segenap produk turunannya.[160]

Adapaun dalam hal ekonomi tenggang produk domistik bruto mulai dari US$ 250 milyar, misalnya India dan Australia hingga kurang dari US$ 400 juta, misalnya Maldives dan Commoros. Sedangkan dari ukuran pendapatan per kapita, negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya adalah Australia, lebih dari US$ 15 ribu dan yang paling kecil dari US$ 250, misalnya Mozambique, Tanzania, Madagascar dan Bangladesh. Sedangkan Indonesia berada dikisaran US$ 650 hingga 700 per kapita.

Lautan India ini sejak 4 ribu tahuan yang lalu telah menjadi alur perdagangan antar negara-negara yang berada di cakupan laut tersebut. Mungkin bukan berlebihan bila dikatakan bahwa negara-negara ini di waktu itu merupakan negara-negara yang paling tinggi tingkat kebudayaan, pemerintahan dan kemajuan ekonomi. Tak berlebihan juga bila diperkirakan lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta arus modal serta integrasi ekonomi di kalangan negara-negara yang berada di kawasan lautan India akan tumbuh pesat dan menjadi salah satu sentra kekuatan ekonomi tersendiri. Ini karena:

1) Dinamika pertumbuhan ekonomi di negara-negara Australia, Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand.
2) Pergeseran kekuatan dari pemerintahan autarki menjadi demokratis. Alhasil ini memacu pergeseran ekonomi autarki menjadi ekonomi berbasis pasar yang menjadi dasar perdagangan internasional dan globalisasi perekonomian dunia.

[160] Rokhmin Dahuri, MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Cet V, h. 6.

Pada saat ini diperkirakan perdagangan antara negara-negara di kawasan lautan India telah mencapai sekitar 25 persen dari seluruh perdagangan dunia.[161]

Wilayah NKRI yang diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia merupan *choke point* yang sangat menentukan pergerakan kapal-kapal perang maupun niaga dan dinamika politik global, khususnya potensi konflik antara negara-negara besar seperti AS, China, Jepang, India dan ASEAN. Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia dan penentu dinamika iklim global.

Bila kita mampu membangun wilayah pesisir dan lautan serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya secara produktif, efesien, inklusif, dan ramah lingkungan. Maka, kita akan mampu mengatasi sejumlah permasalahn utama bangsa, seperti pengagguran dan kemiskinan, kesenjangan antara kelompok kaya vs miskin kian melebar, disparitas pembangunan antar wilayah, buruknya konektivitas dan sangat mahalnya biaya logistic (26% PDB), gizi buruk, dan rendahnya daya saing serta IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia.[162]

5. Kerjasama Ekonomi Kelautan di Lautan Pasifik

Fakta menunjukkan bahwa perekonomian di kawasan lautan Pasifik di saat ini dan lebih-lebih di masa mendatang memegang peranan yang sangat penting dalam percaturan perekonomian global. Negara-negara yang termasuk di kawasan ini antara lain Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong (RRC),

---

[161] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.96.

[162] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Cet V, h. 51.

Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, RRC dan negara-negara bagian di kawasan pantai barat Amerika Serikat.

Selama dasawarsa 1970 dan 1980 perekonomian di negara-negara tersebut secara rata-rata tumbuh di ats 6-7 persen per tahun. Ini lebih dari tiga kali lipat pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Walaupun demikian di dasawarsa akhir 1990 pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan akibat dilanda krisis ekonomi. Tapi di millennium 2000-an pertumbuhan ekonominya kembali bangkit. Harus diakui pula bahwa jurang kekayaan ekonomi diantara negara-negara di kawasan ini sangat lebar. Jepang pendapatan per kapitanya lebih dari US$ 25.000 pertahun. Sedangkan negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia masih berkutat di bawah US$ 1.000 per tahun.

Dalam hal ekonomi kelautan negara-negara di atas memegang peranan yang besar. Secara keseluruhan perekonomian negara-negara tersebut (APEC) menyumbang 75 persen dari keseluruhan penagkapan ikan dan menyumbang 90 persen dari hasil aquakultur di seluruh dunia. Lebih dari itu, APEC juga mengkonsumsi lebih dari 70 persen hasil tangkapan ikan dan hasil laut lainnya yang dapat dimakan di seluruh dunia. Upaya melakukan kerjasama dan selanjutnya integrasi pembangunan ekonomi kelautan dimulai sejak dasawarsa 1990. Mulai dari Deklarasi Bogor, Osaka, Hawaii dan Montreal (2001). Dan hingga saat ini forum kerjasama ini masih terus berlanjut secara intensif.

Negara-negara APEC tersebut sadar bahwa potensi laut mereka amatlah besar. Untuk itu kerjasama dan integrasi ekonomi kelautan di dasari pada pendekatan *eco-system* baik dalam hal menajemen pembangunan kelautan dan pantai. Jadi

ini tidak terbatas pada pendayagunaan potensi kekayaan laut dan pantai tapi juga mencakup lingkungan hidup.[163]

Mencermati perkembangan baru dalam kawasan ini, Presiden Republik Rakyat China (RRC), Xi Jinping, dalam sebuah pidato kebijakan luar negerinya dihadapan pertemuan Partai Komunis China (PKC) yang digelar di Beijing pada 28-29 November 2014, Xi Jinping dengan tegas akan melindungi kedaulatan teritorialnya, termasuk hak maritim, kepentingan dan persatuan nasional.

Ketegasan China melindungi kedaulatan teritorialnya sepertinya tidak bisa dipisahkan dengan atau setidaknya akan memperkuat rencana Beijing membentuk "Sabuk Jalur Sutra Ekonomi dan Jalur Sutra Maririm Abad Ke-21" (*The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritim Silk Road*). Kampanye tentang jalur perdagangan modern abad ke-21 ini dilakukan Presiden Xi Jinping dalam berbagai forum internasional sejak 2014. Jalur pelayaran perdagangan yang menghubungkan kota-kota pelabuhan dari Asia, Afrika, dan Eropa ini disebut-sebut sebagai kelahiran kembali dari jalur sutra perdagangan utama, ratusan tahun silam, di mana China juga menjadi penguasanya kala itu.

Sebagai negara yang berada dalam satu kawasan dengan China, di Asia Pasifik, Indonesia perlu melihat secara kritis kebijakan Negeri Tirai Bambu tersebut, baik yang berkaitan dengan persoalan hak maritim maupun jalur sutra maritim.[164]

---

[163] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.102.

[164] Simela Victor Muhamad, "Kepentingan Maritim China di Kawasan dan Respon Indonesia," dalam Poltak Partogi Nainggolan, ed., *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*,(Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015), h.127.

6. Pemikiran Pertahanan Negara Republik Indonesia.

Dalam sebuah kunjungan ke komplek KOSTRAD di Cilodong, penulis diminta naik dalam PANZERO/*Personal Carier* (kendaraan berlapis baja) penulis sebagai Presiden bertanya kendaraan itu buatan mana dan tahun berapa. Ketika dijawab kendaraan itu buatan Perret dari Inggris tahun 1950 penulis tidak habis pikir, bagaimana hal itu bisa terjadi. Begitu juga, ketika penulis mengunjungi Komplek Korps Marinir (AL), penulis mendapatkan keterangan tank-tank amphibi kita adalah buatan Rusia tahun-tahun 1960-an penulis spontan menjawab, kita harus membeli tank-tank amphibi baru bagi pertahanan kita di masa depan. Dalam anggapan penulis, betapa mahalnya sekalipun pertahanan kita harus dibiayai demi keutuhan teritorial negara kita.

Penulis beranggapan demikian, karena hal itu adalah keharusan mutlak bagi kita semua keseluruhan pemikiran kita sebagai bangsa, haruslah diabadikan kepada kepentingan negara dan bangsa bukannya ambisi politik perorangan maupun kepentingan komersial siapapun. Karena itu, sebagai Presiden, dalam masa 20 bulan, penulis melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak delapan puluh kali alias rata-rata 4 negara tiap bulan. Tujuan utamanya bukanlah untuk berbelanja ataupun melancong (Toch penulis tidak dapat melihat negara yang dikunjungi). Melainkan untuk meminta dunia internasional menghargai keutuhan teritorial kita sebagai bangsa dan negara.[165]

Salah satu gagasan cemerlang saat ini yang mendapat dukungan publik dengan penuh antusiasme dari sebuah kebijakan yang sangat berani, tegas dan konsisten. Dalam hal

[165]Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.109.

penegakan kedaulatan dan pelestarian, pemerintah telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang cukup bagus, antara lain pemberantasan *Illegal Fishing*, moratorium kapal ikan bekas asing, larangan alih muatan ikan di laut (*transhipment*), larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh mayoritas nelayan kita dan larangan menangkap lobster, rajungan dan kepiting ukuran tertentu.[166]

Atas nama keselamatan negara dan bangsa itu, penulis beranggapan bahwa pulau Biak di Irian Jaya harus dijadikan Pangkalan Udara Utama (LANUMA) untuk Indonesia bagian Timur, di samping LANUMA Iswahyudi di Maospati Madiun. Hal ini dibenarkan dalam kenyataan sekarang AURI membentuk dua buah gugusan Koperasi untuk negara kita, yaitu Komando Operasi bagian Indonesia Timur dan Komanda Operasi Indonesia Barat walaupun masih tetap menggunakan sebuah pangkalan udara utama yaitu Iswayudi tersebut. Ini berarti, jika nantinya Angkatan Udara mempunyai anggaran cukup besar, akan didirikan LANUMA lagi di kawasan Indonesia Timur.

Demikian juga pikiran kita tentang pembinaan Angkatan Laut juga harus mengalami perubahan. Jika sekarang kita memiliki dua armada, yaitu Armada Barat dan Armada Timur, haruslah dari sekarang dikembangkan pemikiran tentang Armada Tengah, di samping kedua armada di atas. Armada Barat berpangkalan di Kepulauan Riau, Armada Tengah berpangkalan di Bitung (Sulawesi Utara) dan Armada Timur di kawasan Maluku. Dilengkapi pesawat angkut berukuran sedang (beserta lapangan-lapangan udaranya) dan Helikopter untuk

[166] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Cet V, h. 52.

membawa satuan-satuan tempur ke daerah-daerah kerusuhan dengan cepat.[167]

8. Pembaruan dan Kepresidenan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang Pemilu dengan perolehan 153 kursi di DPR mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden sebagaimana hasil salah satu keputusan kongres PDI Perjuangan di Bali bahwa ketua umum terpilih adalah calon presiden dari partai (Forum,No.08/30/5/1999:29). Dalam proses pencalonan itu, PDIP kurang melakukan kerjasama dan koalisi dengan partai-partai lain. Konsekuensinya, muncul koalisi partai-partai berbasis Islam Poros Tengah yang mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai alternatif di luar Megawati Soekarnoputri dan B.J. Habibie. Puncaknya persaingan elit politik pada 20 Oktober 1999 mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan memperoleh dukungan 373 suara dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden memperoleh 313 suara dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya. Lima suara dinyatakan abstain (Kompas,21/10/1999).

Setelah sidang Paripurna DPR/MPR 20 Oktober 1999 mengesahkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4, gemuruh takbir dan salawat mengumandang di gedung wakil rakyat tersebut.[168] Proses reformasi yang terus bergulir menuju tatanan demokrasi semakin memperlihatkan perkembangan yang positif. Ciri politik yang otoriter, arbitrer (sewenang-wenang), dan sentralistik semakin berkurang digantikan dengan sistem politik pemerintahan yang terbuka,

---

[167] Abdurrahman Wahid dan Hendi Kariawan, *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan,* h.111.

[168] Mudjia Rahardjo, *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa Dalam Wacana Politik Gus Dur*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 2.

egaliter dan demokratis. Perkembangan ini tentu memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi.

Visi perekonomian ketika Gus Dur memerintah menarik untuk dikaji karena kental dengan sifat ekonomi prorakyat, visi ekonomi Gus Dur ketika itu adalah membangun ekonomi yang berbasis pada kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia yang masih tertinggal, tidak mampu, dan miskin. Tiga golongan tersebut harus mendapat perlindungan dari pemerintah dan diberdayakan melalui manajemen dan modal dari pemerintah. Visi ekonomi yang benar-benar prorakyat bahkan almarhun Nurcholis Madjid memuji visi ekonomi Gus Dur. Cak Nur mengatakan, "visi ekonomi Gus Dur bukan saja sebagai payung tapi sebagai alat penunjuk jalan, padoman kerja secara abstrak yang diterjemahkan dalam strategi, kebijakan, program kerja dan anggaran."

Keunikan lain dari Gus Dur sebagai mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentunya tingkat pemahaman agama Gus Dur pasti mendalam tetapi beliau memandang ekonomi syariah dengan pola yang berbeda dari kebanyakan ulama memandang, ini nampak dalam tulisan beliau yang berjudul "Syariatisasi dan Bank Syariah", dalam paparan di tulisan tersebut, Gus Dur menyimpulkan bahwa "bank pemerintah telah mendirikan bank syariah, sesuatu yang masih diperdebatkan. Bukankah bank syariah menyatakan tidak memungut bunga (interest) tetapi menaikan ongkos-ongkos (bank cost) diatas kebisaan yang layak? Bukankah dengan prinsip demikian terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termonitor, sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja sebuah bank yang sehat. Lalu, bagaimana halnya dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuah bank agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin." Nampak

jelas bahwa Gus Dur tidak terlalu antusias terhadap sistem ekonomi syariah yang saat itu sedang populer.[169]

8. Membentuk Departemen Eksplorasi Laut

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari

[169] The Wahid Institute, Gagasan Gus Dur Untuk Ekonomi, diakses pada 23 November 2017 dari http://kocida.wahidinstitute.org/2014/01/16/gagasan-gus-dur-untuk-ekonomi/, jam 14.00 WIB.

Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.[170]

Keputusan bersejarah ini menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan. Selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, orientasi pembangunan negeri ini selalu berpijak pada konsep daratan (kontinen). Cukup lama bangsa ini berpaling dari laut. "Orang darat" beramai-ramai menjadikan laut sebagai halaman belakang rumah. Orang darat ramai-ramai menguras terumbu karang dengan bahan peledak dan bahan beracun sianida, serta melakukan penambangan karang untuk bahan bangunan. Hutan bakau dikonversi jadi

[170] Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses pada 23 November 2017 dari http://indonesia.go.id/?p=1523, jam 13.30 WIB.

lahan tambak, industri, permukiman, kebutuhan bahan bakar, arang, dan bahan bangunan. Erosi pantai juga merajalela karena dikonversi untuk peruntukan lain. Ujung dari semua aktivitas ini, ekologi wilayah pesisir digerus habis-habisan, rusak parah dan amat rapuh.

Keputusan membentuk Departemen Eksplorasi Kelautan telah membangkitkan bangsa ini dari amnesia kolektif tentang laut. Keputusan Gus Dur berhasil mengangkat isu kelautan kembali ke arus utama. Penggunaan kosakata "eksplorasi" mengingatkan bahwa laut telah ditelantarkan, bahkan dilupakan. Laut adalah ladang penghidupan yang belum digarap serius. Bangsa ini disadarkan oleh Gus Dur bahwa ekonomi kelautan sampai saat ini dapat ditamsilkan sebagai raksasa tidur. Potensinya belum diolah menjadi sebuah kinetika yang mendinamiskan perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat.

Mungkin tidak akan ada Departemen Kelautan dan Perikanan jika tidak dibentuk oleh Gus Dur. Sebagai negara bahari (luas lautnya tiga kali luas daratan) dan negara kepulauan dengan lebih dari 17.400 pulau, Indonesia kurang memperhatikan potensi yang luar biasa ini. Nasib jutaan nelayan dan masyarakat pesisir tak jauh berbeda dengan petani. Sebelum era Gus Dur, masalah kelautan hanya jadi retorika. Pembentukan kementerian kelautan sebatas wacana. Sektor kelautan dan perikanan tak dianggap penting. Akibatnya, pelabuhan perikanan terlihat kumuh, tempat pendaratan dan pelelangan ikan kalah jauh dibanding negara-negara tetangga. Cina, Thailand, India, Jepang, dan Filipina, yang luas lautnya

jauh lebih kecil dari Indonesia, bisa menjadi eksportir perikanan terkemuka.[171]

9. Membentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI)

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, secara resmi membentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI). Pembentukan DMI didasarkan pada Keppres No 161 Tahun 1999 yang dikeluarkan di Jakarta, 13 Desember 1999. DMI itu sendiri diketuai langsung oleh presiden dengan ketua harian yang merangkap anggota Menteri Negara Eksplorasi Laut Sarwono Kusumaatmadja.

Disebutkan dalam Keputusan Presiden tersebut, Dewan Maritim Indonesia berfungsi sebagai forum konsultasi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Oleh karena itu, dewan ini merumuskan kebijakan kewilayahan nasional, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dalam rangka pembangunan.

Fungsi yang lain, dewan juga bertugas memberikan suatu pertimbangan kepada presiden mengenai hal-hal kelautan dan hal lain atas permintaan presiden, melakukan konsultasi dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan di bidang kelautan, serta mencari pemecahan masalah dan mengevaluasi kebijakan di bidang kelautan. Pembentukan Dewan Maritim Indonesia itu mengacu pada berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 sejak tanggal 16 November 1994. Untuk itu diperlukan berbagai langkah penanganan menyeluruh, terpadu dalam meningkatkan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan laut,

---

[171] Tempo, Gus Dur dan Amnesia Kelautan, diakses pada 04 September 2017 dari https://www.tempo.co/read/kolom/2010/01/09/124/gus-dur-dan-amnesia-kelautan, jam 16.30 WIB.

dan pengelolaan wilayah laut nasional secara komprehensif, terpadu, serasi, efektif, dan efisien.

BAB IV
RELEVANSI PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN

Tidak ada kata terlambat. Dengan modal dasar pembangunan yang sangat besar dan bonus demografi yang kita miliki hingga tahun 2017 total populasi jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Indonesia mestinya mampu melaksanakan transformasi struktural ekonomi dengan gemilang. Pemerintah harus dapat melakukan revitalisasi seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi ekonomi yang produktif, efisien, berdaya saing, berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*). Pemikiran Gus Dur "*Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*" menunjukkan gagasan dalam kultur tradisionalisme pemikiran yang rasionalis dan transformatif. Pemikirin ini mengajak untuk adanya pembangunan ekonomi yang inklusif dengan mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, yang dapat menghasilkan ratusan jenis produk ekonomi dan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dalam kontek kekikinian, tanpa menggeser latar historis pemikiran Gus Dur tentang Ekonomi Kelautan tersebut, penulis tesis melakukan rekonstruksi pemikiran dengan memaknai teks-teks pemikiran sekaligus

mendialogkannya dengan realitas saat ini. Adapun deskripsi reformulasi pemikiran adalah sebagai berikut:

A. Pembangunan Ekonomi Kelautan Inklusif dan Sustainable

Berawal dari sifat manusia yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Hal ini sudah merupakan dimensi biologis dan psikologis manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Kebutuhan hidup tersebut manusia harus berusaha dan berdoa dengan cara dan upaya terntentu.

Dengan adanya keterbatasan sumber-sumber inilah yang menyebabkan manusia mulai berfikir, bagaimana cara untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Proses berfikir dan cara untuk memenuhi kebutuhan itulah yang akan menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, termasuk proses perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakatnya. Perkembangan masyarakat ini pada dasarnya adalah proses perubahan, dimana pembangunan sendiri adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Berangkat dari sini, penulis berpendapat pembangunan ekonomi kelautan itu karakteristiknya harus mengandung pola:

1) Pembangunan Ekonomi Inklusif

Konsep ekonomi inklusif itu sendiri dibangun di atas dasar dua konsep lainnya, yakni inklusif dan pembangunan, dan inklusif adalah proses sekaligus sebuah tujuan. Inklusif adalah mengenai sebuah masyarakat atau komunitas yang sedang berubah untuk mengakomodasi perbedaan-perbadaan yang ada di tengah masyarakat dengan menghilangkan semua rintangan yang ada yang mendiskriminasi atau membuat individu-individu / kelompok-kelompok masyarakat tertentu menjadi eksklusif.

Inklusif melihat masyarakat, bukan orang secara individu, sebagai masalah.

Menurut International Disability and Development Consortium (IDDC), pembangunan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlihat sepenuhnya di dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok/kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan.

Sementara itu, menurut Rauniyar dan Kanbur (2009), pembangunan ekonomi inklusif merujuk kepada sebuah pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang. Pembangunan ekonomi inklusif fokus pada penciptaan kesempatan ekonomi dan aksesnya bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan, kelompok atau tingkatan, tidak hanya bagi kaum miskin. Sebuah pembangunan ekonomi dikatakan inklusif ketika semua anggota dari sebuah komunitas berpartisipasi di dalamnya dan berkontribusi yang sama terhadap proses tersebut tanpa melihat kondisi atau latar belakang pribadi mereka. Dalam cara yang sama, pembangunan ekonomi inklusif adalah sesuatu yang menekankan bahwa peluang ekonomi tersedia sebanyak mungkin bagi semua, terutama kaum miskin. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi inklusif adalah sebuah proses penjaminan bahwa semua kelompok yang tersisikan atau termarjinalkan dari sebuah komunitas ikut terlibat atau termasuk di dalam proses pembangunan tersebut. Karena ekonomi inklusif melibatkan semua anggota dari sebuah komunitas, maka kolaborasi, kemitraan dan jaringan kerja sesama anggota di dalam komunitas tersebut adalah strategi inti

untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.[172] Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Swt. memerintahkan sebagaimana firman-Nya:

....وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

> *"….Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…."*(QS. Al-Ma'idah [5] : 2).

Untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi inklusif, diperlukan perencanaan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang memadai. Permasalahn infrastruktur menjadi perhatian mengingat tantangan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang semakin dekat, Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat infrastruktur. Pasalnya, banyak investor menilai lambannya kemajuan infrastruktur menjadi bahan pertimbangan untuk merealisasikan investasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mengurangi pengangguran dan pekerja di sektor informal. Pembangunan sektor ini juga merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan. Bagaimanapun, bagi kalangan investor maupun pelaku usaha, *cover value* daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, menengah maupun infrastruktur teknologi. Hasil riset ilmiah terkait infrastruktur disejumlah negara berkembang menunjukkan bahwa mereka memerlukan penggunaan sekitar 9% dari PDB untuk dapat mengoperasikan,

[172] Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, (Jakarta: LP3ES, 2016), h. 11.

memelihara, atau merawat dan membangun infrastruktur jika negara berkembang tersebut hendak meraih peringkat Milllinnium Development Goals (MDGs). Meski Indonesia bukan kategori negara miskin, kondisi infrastrukturnya terlihat masih memprihatinkan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fisik dan nonfisik kurang memadai. Padahal kondisi ekonomi yang telah berkembang saat ini mutlak memerlukan pengembangan infrastruktur di berbagai sektor. Mengutip laporan *World Economic Forum* mengenai kualitas infrastruktur pada 2012-2013, kualitas infrastruktur Indonesia hanya memperoleh nilai peringkat 92. Nilai itu dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur berupa kondisi jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan listrik.[173]

Dengan melihat kondisi tersebut pembangunan ekonomi inklusif dengan dukungan pembangunan infrastruktur, penulis tesis senada dengan Prasetyantoko, dkk.(2002), pembangunan inklusif adalah untuk semua orang, tidak peduli latar belakangnya, agamanya, sukunya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Tiap orang/warga negara memiliki hak yang sama, seperti hak mendapatkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, perumahan yang baik, dan juga peluang mendapatkan pekerjaan yang yang baik. Namun, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang sama, termasuk membayar pajak bagi mereka yang sudah bekerja atau memiliki usaha yang memberikan penghasilan.[174]

---

[173] I Wayan Rusastra, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015), h. 4.

[174] Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, h. 11.

2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable*)

Dalam pembanguan penulis melihat, sebenarnya merupakan suatu proses multi dimensional yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka untuk memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah tertentu dan dari waktu ke waktu.

Menurut ketua *World Commission on Environment And Development* (WCED) Gro Harlem Brundland dalam Baker (2006), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak saja harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ingin menyelaraskan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yang di dalamnya termasuk sosial ekonomi, dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan.[175]

B. Pengembangan Transportasi Laut

Laut sebagai sarana sebagaimana diangkat dalam pemikiran Faisal Basri memberikan gambaran bahwa potensi laut ada pada fungsinya memfasilitasi perdagangan. Karena perdagangan barang atau komuditas dalam volume besar hanya bisa diberikan melalui transportasi laut. Untuk menjadi kekuatan Dunia dalam transportasi laut, pemerintahan Joko

[175] Tri Rini Puji Lestari, "Pembangunan kesehatan dan Pembangunan Berkenjutan," dalam Sali Susiana, ed., *Pembangunan Berkelanjutan Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*, (Jakarta: P3DI Serjen DPR RI, 2015), h. 36.

Widodo memperkenalkan pembangunan "*tol laut*." Dan "*poros maritim*" sebagai salah satu visi pembanguan dalam mebangun potensi kelautan nasional. Pemikiran ini berangkat dari strateginya laut dalam memfasilitasi perdagangan dalam skala internasional maupun nasional. Transportasi laut yang efesien akan memperkecil disparitas pembangunan dan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah terutama antara daerah maju dengan daerah tertinggal. Transportasi yang efisien menjadi faktor penting dalam menurunkan biaya logistik atau ekonomi. Ini akan mendorong perpindahan barang dan manusia antar satu daerah dengan daerah lainnya secara lebih besar. Pertukaran barang atau komoditas antar daerah yang berkembang dengan baik, akan menempatkan satu komoditas tidak hanya berada di suatu daerah saja tetapi bisa dipertukarkan/diperdagangkan dengan daerah lain yang memiliki potensi pengembangan.[176] Dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT. berfirman:

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

> *"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar diatasnya dengan perintah-Nya, dan agar* kamu *dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur."* (QS. Al-Jasiyah [45] : 12).

Dengan transportasi laut yang memadai, potensi ekonomi bisnis jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 16 milyar US$

[176] Suhartono, Kebijakan Pembangunan Sektor Maritim dan daerah Tertinggal, dalam I Wayan Rusastra, *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia,* (Jakarta: P3DI Serjen DPR RI, 2015), h.12.

per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir kita mengeluarkan devisa sekitar 16 milyar US$ untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% dari total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia. Sementara itu sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya. Potensi ekonomi ini akan lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 sebenarnya telah bergeser dari poros atlantik ke poros Asia-Pasifik. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75% dari barang-barang yang diperdagangkannya ditransportasikan melalui laut, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makasar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar 1,500 trilun dolar AS setiap tahunnya.[177]

Hasil suvei LPI menunjukkan bahwa pada tahun 2014 menempatkan Indonesia pada peringkat 53 dari 150 negara. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-6 di bawah Singapore, peringkat (5), Malaysia (25), Thailand (35), dan Vietnam (48). Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Filipina yang pada peringkat (57), sedangkan Kamboja (83), Laos (131), dan Myanmar peringkat (145).

Bila melihat secara rinci indeks daya saing infrastruktur, peringkat indeks konektivitas Indonesia di sektor transportasi jalan terus mengalami peningkatan daya saing di mana tahun 2013 pada peringkat 90 menjadi 72 pada tahun 2014, namun masih jauh dengan Malaysia yang berada pada peringkat 20 dan

[177] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, (Bogor: Roda Bahari, 2016), Cet V, h. 83.

Thailand pada peringkat 50. Demikian pula dengan infrastruktur untuk kereta api, mengalami peningkatan dari posisi 54 menjadi 41, namun Malaysia masih tetap berada pada posisi lebih tinggi, yaitu peringkat 12. Sedangkan di sektor transportasi laut tahun 2014 meningkat menjadi 77 dibandingkan tahun 2012 yang menduduki peringkat 104. Peringkat tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia. Dengan melihat kondisi infrastruktur tersebut, tentunya Indonesia harus mengejar ketertinggalan mengingat wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau, sehingga perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar satu wilayah ke wilayah lainnya.[178]

Oleh karena itu, sebuah harapan besar di mana kebijakan secara integral dan menyeluruh dapat diterapkan pada sektor transportasi laut untuk mendorong kebijakan kemaritiman Indonesia. Konsolidasi antar BUMN tidak hanya diperlukan dalam perusahaan yang melakukan kegiatan pada bidang transportasi laut, melainkan pada seluruh model usaha BUMN. Dan tentunya ini melibatkan peran seluruh stakeholder maritim di Indonesia.[179]

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, tentunya ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan laut. Undang-undang dimaksud UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang tersebut

---

[178] Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: P3DI Serjen DPR RI, 2015), h. 9.

[179] Rafika Sari, "Sektor Transportasi Laut dan BUMN: Upaya Menekan Inefesiensi Melalui Integrasi Usaha," dalam I Wayan Rusastra, *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut Sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan,* (Jakarta: P3DI Serjen DPR RI, 2015), h. 58.

digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia.

Dalam ketentuan umum UU Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. Kegiatan itulah yang diatur dalam UU Pelayaran.

Setelah selesai Perang Dunia II PBB membentuk organisasi khusus untuk menangani masalah maritim dengan nama "*International Maritime Organization* (IMO)" pada tahun 1948. Sejak itu secara bertahap IMO membuat berbagai jenis peraturan atau konvensi mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi kemaritiman untuk digunakan oleh anggotanya termasuk Indonesia dalam membangun, mengoperasikan, memelihara dan mengawaki kapal-kapalnya. Dengan adanya IMO semakin menegaskan bahwa laut adalah milik umat manusia yang harus dilindungi bersama dan dicegah dari pengrusakan dan pencemaran oleh siapa saja. Sejak itu peran IMO semakin penting dalam melahirkan konvensi-konvensi yang digunakan sebagai standar kelaiklautan kapal-kapal laut (kapal niaga), untuk bersaing memperebutkan pasar.

Salah satu instrumen untuk mengawasi bentuk persaingan yang dibuat oleh PBB/IMO adalah kesepakatan bersama anggotanya (Pemerintah) untuk melakukan pengawasan bersama terhadap kapal-kapal yang memasuki pelabuhan masing-masing negara, disebut "*Port State Control*". Untuk efektivitas pelaksanaannya, dunia dibagi dalam beberapa zona, setiap zona membuat memorandum yang disepakati bersama

dalam zona itu. Indonesia masuk anggota zona "Tokyo Memorandum".

Petugas pelabuhan yang diakui pemerintah (Port State Controller) berkewajiban memeriksa kondisi dan kelaiklautan setiap kapal yang datang ke pelabuhannya. Petugas tersebut berhak menahan sebuah kapal kalau dianggap membahayakan kapal, muatan dan penumpang di atasnya untuk melanjutkan pelayaran. Kapal tersebut diharuskan memperbaiki atau melengkapi persyaratan kelaiklautan kapal yang sudah ditentukan sebelum diizinkan berlayar.

Petugas harus mengetahui cara melakukan pemeriksaan dan bagian-bagian mana saja yang harus diperiksa. Karena itu di negara-negara maju pemeriksaan didelegasikan pada badan usaha atau perorangan yang memang profesional mengetahui masalah kelaiklautan dari jenis dan tipe kapal yang diperiksa. Seperti contoh di pelabuhan minyak Bukom Singapore yang dioperasikan oleh Mobil Oil, dari dulu PSA Singapore mendelegasikan tugas tersebut ke petugas marine, Mobil Oil atas nama Pemerintah Singapore. Tidak dilakukan oleh Port Authority atau Syahbandar setempat.

Hasil pemeriksaan dan perbaikan yang telah dilakukan dan bila ada rekomendasi tambahan perbaikan atau supply yang perlu, segera dilaporkan ke pelabuhan berikut (next Port) yang akan dikunjungi kapal itu dengan maksud supaya Port State Controller setempat mengetahui kondisi kelaiklautan kapal itu sebelum tiba dan bersiap memberikan pelayanan sesuai rekomendasi dari pelabuhan sebelumnya.

Pemeriksaan di pelabuhan tidak hanya dilakukan pada kapal-kapal pelayaran internasional tetapi juga kapal-kapal pelayaran domestik, supaya semangat meningkatkan keselamatan dan melindungi lingkungan berjalan baik demi untuk kepentingan bersama.

Sejauh yang kita ketahui hal-hal yang disebutkan di atas kurang diperhatikan oleh Pemerintah. Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut yang menjadi mitra kerja IMO di Indonesia cenderung tidak memanfaatkan kemudahan dan peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional itu. Pemerintah membuat peraturan sendiri dengan dalih untuk kepentingan dan kebanggaan nasional. Padahal, dalam era globalisasi yang diperlukan adalah pengusaha nasional dapat bersaing tanpa hambatan dengan pengusaha asing, memperebutkan pangsa pasar yang tersedia terutama mengangkut barang/penumpang dalam negeri, komoditi yang diekspor dan diimpor dan kegiatan pertambangan di lepas pantai.

Dari kenyataan seperti yang ditulis di atas, Indonesia yang sangat berkepentingan dengan UNCLOS 1982 dan IMO Conventions dimana Indonesia telah diakui secara internasional sebagai negara kepulauan. IMO Conventions yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sebagai standar kelaiklautan kapal melakukan persaingan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat peraturan menjaga keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan pelayaran. Namun, sangat disayangkan sampai sekarang Pemerintah harus serius menggunakan kemudahan yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota IMO antara lain mengizinkan perusahaan niaga Nasional memiliki kapal (Bendera Kemudahan).[180]

[180] Hukumonline, Masalah dalam Penerapan UU Pelayaran, diakses pada 04 September 2017 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dfb22c545ed4/masalah-dalam-penerapan-uu-pelayaran-broleh--pieter-batti-, jam 13.30 WIB.

C. Prioritasi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya redistribusi keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional "*Kemaritiman dan Kelautan*" dan "*Kedulatan Pangan*", maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.[181]

Peranan sektor perikanan dalam pembangunan nasional terutama adalah mendorong pertumbuhan agroindustri melalui penyediaan bahan baku, meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produk perikanan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta menunjang pembangunan nasional. Sejalan dengan itu maka kebijakan umum pembangunan sektor perikanan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, perluasan kesempatan kerja dan efisiensi usaha serta peningkatan pendapatan usaha sektor perikanan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dalam beberapa tahun terakhir ini selalu positif dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, kontribusi sektor perikanan

[181] Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019*,(Jakarta: KKP,2015). h. 3.

mencapai 3,37 persen, meningkat 0,16 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,21 persen.[182]

Semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam di darat juga ikut mendorong pembangunan bergeser kearah wilayah pesisir maupun laut. Potensi ini perlu diberdayakan agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam pengoptimalan potensi yang ada menurut penulis tesis diperlukan berbagai kebijakan yang mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan ekonomi kreatif kelautan.

Saat ini regulasi kita telah diundangkannya UU NO. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, untuk lebih gampangnya kita singkat UU NPPG, ini sangat menarik, implementasinya bagaimana?

Ada beberapa catatan penting dan harus diperhatikan dalam aspek UU NPPG ini. nelayan memimilki hak yang sama seperti warga negara lainnya seperti hal masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Aspek-aspek itu antara lain sebagai berikut: ***Pertama,*** perlindungan atas tempat tinggal (pemukiman) yang berupa sertifikasi tanah rumah nelayan. Sertifikasi tanah hak milik nelayan menjadi sangat penting, dengan setifikat tersebut nelayan bisa dijadikan sebagai jaminan di bank untuk jaminan usaha. ***Kedua,*** perlindungan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang layak ataupun pelayanan atas hak-hak dasar lainnya ***Ketiga,*** perlindungan atas harga ikan (usaha nelayan), perlindungan ini sangat penting karena hasil tangkapan ikan yang tidak menentu membuat nelayan kesulitan dalam mengatur standar harga maksimal. ***Keempat,*** perlindungan untuk mendapatkan bantuan hukum, artinya

[182] Eka Budiyanti "Peran Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Sektor Perikanan" dalam I Wayan Rusastra, *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut Sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan,* (Jakarta: P3DI Serjen DPR RI, 2015), h. 91.

nelayan yang mengahadapi kasus hukum yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan nelayan harus diberikan pelayanan. ***Kelima*****,** perlindungan wilayah tangkap ikan untuk mencegah kompetensi yang tidak sehat. Sejatinya perlindungan harus dibarenggi dengan langkah pemberdayaan. Pemberdayaan yang menyentuh terhadap pelayanan hak-hak dasar dan kebijakan pemerintah terhadap pasar modal juga menjadi isu penting. Artinya pada point ini pemerintah tak hanya melindungi, namun bagaimana memberikan pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap nelayan. Merujuk pada survei sosial dan ekonomi nasional 3013 menunjukkan, bahwa sekitar 25 persen nelayan mengalami gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir saat di survei. Sebagian besar dari mereka (nelayan) tergangu aktivitas untuk mencari nafkah sehingga itu berdampak pada rumah tangga nelayan. Sedangkan 54 persen yang memilki jaminan kesehatan, dan sakit sedikit miskin menjadi problem nelayan. (Artikel Kompas 2014).[183]

Bila kita memilah agar muda dalam memahami wilayah sektor perikanan di Indonesia, maka penulis menyederhanakan menjadi dua wilayah, yaitu:

1) Perikanan Tangkap

Untuk pemberdayaan para nelayan dalam usaha peningkatan ekonomi kelautan perikanan tangkap, dengan mengutip Rokhim Dahuri ada lima prinsip sebagai berikut. *Pertama*, pengembangan 5.000 unit armada berukuran di atas 50 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan sumber ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing atau yang masih underfishing (tingkat

[183] https://indonesiana.tempo.co/read/109049/2017/03/13/UU-NPPG--Lindungi-dan-Berdayakan-Nelayan-Kita

penangkapan ikan lebih rendah dari pada posisi potensi lestari sumber daya ikan), seperti Laut Arafura, Laut Banda, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Natuna, dan ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) di Samudera Hindia dan Pasifik.

Kedua, kapal-kapal ikan dan nelayan yang selama ini berprofesi di wilayah laut yang telah overfhising, seperti perairan Pantura dan perairan pantai lainnya harus dilatih supaya mampu beroperasi di wilayah-wilayah laut yang masih underfishing / laut lepas (*ocean going fisheries*). Nelayan tradisional yang sebagian besar masih miskin harus ditingkatkan kapasitas dan etos kerjanya, sehingga pendapatan nelayan minimal 300 dolar AS (Rp. 3,9 juta)/nelayan/bulan. Angka ini berasal dari dua dolar AS/orang/hari(garis kemiskinan versi Bank Dunia) dikalikan dengan 5 orang (rata-rata ukuran keluarga nelayan) dan dikalikan dengan 30 hari dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp. 13.000.

Ketiga, seluruh sarana produksi seperti alat tangkap, BBM/energi terbarukan, es, beras, dan perbekalan melaut lainnya harus tersedia di seluruh pelabuhan perikanan (pemukiman nelayan) dengan harga relatif murah dan setiap saat dibutuhkan nelayan. Program pembangunan SPBM (Stasiun Pengisihan BBM untuk nelayan) yang telah diluncurkan sejak pemerintahan Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati Soekarnoputri), dan kios pesisir pada awal 2002 harus terus diperkuat dan dikembangkan.

Kempat, pemerintah juga harus menjamin pasar bagi seluruh ikan hasil tangkapan nelayan dengan sesuai nilai keekonomian. Disinilah perlu didirikan semacam BULOG perikanan. Dengan kata lain, ikan dan produk ikan lainnya harus dijadikan sebagai komoditas strategis nasional seperti halnya beras, jagung, kedelai, gula, dan daging (sapi dan ayam).

Kelima, revitalisasi semua pelabuhan perikanan yang ada, dan pembangunan pelabuhan perikanan baru sesuai kebutuhan supaya semua pelabuhan perikanan di seluruh wilayah NKRI memenuhi persyaratan (standar) teknis, sanitasi dan higienis baik nasional maupun internasional.[184]

2) Perikanan Budidaya

Untuk pemberdayaan perikanan budidaya dalam usaha peningkatan produktivitas hasil perikanan, dengan mengutip Rokhim Dahuri ada lima prinsip penting sebagai berikut. *Pertama*, revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability) usaha-usaha (bisnis) perikanan budidaya di: (1) perairan laut (mariculture); (2) perairan payau (tambak); (3) perairan tawar (danau, sungai, waduk, sawah/minapadi, saluran irigasi, dan kolam); maupun (4) aquarium untuk ikan dan tanaman hias.

Kedua, pengembangan usaha perikanan budidaya di kawasan baru (*ekstensifikasi*) dengan berbagai komoditas unggulan; (1) budidaya laut dengan komoditas unggulan seperti kakap putih (barramundi), kerapu, bawal bintang, ikan gobia, lobster, teripang, rumput laut (Euchema spp, Sargasum spp, dan lainnya), kerang hijau, dan kerang mutiara di dua juta ha kawasan perairan laut yang belum terkena percemaran; (2) budidaya tambak dengan komoditas unggulan seperti ikan bandeng, kakap, nila salin, kepiting soka, dan rumput laut (gracillaria spp); (3) budidaya di perairan tawar dengan komoditas unggulan seperti ikan nila, patin, lele, ikan mas, gurame, bawal air tawar, udang gala, dan lobster air tawar (cerax spp); dan (4) budidaya atau pemeliharaan ikan, tanaman hias, dan biota perairan lainnya di dalam aquarium.

---

[184] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, h.60.

Ketiga, diversifikasi usaha perikanan budidaya dengan spesies-spesies (varietas-varietas) baru, baik ikan, crustacean (udang-udangan), Mollusca (kekerangan), rumput laut/macro-algae (seperti jenis Turbinaria spp, Sargasum spp, Ulva spp, dll), fitoplankton/micro-algae, teripang, abalone, dan biota perairan lainnya. Ini peluang yang luar biasa besar dan sangat menjanjikan (cerah) bagi Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) perairan yang paling tinggi di dunia. Dan sampai sekarang baru membudidayakan sekitar 25 spesies biota perairan. Sementara China (Tiongkok) yang keanekaragaman hayati perairannya jauh lebih rendah ketimbang Indonesia, telah berhasil membudidayakan lebih dari 100 spesies biota perairan (Prof. Komar Sumantadinata,2010). Dengan perkataan lain, peluang usaha (bisnis) di perairan budidaya di Indonesia sejatinya masih terbuka sangat luas dan besar.

Keempat, secara teknologi budidaya, supaya ketiga kebijakan dan program di atas bisa berhasil, maka harus menerapkan cara-cara perikanan budidaya yang terbaik (*Best Aquaculture Practices*) yang meliputi: (1) pemilihan lokasi (*site selection*) usaha budidaya yang tepat dan benar (2) penggunaan bibit dan benih unggul (Specific Pathogen Free/bebas penyakit, Specific Pathogen Resisten/tahan penyakit, cepat tumbuh, dan karakter unggul lainnya; (3) pemberian pakan berkualitas secara tepat dan benar; (4) pengendalian hama dan penyakit; (5) tata letak (lay out), desain, dan konstruksi kolam (wadah) budidaya yang tepat dan benar, supaya aliran air di dalam wadah lancar dan dapat mensirkulasikan oksegen (O2) dengan baik, sehingga kondisi kolam baik untuk kehidupan dan pertumbuhan biota yang dibudidayakan dan (6) biosecurity.

Keenam, pengembangan induk (*broodstock*) dan benih unggul yang bebas penyakit (SPF= *Specific Pathogen Free*), tahan

terhadap serangan penyakit (SPR= *Specific Pathogen Resisten*), dan cepat tumbuh (FCR rendah).[185]

D. Pengembangan Ekonomi Lokal, Pesisir dan Pulau Kecil

Pengembangan dan pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat dengan pengembangan ekonomi lokal diharapkan ada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan didapatkan dengan mengikutsertakan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembangunan nasional berhasil, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari proses pembangunan untuk semuanya adalah pembangunan ekonomi lokal di setiap wilayah (propinsi dan kabupaten/kota), dengan maksud mengembangkan sebuah ekonomi domistik yang kuat secara nasional, yang artinya tidak ada propinsi-propinsi yang dimana tingkat pembangunannya rendah, atau kabupaten dan kota yang terbelakang di sebuah propinsi. Sebuah ekonomi domistik yang kokoh adalah aset utama bagi negara untuk bisa unggul atau paling tidak bertahan di dalam desakan yang semakin kuat dari globalisasi. Pelajaran penting yang didapatkan Indonesia dari krisis ekonomi global pada periode 2008-2009 adalah fakta bahwa negara-negara yang mampu menghadapi resesi ekonomi global atau bisa bertahan selama resesi terjadi adalah negara-negara dengan sebuah ekonomi domistik yang kuat juga menjamin kemampuannya memenuhi semua kebutuhan dasarnya (mandiri). Ini

---

[185] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, h. 63.

merupakan alasan mengapa penguatan kembali hubungan-hubungan antar wilayah menjadi sebuah keharusan.[186]

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pembangunan berorientasi kemaritiman memiliki tantangan yaitu masih kuatnya orientasi kontinental-agraris dalam paradigma pembangunan dan pada tahun 2004 terdapat 199 kabupaten yang masuk kategori tertinggal. Di antara 199 kabupaten, di antaranya 50 kabupaten berhasil mengentaskan diri dari ketertinggalan. Namun, pada tahun 2009 karena ada pemekaran daerah baru, daerah tertinggal yang seharusnya menurun jumlahnya menjadi 145 daerah, dan meningkat menjadi 183 kabupaten. Dari jumlah 199 daerah tertinggal sebagaimana dikemukakan di atas, sebanyak 20 kabupaten di antaranya berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Di luar kategori wilayah tertinggal, terdapat sejumlah kawasan yang dapat disebut sebagai "kawasan paling tertinggal." Pada umumnya, kawasan itu belum tersentuh oleh jaringan pelayanan sosial, ekonomi dan politik. Sementara itu, hampir seluruh pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di dalam wilayah kedaulatan negara kita, yang berjumlah 92 pulau, termasuk dalam kategori kawasan tertinggal. Berdasarkan sebaran wilayahnya sebanyak 123 kabupaten (63 persen) kawasan tertinggal berada di Kawasan Timur Indonesia, 58 kabupaten (28 persen) berada di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten (8 persen) berada di Pulau Jawa dan Bali.[187]

Oleh karena itu, wajar bila pencapaian hasil pembangunan kelautan dimasa lalu menyisahkan begitu banyak pekerjaan rumah. Saat ini kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap PDB hanya sekitar 20%. Padahal negara-negara dengan potensi

---

[186] Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, h.25.

[187] Suhartono, "Kebijakan Pembangunan Sektor Maritim dan Daerah Tertinggal," dalam I Wayan Rusastra, *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut Sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan,* h. 6.

kekayaan laut yang lebih kecil ketimbang Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, RRC, Selandia Baru dan Thailand, kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB. Mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir masih terlilit derita kemiskinan. Sementara gejala overfishing, kerusakan ekosistem pesisir (terumbu karang, hutan mangrove, dan estuaria) dan pencemaran melanda sekitar 40% wilayah pesisir dan laut.[188]

Sudah saatnya untuk mendapatkan perhatian serius pesisir dan pulau-pulau kecil perbatasan. Pulau-pulau kecil perbatasan Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Landas Kontinen Indonesia, juga sekaligus sebagai sabuk pengaman (*safety belt*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil perbatasan dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan.[189]

Salah satu strategi pembangunan pulau-pulau perbatasan adalah pengembangan ekonomi pulau-pulau tersebut menjadi kota-kota industri mandiri yang maju dan kota-kota pertahanan dan keamanan, dengan memanfaatkan kerja sama ekonomi atau kerja sama pertahanan/keamanan dengan negara terdekat (negara tetangga). Pengembangan pulau-pulau kecil perbatasan dilakukan dengan terlebih dahulu memberdayakan pulau-pulaunya, agar wilayah tersebut memiliki ketertarikan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas jalan, air, listrik, pelabuhan laut, sarana komunikasi, transportasi laut,

---

[188] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, h. 44.

[189] Mustafa Abubakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan,* (Jakarta: Kompas, 2006), h. xii.

serta fasilitas social seperti sekolah, rumah sakit, sarana olahraga, rekreasi dan lain-lainnya. Sementara infrastruktur ekonomi seperti industri (termasuk industri sumber daya maritim), fasilitas perdagangan, pusat perbelanjaan, bank lokal (BPR), dan sebagainya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan melibatkan pengusaha dan masyarakat sebagai stakeholder investasi.[190]

E. Konektivitas Ekonomi Dunia

Sejak tahun 2011, pelabuhan pelabuhan di Indonesia mulai diatur di bawah payung hukum Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana sebelumnya pengaturan pelabuhan didasarkan pada Undang-Undang No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Salah satu pertimbangan utama disusunnya Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ini adalah dalam upaya mengikuti perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Perbedaan mendasar tentang payung hukum sebelumnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan fondasi untuk reformasi sistem pelabuhan di Indonesia secara menyeluruh yang menghapus monopoli sektor negara atas pelabuhan dan membuka peluang untuk partisipasi baru sektor swasta.[191]

---

[190] Mustafa Abubakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan,* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 124.

[191] T.Ade Surya, "Kinerja dan Reorientasi Kebijakan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Maritim," dalam I Wayan

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan hasil pembangunan kelautan (pesisir dan lautan) bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa diperlukan cetak biru (*blueprint*) pengelolaan pembangunan kelautan. Di dunia yang semakin terintegrasi (*highly interconnected*), suatu konsep perencanaan (*blueprint*) pembangunan akan tepat dan benar, bila mempertimbangkan bukan hanya kondisi internal dari suatu negara (wilayah) atau bangsa itu sendiri, tetapi juga dinamika lingkungan strategi global.[192]

Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastuktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan daya saing itu perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domistik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia.

Peningkatan pembangunan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, kereta api, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *inter-modal supply*

Rusastra, *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut Sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan,* h.72.

[192] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, h. 102.

chained system;(b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hainterland*); (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Upaya pembangunan konektivitas tersebut antara lain akan membangun 2.650 kilometer jalan arteri dan 1.000 kilimeter jalan tol, membangun 3.258 kilometer jalur kereta api, mengembangkan 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut, 15 bandara baru dan mengembangkan bandara yang ada, pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara, modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran, membangun bank pembangunan dan infrastruktur, serta mendorong BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.[193]

Secara global nilai ekspor hasil perikanan meningkat tajam dalam dekade terakhir, yaitu dari USD 15 miliar pada tahun 1980 menjadi USD 127 miliar pada tahun 2011. Sekitar 50 persen dari total ekspornya berasal dari negara berkembang. Perkembangan perdagangan tersebut berkaitan erat dengan perubahan rantai suplai dan perkembangan logistik, distribusi, dan pengemasan (*material handling*). Hal ini terjadi karena pasar menjadi lebih terbuka (era globalisasi) dan pada saat yang sama perhatian terhadap standar keamanan pangan, food waste, dan isu lingkungan juga semakin meningkat.[194]

Indonesia menurut penulis tesis harus mengalami reformasi sistem perdagangan dari orientasi ke dalam menjadi

---

[193] Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, h. 61.

[194] Iwan Hermawan, "Peran Fasilitas Perdagangan Terhadap Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Kawasan ASEAN," dalam I Wayan Rusastra, *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut Sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan,* h.114.

ke luar, Indonesia sudah terbukti sebagai bagian terpenting pelaku perniagaan dunia pada abad III-VII dan dalam perdagangan globalisasi abad XXI ini harus kembali menjadi pusat perhatian perdagangan dunia. Komitmen kebijakan fasilitasi perdagangan internasional dengan bentuk penyerderhanaan prosedur, standarisasi perdagangan, pengawasan pergerakan barang antar negara, pabean dan aliran informasi dapat menjadi jembatan dalam mendapatkan benefit perdagangan global.

F. Wisata Bahari

Begitu besar peluang dan potensi bahari Indonesia, namun sepertinya belum semua dikembangkan dengan maksimal, termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Meskipun belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari, namun jika dibandingkan dengan Australia Barat yang garis pantainya hanya 2 ribu kilometer, namaun mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar 3 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu Indonesia yang memiliki garis pantai 99 ribu kilometer, maka sebenarnya potensi ekonomi pariwisata bahari sangatlah besar. Indonesia juga masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Thaliland, Malaysia, dana Maladewa yang notabene panjang garis pantainya tidak mencapai setengah dari panjang garis pantai Indonesia.

Sumbangan pariwisata bahari baru mencapai 10 persen dari total pariwisata di seluruh Indonesia. Terdapat tiga bagian wisata dalam pariwisata bahari, yaitu pantai, laut dan bawah laut. Menurut Arief, dari 100 persen pariwisata bahari, sebanyak 60 persen di antaranya banyak wisata pantai, kemudian 30 persen wisata laut, dan 10 persen bawah laut.

Kita memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam luar biasa besarnya, sehingga sektor tersier yang harus mendapat perhatian khusus dalam jangka pendek-menengah adalah pariwisata. Malaysia, Thaliland dan Singapura sangat cerdas memanfaatkan peluang industri pariwisata. Hasilnya tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan asing (wisman) ke tiga negara tersebut secara berurutan mencapai 30, 29 dan 14 juta orang dengan perolehan devisa lebih dari 20 miliar dolar AS.

Indonesia yang memiliki pantai sangat indah, terpanjang kedua di dunia dengan 17.508 pulau, ternyata belum banyak yang memanfaatkan pantainya sebagai obyek wisata bahari. Keindahan alam bawah laut Indonesia dengan aneka makhluk hidup dan terumbu karangnya adalah potensi pariwisata Indonesia yang tidak tertandingi. Indonesia memiliki belasan ribu pulau, namun hingga kini beberapa obyek wisata bahari yang terkenal, seperti Bali, Lombok, Raja Ampat, Bunaken, Kepulauan Mentawai, Wakatobi, dan Pulau Komodo.

Kondisi ini tentu saja sangat merugikan. Padahal jika sebagian dari belasan ribu pulau yang dimiliki tadi dikembangkan secara maksimal, maka potensinya akan sangat luar biasa besar, yang pastinya akan memberi tambahan devisa bagi Indonesia.[195]

Oleh sebab itu, agenda pembangunan pariwisata bahari yang mestinya kita kembangkan yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan (*income*) yang dapat menyejahterakan seluruh masyarakat secara berkeadilan dan berkesinambungan. Konsep pengembangan pariwisata bahari menurut pelulis tesis yang mengutip dari Rokhmin Dahuri sederhananya sebagai berikut.

---

[195] Yuni Sudarwati, " Pengembangan Pariwisata Bahari: Kompleksitas dan Strategi Pemasaran," dalam I Wayan Rusastra, *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut Sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan,* h. 153.

Pertama, pembenahan obyek (*destinasi*) wisata yang ada dan mengembangkan destinasi yang baru. Kedua, pengembangan jenis-jenis wisata bahari baru secara inovatif (*product development*). Ketiga, peningkatan aksesibilitas dari dan ke obyek wisata melalui transportasi laut, darat maupun udara. Keempat, pembenahan dan pembangunan baru infrastruktur dan sarana di sekitar lokasi wisata. Kelima, peningkatan promosi dan pemasaran melaui berbagai media dan eksibisi baik di dalam maupun di luar negeri. Keenam, peningkatan kualitas SDM pariwisata bahari dan kesadaran serta perilaku masyarakat lokal supaya lebih kondusif dan menyenangkan para wisatawan domistik maupun mancanegara.[196]

G. Bioteknologi Kelautan

Bioteknologi pada abad ke-20 memperlihatkan telah menjadi suatu cabang Biologi modern yang mampu mengubah dalam sendi kehidupan manusia sehari-hari, misalnya dalam hal memperbaiki kualitas kesehatannya dan kehidupan manusia itu sendiri. Keterkaitan antara penelitian dasar dan pengembangan teknologi diperlihatkan oleh sebuah perusahaan, yaitu Genetech, yang saat ini merupakan perusahaan Penelitian dan Pengembangan(R&D) bidang bioteknologi terbesar dunia.

Perkembangan teknologi yang amat pesat ini merupakan tonggak hadirnya revolusi industri ketiga di bumi ini. Proses perkembangan tersebut memperlihatkan putaran sangat cepat perusahaan-perusahaan bioteknologi yang berkembang dari universitas selanjutnya melakukan kerja sama dengan dunia industri tersebut, seperti yang diperlihatkan oleh Genentech, Cetus dan Biogen.

---

[196] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, h. 70.

Ringkasnya, istilah Bioteknologi Kelautan terdiri dari dua(2) suku kata; Bioteknologi dan Laut. Bioteknologi dapat dimengerti sebagai suatu teknik untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang berguna bagi manusia. Bioteknologi sebenarnya merupakan gabungan beberapa cabang ilmu yaitu: Biologi, Kimia, Biokimia,Genetika dan rekayasa (engineering). Sedang laut atau hasil laut) merujuk pada objek yang merupakan 75% dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) belum banyak digali dan digunakan dengan optimal oleh bangsa Indonesia.

Mengapa perlu kajian dibidang Bioteknologi Kelautan? Setidaknya ada empat(4) alasan dapat dikemukakan, yakni:

1. Ilmu masa depan
2. Revolusi ilmiah dan sosial
3. Sumber daya laut Indonesia melimpah
4. Kunci pembangunan bangsa.

Masing masing alasan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: "Ilmu masa depan" berarti melalui Bioteknologi Kelautan menghasilkan atau menemukan jawaban terhadap persolan dunia masa kini, sehingga berarti pula memberikan masa depan yang cerah. "Revolusi ilmiah dan sosial" memiliki makna yaitu produk yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah ini mempunyai nilai sosial (dalam arti: kesehatan, lingkungan, pangan dan lain lain). Sedangkan "Sumber daya melimpah" merujuk pada kondisi Indonesia sebagai megadiversity, khususnya dalam hal kekayaan sumber daya hayati lautnya yang sangat beragam dan diakui dunia. "Kunci pembangunan bangsa" berarti bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mau dan mampu mendayagunakan lautnya secara berkelanjutan (*sustainable*).[197]

[197] Boy Rahardjo Sidharta, *Bioteknologi Kelautan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 30.

Beberapa contoh kegiatan penelitian yang terkait dengan Bioteknologi Kelautan di berbagai negara, termasuk Indonesia, antara lain:

1. Karaginan: senyawa ini berasal dari beberapa jenis rumput laut merah dan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang industri (makanan, susu kental, pasta gigi dan seterusnya). Agarose: senyawa kimia ini juga diekstrak dari berbagai jenis rumput laut dan telah dipakai dalam kegiatan elektroforesis, kromatografi, dan lain-lain.
2. Obat/farmasi: misalnya senyawa antibiotik, antikanker, analgetik, antihemolitik, antisipertensi dan lain lain telah berhasil diperoleh dari berbagai jenis organisme laut. Insulin: merupakan obat untuk mengatasi diabetes, yang diektrak dari ikan tuna dan paus. Toksin (racun): yang dihasilkan berbagai jenis organisme laut telah digunakan sebagai model untuk mempelajari proses sintesis (pembuatan) suatu jenis obat.
3. Lingkungan: berupa penguraian biologis limbah (bioremidiasi), pelapukan biologis (biofouling). Iklim global: fitoplankton dapat "memakan" CO_2 untuk membantu mengatasi pemananasan global (global warming), produksi biofuel dari fitoplankton yang dapat menggantikan pemakian bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari minyak bumi (fossil fuel) dan seterusnya.
4. Pangan dan pakan: berupa rekayasa budi daya ikan, invertebrata, moluska, krustase (crustacea) dan seterusnya.

5. Pertanian: rekayasa tanaman pertanian sehingga tahan kadar garam tinggi sehingga dapat ditanam di kawasan pantai.[198]

H. Revitalisasi Armada TNI dan Kepolisian

Di wilayah lautan Indonesia terdapat 182 base point atau garis pangkal yang dijadikan dasar dalam penetapan perbatasan wilayah laut dengan sepuluh negara, yakni: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Pilipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Dari kesepuluh negara ini, baru dengan Australia kesepakan perbatasan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh. Sedangkan, dengan sembilan negara lainnya masih dalam proses perundingan yang belum tuntas. Dari aspek ini maka pembangunan pertahanan dan keamanan di laut menjadi sangat penting untuk memelihara dan menjaga kedaulatan negara dan bangsa.

Di sisi lain pembangunan ekonomi sumberdaya kelautan dapat mendorong terciptanya kondisi pertahanan dan keamanan yang baik dan dinamis secara domistik, regional dan internasional. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemanfaatan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil serta pembangunan berbagai infrastruktur berbasis kelautan merupakan beberapa bagian penting dari pembangunan kelautan yang dapat menunjang terciptanya kondisi pertahanan dan keamanan negara secara baik dan dinamis.[199]Ini ibu pertiwi kita, sabda kanjeng Nabi Muhammad Saw.:

---

[198] Boy Rahardjo Sidharta, *Bioteknologi Kelautan*, h. 30.

[199] Rokhmin Dahuri,MS, *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, h. 88.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدً[200]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a.: Aku pernah mendengar Nabi Saw. bersabda,"Orang yang mati karena mempertahankan harta miliknya adalah syahid."

Dengan potensi jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, pertahanan diusulkan untuk dikembangkan sebagai ilmu pertahanan yang bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Dengan begitu, diharapkan ilmu pertahanan akan terus berkembang sesuai kemajuan zaman.

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Syarifuddin Tippe mengatakan, dengan semakin banyak dipelajarinya ilmu pertahanan, maka akan semakin menguatkan pertahanan militer di sebuah negara. "Ilmu pertahanan ini penting sekali. Di negara-negara maju, masalah ini sudah terbuka untuk sipil. Bahkan, bisa mempengaruhi strategi pertahanan," katanya usai membuka lokakarya tentang ilmu pertahanan di Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012.

Dia mengungkapkan, pertahanan sebagai ilmu merupakan khasanah baru. Bahkan dalam kodifikasi ilmu yang dikeluarkan Unesco dan Dirjen Dikti, kluster ilmu pertahanan belum termasuk dalam program studi yang bisa diajarkan di perguruan tinggi. Padahal menurutnya, secara empirik pertahanan sebagai sebuah kajian dapat disepadankan, dan sama tuanya dengan ilmu perang. Lebih lanjut dia menegaskan, saat ini pihaknya tengah menggagas pembentukan asosiasi atau konsorsium ilmu

[200] Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari,* Penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Cet.II.h. 521.

pertahanan, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pengkajian ilmu pertahanan.[201]

Selanjutnya unsur pokok dalam pertahanan adalah personel TNI. Dia merupakan sumber daya manusia yang senantiasa harus dipersiapkan dan dibina secara terus-menerus. Dengan pembinaan yang berkesinambungan, maka organisasi TNI akan bisa berjalan dengan optimal. Betapapun canggihnya alat-alat tempur yang dimiliki TNI, maka itu tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan personel yang berkualitas. Oleh sebab itu, TNI mengedepankan reformasi birokrasi untuk meraih efektifitas penataan organisasi, dengan tujuan membangun minimum *essential force*.

Militer Indonesia berupa kelembagaan dalam wadah TNI, memiliki pandangan bersama yang diagungkan dan diprimordialkan. Pandangan bersama tersebut dikenal dengan profesionalisme TNI. Makna profesional bagi prajurit TNI adalah kedisiplinan, kerja keras, rantai komando yang kuat dan kepatuhan terhadap atasan. Negara membutuhkan prajurit TNI yang profesional agar mampu mewujudkan cita-cita bangsa, menangkal ancaman serta menjaga keamanan dari negara musuh atau kelompok separatis. Secara umum, profesional merupakan diksi yang bertalian dengan keahlian di bidang tertentu. Seseorang dikatakan profesional jika kemampuannya tidak dimiliki oleh orang lain.

Begitu pula dengan prajurit TNI, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Selain kemampuan, profesionalisme adalah tuntutan terhadap individu tentara yang

[201]Sindonews, Ilmu Pertahanan Harus Bisa Dipelajari Sipil, diakses 04 September 2017 dari https://nasional.sindonews.com/read/682376/14/ilmu-pertahanan-harus-bisa-dipelajari-sipil-1351021593, jam 15.30 WIB

harus berjalan sesuai aturan, prosedural, protokoler dan terfokus pada wewenang yang diembannya.[202]

Baru setelah itu dalam sistem pertahanan kita kembangkan harus adanya modernisasi alutsista. Menurut Jokowi, sesuai Rencana Strategi (Renstra) 2024, pertama TNI AD memiliki alutsista berat seperti tank, helikopter serbu, dan persenjataan infanteri khusus. TNI AL diperkuat dengan karakter kemampuan seperti kapal selam, kapal perang, dan permukaan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi yang punya potensi konflik. Selain itu, TNI AU juga diperkuat oleh alutsista strategi berupa pesawat jet tempur dan sistem pertahanan rudal dan radar.

Jokowi menambahkan, modernisasi alutsista nasional harus dilakukan secara transparansi dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Pasalnya, dalam pengadaan UU Pertahanan wajib diberlakukan. "Pembelian alutsista harus didahului dengan proses dan transfer teknologi ke industri pertahanan kita. Dahulukan arahnya ke sana sehingga pengembangan industri pertahanan nasional arah ke kemandirian," ujarnya.

Saat ini, sambung Jokowi, banyak negara-negara produsen alat-alat pertahanan yang ingin bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan alat pertahanan dan keamanan. Ia pun meminta jajaran menteri terkait untuk menghitung dan mengkalkukasi kembali tawaran-tawaran tersebut. Tawaran yang paling harus dipertimbangkan adalah mengenai adanya kerja sama transfer teknologi serta terobosan baru dengan mengubah pola belanja alutsista menjadi sistem investasi alat pertahanan nasional ke

---

[202]Kompasiana, Profesionalisme TNI oleh Malik Bewok, diakses pada tanggal 04 September 2017 dari http://www.kompasiana.com/malikbewok/profesionalisme-tni_55116a2f8133118248bc5fa8, jam 16.00 WIB

depannya. "Yang perlu ditekankan pengadaan alutsista harus perhatikan pendekatan daur hidup tidak boleh lagi kita beli pesawat tanpa berhitung biaya daur hidup alutsista selama 20 tahun ke depan," katanya. Dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, ujar Jokowi, pemenuhan kebutuhan alutsista nasional harus dimulai dengan interaksi antar-pemerintah. "Untuk pangkas broker, perantara yang berpotensi *mark up* harga, G to G juga akan perkuat pakta integritas untuk bentuk toleransi nol ke korupsi," tukasnya.[203]

I. Kesaksian dan Respon Tokoh Terhadap Pemikiran

Penelitian tesis ini, dalam teknik mengumpulkan data diawali dari studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya penulis melakukan wawancara mendalam secara *purposive* dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang ekonomi kelautan Gus Dur.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memang merupakan figur yang visioner pandangannya jauh kedepan. Selain seorang ulama besar, tokoh pejuang kemanusiaan, dan tokoh politik kenegaraan. Gus Dur memiliki konsep visioner cemerlang dengan mengembalikan matra politik negeri ini ke laut kembali, dengan membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan. Ini merupakan Gus Dur merupakan titik awal revolusi atau reformasi negara dalam pembangunan kelautan.[204]

---

[203]Okezone, Jokowi Ubah Skema Modernisasi Alutsista TNI, diakses pada 04 September 2017 dari https://news.okezone.com/read/2016/07/20/337/1442651/jokowi-ubah-skema-modernisasi-alutsista-tni, jam 15.30 WIB.

[204] Wawancara Pribadi dengan Rokhmin Dahuri, Jakarta, 10 April 2017.

Dengan adanya Departemen Kelautan dan Perikanan peran utamanya adalah bagaimana upaya departemen ini untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dengan memaksimalkan peran kelautan pemerataan pembangunan akan dapat terwujudkan, hal ini penting agar terdapat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun wilayahnya.

Peranan pada sektor perikanan dalam pembangunan nasional adalah mendorong pertumbuhan agroindustri melalui penyediaan bahan baku, meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil-hasil produk perikanan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta menunjang pembangunan nasional. Sejalan dengan itu maka kebijakan umum pembangunan sektor perikanan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, perluasan kesempatan kerja dan efisiensi usaha serta peningkatan pendapatan usaha sektor perikanan.

Sekarang ini saya kira melanjutkan pikiran besar Gus Dur dengan punya ide adanya pembangunan Tol Laut. Tol laut itu merupakan ide besar Gus Dur yang dilanjutkan Jokowi sehingga perpindahan barang barang diupayakan melalui kapal. Anggkutan kapal merupakan angkutan yang paling murah dan bermuatan besar.[205]

Tol Laut mempunyai peran utama dalam menciptakan keterhubungan antar pulau di Indonesia. Akselerasi terhadap konektivitas antar pulau inilah langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar pulau sangat penting dalam mempermudah aktivitas manusia di daerah atau provinsi yang harus mempergunakan transportasi

[205] Wawancara Pribadi dengan Ibnu Multazam, Jakarta, 12 September 2017.

laut sebagai penunjangnya. Sebelumnya, moda transportasi hanya menggunakan perahu-perahu motor kecil yang tingkat keselamatannya tidak memadai dan harganya pun cukup tinggi. Aktivitas pedagang kecil pun menjadi lebih mudah dengan adanya tol laut dengan menggunakan kapal-kapal perintis yang telah beroperasi. Selain lebih cepat dalam penyeberangan, harga tiket juga lebih murah, sehingga para pedagang dapat lebih meningkatkan laba penjualan dari dampak tersebut. Upaya ini untuk menegaskan kembali banhwa Indonesia sebagai bangsa maritim.

Kebiasaan dalam berfikirnya Gus Dur itu cara berfikir Out of The Box berfikir diluar kebiasaan yang ada, ketika itu banyak orang berbicara kaitannya dengan soal penguatan terhadap darat, kalau Gus Dur tidak bisa kita harus lokal wisdom sebenarnya daerah kita ini apa sih? Maritim, berarti yang diperkuat laut, pengamanan laut kita harus lebih maksimal, pengawasan dan patroli laut harus dibangun yang kuat. Perbatasan perbatasan terluar penjagaannya harus kuat sehingga orang yang mau masuk perairan Indonesia sejak dini sudah dapat terdeteksi..[206]

Laut itu merupakan primadona Indonesia banyak kekayaan disitu tapi selama ini tidak dikelola, bahkan justru yang mengelola orang asing, banyak kapal kapal asing yang mencuri. Oleh karena itu menurut Gus Dur ini harus dikembalikan pada masyarakat ya kita modernisasi kapal-kapalnya, rakyatnya diberdayakan keamanan dijaga dengan baik, sehingga orang asing tidak bisa begitu saja masuk ke Indonesia seperti kapal pencuri ikan dan pesawat asing dengan mudahnya menerobos pertahanan kita, akhirnya kekayaan kita aman. Kita coba mulai memprioritaskan pertahanan kita, pertahanan kita harus

[206] Wawancara Pribadi dengan Syaiful Bahri Anshori, Jakarta, 13 September 2017.

diperkuat terutama pertahanan daerah terluar atau perbatasan melalui modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dan ada yang lebih penting lagi perhatian terhadap tentaranya baik kesejahteraan maupun sumber daya manusianya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pandangan Gus Dur krisis ekonomi yang menghantam perekonomian Indonesia di tahun 1997 telah mengakibatkan turunnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk mampu melepaskan diri dari jeratan krisis harus meningkatkan sumber daya manusia dan mengoptimalkan sumber daya alam untuk menyusun agenda pembangunan baru yang akan merupakan rintisan bagi penciptaan peradaban baru ekonomi kelautan Nusantara.

Kemudian Gus Dur bersama pakar perekonomian Hendi Kariawan mengungkapkan bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak 1997 diperlukan reorientasi basis/dasar pembangunan ekonomi, yaitu dari ekonomi berbasis daratan menjadi ekonomi berbasis kelautan. Harus diakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia 75% terdiri dari laut. Sayang potensi ekonomi laut belum dimanfaatkan secara optimal. Mestinya ekonomi berbasis kelautan menjadi primadona pembangunan perekonomian nasional.

Hal penting selanjutnya yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang benar dalam pembangunan adalah orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala macam kebijakan pemerintah,

tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini sejak kemerdekaan negara kita, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan dalam prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa, yang berarti orientasi ekonomi ini kurang menyentuh ekonomi masyarakat kecil, maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi pembangunan. Pembangunan ekonomi sudah saatnya diarahkan pada pembangunan ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Karena struktur geografis Nusantara terbesar terdiri dari lautan, sudah tentu kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, maka program-program pembangunan ekonomi baiknya mengakar pada perekonomian berbasis kelautan.

Pada sudut pandang pengamatan yang lain Gus Dur melihat kuatnya budaya pembangunan kontinental yang ujungnya mengekploitasi alam sekuat-kuatnya, hutan-hutan dibabat oleh para pemegang HPH (Hak Penguasahaan Hutan), izin tambang-tambang yang akhirnya merusak lingkungan. Maka tinggal kekayaan lautlah yang seharusnya menjadi dasar bagi kebangkitan kembali ekonomi kita sebagai bangsa. Kita harus memulai kembali menyusun tata niaga laut kita, guna menghindari pengurasan kekayaan laut untuk kepentingan orang lain.

Ekonomi berbasis kelautan harus menjadi primadona pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu program-program pembangunan ekonomi harus mengakar pada perekonomian berbasis kelautan. Atau bahasa tehnisnya, *backward* dan *forward linkages* antar berbagai sektor di perekonomian nasional harus mengakar pada ekonomi berbasis kelautan. Ini berarti ekonomi berbasis daratan juga harus mengacu ekonomi berbasis kelautan. Termasuk di dalamnya

pertanian, perkebunan, industri dan lain sebagainya. Ringkasnya dapat dikategorikan menjadi ekonomi sektor riil, keuangan, industri, tenaga kerja, dan perdagangan internasional.

Sektor riil mencakup manufaktur hingga pertanian dan perkebunan. Sektor manufaktur harus diarahkan pada produksi supra dan infrastruktur angkutan laut yang harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Ini termasuk produksi dari berbagai sarana pengangkutan laut, peralatan pelabuhan dan sebagainya. Sementara itu, sektor pertanian dan perkebunan harus diperluas jangkauannya hingga mencakup perikanan darat (*on land aquafarming*). Hal ini secara otomatis akan menciptakan kesempatan kerja alternatif bagi para petani yang jumlahnya sudah melimpah ruah (*over crowded*) dibandingkan dengan lahan pertanian yang ada, khususnya di pulau Jawa.

Untuk mengatasi masalah ini kita harus merombak seluruh aturan main di sektor manufaktur dengan arah acuannya adalah ekonomi berbasis kelautan. Tentu saja harus sesuai dengan kaidah ekonomi pasar yang bertujuan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ambil contoh produksi makanan. Ini harus diarahkan untuk memproduksi makanan yang bersumber dari laut. Dengan jumlah pulau yang kita miliki lebih dari 17.000 maka bila produksi makanan ini tersebar di perbagai pulau tentu saja akan menciptakan stimulus bagi tenaga kerja untuk melakukan transmigrasi secara suka rela. Penyebaran penduduk semakin merata dan selanjutnya ini akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Sektor keuangan, industri, dan perdagangan. Pembiayaan dari sektor keuangan bank dan bukan bank harus diarahkan pada pengembangan sektor industri dan perdagangan yang berbasis ekonomi kelautan. Hingga saat ini pembiayaan dari lembaga keuangan bagi nelayan dan kegiatan-kegiatan usaha yang berbasis kelautan masih amat sedikit dibandingkan dengan

pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi yang berbasis daratan. Saat ini juga belum tampak program pembiayaan yang komprehensif untuk pengembangan usaha yang berbasis kelautan.

Berangkat dari cakupan ekonomi kelautan yang sangat luas sehingga sulit untuk menghitung nilai ekonomis dari seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kelautan. Lebih mudahnya Gus Dur mendefinisikan ekonomi kelautan " seluruh aktivitas ekonomi yang nilai tambahnya terkait langsung dengan laut." Lebih lanjut dapat dikategorikan bahwa kegiatan- kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut mencakup (1) turisme, (2) aquakultur, (3) pengangkutan (*shipping*), (4) pabrik dan perawatan kapal (*boat, ship building and maintenance*), (5) pertahanan dan keamanan (*military*), (6) bioteknologi dan pendidikan.

Karena manfaat ini bersifat publik maka laut dikatagorikan komoditas publik. Jadi sudah merupakan tugas negara untuk menjaga kebersihan, mengamankan dan menyelamatkan dari segala bentuk polusi laut demi kesejahteraan rakyat. Dari mana sumber dana pemerintah untuk pembiayaan itu. Tak lain ini dari pajak yang kita bayar. Ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan dan lain sebagainya.

Selain aspek pembiayaan, diperlukan juga pengaturan pengelolaan laut untuk kesejahteraan rakyat. Ini mencakup seperangkat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Menteri, Gubernur dan Bupati. Seluruh aturan main tersebut haruslah saling terkait sehingga manfaat laut memang betul betul untuk sesejahteraan rakyat.

Sebuah ungkapan Abdurrahman Wahid; Sudah saatnya Indonesia untuk melakukan reorientasi pembangunan perekonomian nasionalnya dari perekonomian berbasis daratan

menjadi berbasis kelautan. Guna menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Solusinya menghidupkan kembali ekonomi kelautan untuk pertumbuhan dan pemerataan sebagai upaya untuk menciptakan "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" sebagaimana yang diidam-idamkan oleh Pancasila.

Pemikiran Gus Dur "*Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*" menunjukkan gagasan dalam kultur tradisionalisme pemikiran yang rasionalis dan transformatif. Pemikiran ini mengajak untuk adanya pembangunan ekonomi yang inklusif dengan mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, yang dapat menghasilkan ratusan jenis produk ekonomi dan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

B. Saran

Wilayah laut merupakan sumber daya milik bersama alias tidak ada individu/perusahaan/koperasi yang memilikinya (*a common property resource*). Sebagai konsekuensinya, jika tidak diatur secara tepat dan bijaksana oleh suatu pemerintahan, baik melalui pendekatan hukum (*command and control*) maupun pendekatan ekonomi, maka pola (*regime*) pemanfaatannya pun akan mengikuti pola akses terbuka (*open access*). Siapa saja, kapan saja dan berapa saja boleh menangkap ikan dari laut, membuang limbah ke laut, dan lain sebagainya. Apabila pola pemanfaatan SDA semacam ini diteruskan tanpa pengendalian maka akhirnya akan terjadi pencemaran, overfishing, degradasi fisik ekosistem laut (seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuary), abrasi, pengikisan keanekaragaman hayati,

pemusnahan jenis (*Species extinction*), kerusakan lingkungan dan musnahnya ikan serta biota-biota laut lainnya.

Menjaga kelestarian laut adalah ibadah dan mengingatkan kita akan pentingnya adanya suatu pembangunan yang berkelanjutan. Paham tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) bersumber pada sebuah laporan yang berjudul *Our Common Future*, disusun di tahun 1987 oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*). Komisi tersebut juga dikenal sebagai Brundtland Commission karena diketuai oleh Nyonya Bo Brundtland, waktu itu Perdana Menteri Norwegia.

Penafsiran tentang pembangunan yang berkelanjutan diartikan sebagai "daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi-generasi mendatang." Dengan kata lain, proses pembangunan harus bisa berlangsung secara terus-menerus dan sambung-menyambung. Hal ini didasarkan atas usaha meningkatkan kemampuan generasi sekarang untuk memenuhi kebutuhannya (terutama kebutuhan dasar bagi golongan miskin dalam masyarakat), tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya pada tahap waktu yang bersangkutan. Dalam haluan pandangan Komisi Brundtland seharusnya tidak ada pertentangan antara tujuan dan sasaran dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua sisi kebijaksanaan yang dimaksud harus direncanakan dan dibina sedemikian rupa sehingga kedua-duanya dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dalam lingkungan hidup yang memadai secara wajar.

Kepuasan bukan didasarkan atas tingginya pertumbuhan sesaat yang didapat tetapi didasarkan atas baik buruknya sesuatu itu terhadap hasil pembangunan dan dampak

lingkungannya. Jika mendatangkan kemafsadatan pada lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah: "*Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat*."

Pemerintah dapat melakukan revitalisasi seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi ekonomi yang produktif, efisien, berdaya saing, berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*). Tapi tetap semangat menjaga kelestarian alam sebaiknya diutamakan.

Pemerintah sebagai pemegang pelaksana kekuasaan agar mengutamakan kesejahteraan rakyat secara adil dan bijaksana, sebagai tugas ibadah yang sebaiknya dilaksanakan. "Kebijaksanaan dan tindakan Imam (pemimpin) harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya (*tasharruf al-imâm 'alâ arra'iyyah manûtun bi al-maslahah*)". Sangat jelas tujuan berkuasa bukanlah kekuasaan itu sekedar untuk dirinya semata, melainkan ada amanah yang dirumuskan dengan kata kemaslahatan (*al-maslahah*).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rachmad. *Kerajaan Islam Demak: Api Revolusi Islam Di Tanah Jawa (1518-1549*). Solo: Al Wafi, 2015.

Abdullah, Taufik dan Karim, M. Rusli. *ed. Metodologi Penelitian Agama.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.

Abubakar, Mustafa. *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.

Al-Rahab, Amiruddin. *Ekonomi Berdikari Sukarno*, Depok: Komunitas Bambu, 2014.

Amalia, Lia. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Amin, Ma'ruf. *Prospek Cerah Perbankan Islam.* Jakarta: LeKAS, 2007.

Az Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari.* Penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: Mizan Pustaka, 2013.

Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah.* Jakarta: Mizan Pustaka, 2016.

Choirie, A. Effendy *at.all. Sejuta Gelar Untuk Gus Dur*. Jakarta: Pencil-324, 2010.

Dahuri, Rokhmin. *Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Bogor: Roda Bahari, 2016.

Dhakiri, M. Hanif. *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Djafar, Hasan. *Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan masalahnya.* Depok: Komunitas Bambu, 2012.

Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1994.

E. Kosasih. *Hak Gus Dur Untuk Nyleneh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Harefa, Mandala. *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI, 2015.

Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi,Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Huda, Nor. *Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kharisma Putera Utama, 2015.

Iskandar, A. Muhaimin. *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Karjo, Wing dan Moeljono, Joke. *Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Perencanaan Awal RPJMN 2014-2019*. Jakarta: Bappenas, 2014.

Kuhn, Thomas S. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Laffan, Michael. *Sejarah Islam Di Nusantara.* Penerjemah Andi Aunullah dan Rini Nurul Badriah. Bandung: Bentang Pustaka, 2015.

Lindblad, J Thomas. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia.* Penerjemah M Arief Rohman dan Bambang Purwanto, Jakarta: LP3ES, 2000.

Madjid, M. Dien dan Wahyudhi, Johan. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Mandan, Arief Mudatsir dan Miftahudin. *Jejak Langkah Guru Bangsa Abdurrahman Wahid Gus Dur*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2010.

Mas'oed, Mohtar. *Ekonomi dan struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia.* Jakarta: LP3ES, 1988.

Muhammad, Husein *Pluralisme Gus Dur Pemikiran Para Sufi*. Majalah Cahaya Sufi t.t.

Muhlisin, Muhammad. *Runtuhnya Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam di Bumi Jawa.* Yogjakarta: Araska, 2015.

M. Hamid. *Gus Gerr Bapak Prularisme & Guru Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.* Cet. II. Jakarta: LP3ES, 2012.

O.W. Wolters, *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII*. Penerjemah Edy Sembodo, Depok: Komunitas Bambu, 2011.

Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi Memahami Realitas Sosial Budaya.* Malang: Instrans Publising, 2015.

Rahardjo, Mudjia. *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa Dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Reid, Anthony. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah di Bawah Angin*. Penerjemah Mochtar Pabotingi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penerjemah Alimandan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Roelofsz, Melink. *Persaingan Eropa & Asia Di Nusantara*. Penerjemah Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu, 2016.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rusastra, I Wayan. *Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembanguan Tol Laut Sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI, 2015.

Saenong, Faried F. *Islam Indonesia: Legitimasi dan Resistensi Kultural Gus Dur di Era Orde Baru*. Jakarta: Piramida Circle dan Nusantara Institute, 2009.

Scott, James C. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Penerjemah Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1981.

Sidharta, Boy Rahardjo. *Bioteknologi Kelautan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1983.

Suaedy, Ahmad dkk., *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi Abdurrahman Wahid*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Sumartana *at.all*. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Interfidie, 1993.

Susiana, Sali ed., *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI, 2015.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Ubaid, Abdullah dan Bakir, Mohammad *ed*., *Nasionalisme Dan Islam Nusantara*, Jakarta: Kompas, 2015.

Umam, Fawaizul. *Reposisi Islam Reformulasi Ajaran*. Mataram: LEPPIM Mataram, 2011.

Wahid, Abdurrahman dan Kariawan, Hendi. *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Teplok Press, 2004.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Yusqi, Isom. *Mengenal Konsep Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka STAINU, 2015.

Website :

www.bakosurtanal.go.id
www.kbbi.kemdikbud.go.id
www.nu.or.id
www.republika.co.id

BIOGRAFI PENULIS

Lokasi Pelabuhan SDF Tarakan Kalimantan Utara

Nama Lengkap : M. Syamsul Huda
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 21 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal :
Jln. Swasembada Brt XVIII/42A RT 010 Rw 003
KebonBawang Tanjung Priok Jakarta Utara
H P: 081287191933 / 08561720212
Email: syamsulpkb@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

a. MI Miftahul Ulum Dero Kesamaben Jombang
b. SMPN 2 Peterongan Jombang
c. SMAN 1 Kesamben Jombang
d. STAIN Kediri
e. STAINU Jakarta

Riwayat organisasi :

a. Wakil Ketua PMII Cabang Kediri
b. Litbang PB PMII
c. Wakil Sekretaris PP HTMI NU
d. Wakil Sekretaris PP LTM NU

UNUSIA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

نهضة العلماء
N U
UNUSIA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA